



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

0.8
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT



KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban tersebut merupakan tindak lanjut dari tugas-tugas untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementarian/Lembaga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan periode Semester I untuk Tahun Anggaran 2025 atau sampai dengan 30 Juni 2025, yang dalam penyusunannya berbasis akrual sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan ini diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan, yaitu untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

A. Koswara

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban tersebut merupakan tindak lanjut dari tugas-tugas untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementarian/Lembaga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan periode Semester I untuk Tahun Anggaran 2025 atau sampai dengan 30 Juni 2025, yang dalam penyusunannya berbasis akrual sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan ini diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan, yaitu untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Semester I untuk Tahun Anggaran 2025 atau sampai dengan 30 Juni 2025. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

A. Koswara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	37
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	67
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	135
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	153
F. Pengungkapan Penting Lainnya	162
VI. Lampiran dan Daftar	201

DAFTAR TABEL

Tabel A.1.	Rekapitulasi Satker Lingkup Ditjen PKRL	18
Tabel A.2.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	26
Tabel A.3.	Kualitas Piutang	27
Tabel A.4.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	28
Tabel B.1.	Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2025 berdasarkan Jenis Belanja MonSAKTI	37
Tabel B.2.	Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2025 berdasarkan Kegiatan	39
Tabel B.3.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan MonSAKTI	40
Tabel B.4.	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA. 2025 dan 2024	48
Tabel B.5.	Target dan Realisasi PNPB Satker Lingkup Ditjen PKRL per 30 Juni 2025	49
Tabel B.6.	Rincian Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	49
Tabel B.7.	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kegiatan	50
Tabel B.8.	Perbandingan Realisasi Belanja Periode Semester 1 TA. 2025 dan 2024 ...	52
Tabel B.9.	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 MonSAKTI	53
Tabel B.10.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Semester 1 TA. 2025 dan 2024 ..	53
Tabel B.11.	Rincian Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 MonSAKTI	54
Tabel B.12.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Semester 1 TA. 2025 dan 2024 ...	59
Tabel B.13.	Rincian Realisasi Belanja Sosial per 30 Juni 2025	60
Tabel B.14.	Rincian Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 MonSAKTI	61
Tabel B.15.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester 1 TA. 2025 dan 2024	62
Tabel B.16.	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 ...	63
Tabel B.17.	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per per 30 Juni 2025	64
Tabel B.18.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025	65
Tabel B.19.	Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025	66
Tabel C.1.	Perbandingan Kas di BP 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 Audited	67
Tabel C.2.	Perbandingan Kas Lainnya di BP 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	69
Tabel C.3.	Perbandingan Belanja Barang Dibayar 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	70
Tabel C.4.	Perbandingan Uang Muka Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	70
Tabel C.5.	Perbandingan Piutang PNPB 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	71
Tabel C.6.	Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	75
Tabel C.7.	Neraca Persediaan Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025	76
Tabel C.8.	Mutasi Barang Konsumsi	77
Tabel C.9.	Rincian Saldo Barang Konsumsi	78
Tabel C.10.	Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan	78
Tabel C.11.	Mutasi Pita Cukai, Materai, Leges	79
Tabel C.12.	Rincian Mutasi Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	80
Tabel C.13.	Rincian Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	81
Tabel C.14.	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	83
Tabel C.15.	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	86

Tabel C.16. Rincian Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	88
Tabel C.17. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses	89
Tabel C.18. Rincian Mutasi Bahan Baku	91
Tabel C.19. Rincian Mutasi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	92
Tabel C.20. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya	93
Tabel C.21. Perbandingan Tagihan TP/TGR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	94
Tabel C.22. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	95
Tabel C.23. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	95
Tabel C.24. Rincian Mutasi Tanah	96
Tabel C.24.1 Rincian Transaksi Saldo Awal Tanah PPKT	98
Tabel C.25. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	99
Tabel C.26. Rincian Satker Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin	100
Tabel C.27. Transaksi Perolehan Lainnya pada Satker LPSPL Serang	101
Tabel C.28. Transaksi Likuidasi Masuk pada Satker Dinas KP Prov. Kaltim	101
Tabel C.29. Transaksi Likuidasi Keluar pada Satker Dinas KP Prov. Kaltim	104
Tabel C.30. Rincian Aset Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang LPSPL Serang	104
Tabel C.31. Rincian Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan	106
Tabel C.32. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	107
Tabel C.33. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan	112
Tabel C.34. Rincian Mutasi Irigasi	113
Tabel C.35. Rincian Mutasi Jaringan	114
Tabel C.36.1 Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi	115
Tabel C.36.2 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	117
Tabel C.37. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	118
Tabel C.38. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	121
Tabel C.39. Rincian Mutasi Software	123
Tabel C.40. Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	125
Tabel C.41. Mutasi Kurang Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	126
Tabel C.42. Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	126
Tabel C.43. Mutasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	127
Tabel D.1. Rincian Pendapatan Operasional per 30 Juni 2025	135
Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025	138
Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025	139
Tabel D.4. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025	139
Tabel D.5. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025	141
Tabel D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025	142
Tabel D.7. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025	143
Tabel D.8. Rincian Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025	147
Tabel D.9. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025	150
Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas 30 Juni 2025	159
Tabel F.1. Tabel BMKT Disimpan dan dikuasai KKP	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 5 Prioritas Kebijakan KKP	14
Gambar A.2 Proses Migrasi dari Database E-Rekon menuju ke Database SAKTI	18
Gambar A.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	31
Gambar A.4 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	32
Gambar A.5 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Laut	33
Gambar A.6 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34
Gambar A.7 Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan	35
Gambar A.8 Struktur Organisasi Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.....	36
Gambar B.1 Beranda Aplikasi Seapark	48
Gambar F.1 Proyek Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa.....	182
Gambar F.2 Galeri BMKT, GMB IV, KKP	184
Gambar F.3 Kegiatan <i>Update Geotagging</i> BMKT di <i>Warehouse</i> , Cileungsi	185
Gambar F.4 Bagan Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut	193
Gambar F.5 Jenis PNBPK PKKPRL Kabel dan Pipa Bawah Laut	196

DAFTAR LAMPIRAN

A. Laporan Modul GLP SAKTI	202
I. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I Semester I TA. 2025	186
II. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Jenis Belanja / Akun	189
III. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Sumber Dana / Program / Kegiatan.....	193
IV. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Wilayah / Satuan Kerja	199
V. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program / Kegiatan	205
VI. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19	209
VII. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Eselon I	211
VIII. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Wilayah / Akun	213
IX. Neraca Tingkat Eselon I Semester I TA. 2025	216
X. Neraca Percobaan Tingkat Eselon I per 1 Januari 2025	219
XI. Neraca Percobaan Tingkat Eselon I Semester I TA. 2025.....	222
XII. Neraca Percobaan Kas	227
XIII. Laporan Operasional Tingkat Eselon I	231
XIV. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Eselon I	234
XV. Laporan BMN dan Persediaan	236
XVI. Rekapitulasi Monitoring SAKTI	260
B. Daftar Rekening per Satker Lingkup Ditjen PKRL TA. 2025	271
C. Lain-Lain	274



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 Ekst.6106, FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut juga telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juli 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

A. Koswara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 Ekst.6106, FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut juga telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juli 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

A. Koswara

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Periode Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada periode ini adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp843.308.374.261,00 atau mencapai 119,06% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp708.313.391.000,00. Realisasi Belanja Negara pada periode ini adalah sebesar Rp471.154.781.232,00 atau mencapai 68,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp684.053.244.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode Semester I Tahun 2025. Nilai Aset sampai dengan 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp857.604.229.317,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp14.064.002.058,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp576.202.572.855,00; Properti Investasi sebesar Rp110.346.287.172,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp97.664.861.367,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp59.326.505.865,00; sementara nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp774.485.777,00 dan Rp856.604.229.317,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp849.223.580.038,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp490.444.135.669,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp358.779.444.369,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.481.782.895,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp(357.297.661.474,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp837.822.061.097,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp357.297.661.474,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp17.318.355.738,00, Lain-lain senilai Rp(1.169.084.070,00), dan transaksi antar entitas senilai Rp(355.608.334.769,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp856.829.743.540,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PK dan RL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	01-Jan-25		% thd Angg	30-Jun-25
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.436.919.916.000	359.299.149.620	25,00	359.299.149.620
JUMLAH PENDAPATAN		1.436.919.916.000	359.299.149.620	25,00	359.299.149.620
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2.1	134.729.720.000	62.406.524.146	46,32	62.406.524.146
Belanja Barang	B.2.2	468.670.286.000	26.299.746.070	5,61	26.299.746.070
Belanja Bantuan Sosial	B.2.3	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasional		603.400.006.000	88.706.270.216	14,70	88.706.270.216
Belanja Modal	B.2.4				
Belanja Tanah	B.2.4.1	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.4.2	19.347.780.000	99.322.800	0,51	14.033.983.926
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.4.3	1.696.600.000	0	0,00	1.696.600.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.2.4.4	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.4.5	555.500.000	555.500.000	100,00	555.500.000
Jumlah Belanja Modal		21.599.880.000	654.822.800	3,03	16.286.083.926
JUMLAH BELANJA		624.999.886.000	89.361.093.016	14,30	104.992.354.142

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PKRL NERACA PER 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25	30-Jun-24
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	5.066.098	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1.472.051.579	1.381.065.501
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.3	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	0	0
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.6	6.531.405.912	11.239.891.322
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	C.7	(175.190.795)	(198.749.177)
Piutang dari KUN	C.8	0	0
Persediaan	C.9	28.658.347	1.641.794.412
Persediaan yang Belum Diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		7.861.991.141	14.064.002.058
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR		0	(6.250)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.11	98.155.639.556	98.155.639.556
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.12	(490.778.189)	(490.778.189)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		97.664.861.367	97.664.855.117
ASET TETAP			
Tanah	C.13	328.758.991.227	328.758.991.227
Peralatan dan Mesin	C.14	122.723.219.023	125.006.191.641
Gedung dan Bangunan	C.15	90.736.630.532	90.736.630.532
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	12.616.970.810	12.616.970.810
Aset Tetap Lainnya	C.17	129.293.869.571	129.357.185.571
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(114.990.543.618)	(110.273.396.926)
Aset Tetap yang Belum Diregister		0	0
Jumlah Aset Tetap		569.139.137.545	576.202.572.855
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.20	103.876.004.000	103.876.004.000
Aset Tak Berwujud	C.21	1.115.000.534	1.194.618.534
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	0	0
Aset Lain-Lain	C.23	12.498.783.982	13.782.435.459
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(61.430.985.274)	(59.526.552.128)
Jumlah Aset Lainnya		56.058.803.242	59.326.505.865
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.25	110.346.287.172	110.346.287.172
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.26	0	0
Jumlah Properti Investasi		110.346.287.172	110.346.287.172
JUMLAH ASET		841.071.080.467	857.604.223.067
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	5.885.312.938	774.372.777
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.28	120.563.621	0
Hibah Yang Belum Disahkan	C.29	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.30	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.31	5.066.098.382	
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.32		113.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.071.974.941	774.485.777
JUMLAH KEWAJIBAN		11.071.974.941	774.485.777
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	835.060.137.810	856.829.737.290
JUMLAH EKUITAS		835.060.137.810	856.829.737.290
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		841.071.080.467	857.604.223.067

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PKRL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25	30-Jun-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	354.217.556.008	286.043.353.798
JUMLAH PENDAPATAN		354.217.556.008	286.043.353.798
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	66.220.716.591	61.697.004.670
Beban Persediaan	D.3	1.472.772.033	294.094.994
Beban Barang dan Jasa	D.4	21.653.597.142	53.086.719.416
Beban Pemeliharaan	D.5	1.602.002.364	2.020.964.404,
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.418.005.850	47.572.752.387
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.267.115.644	1.538.416.647
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	9.613.700.274	10.231.881.262
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(29.810.528)	(6.924.559)
Beban Lain-Lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		107.218.099.370	176.434.909.221
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		246.999.456.638	109.608.444.577
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(764.576.765)	(6.695.480.920)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		146.530.694	(1.395.734.524)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		911.107.459	(8.091.215.444)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		584.819.394	489.061.708
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		584.819.394	(341.875.708)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	147.186.000
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(179.757.371)	(6.206.419.212)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		246.819.699.267	103.402.025.365
POS LUAR BIASA	D.13		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		246.819.699.267	103.402.025.365

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PKRL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	2023
EKUITAS AWAL	E.1	837.822.061.097	847.116.239.121
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	357.297.661.474	295.137.705.143
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	17.318.355.738	2.423.893.389
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	(7.865.132)	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	18.495.304.940	2.407.214.188
LAIN-LAIN	E.3.6	(1.169.084.070)	16.679.201
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(355.608.334.769)	(306.855.776.556)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		19.007.682.443	(9.294.178.024)
EKUITAS AKHIR	E.5	856.829.743.540	837.822.061.097

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal PKRL

A.1.1. Profil

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Ditjen
PKRL*

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomenklatur berubah dari yang sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya

- ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk jumlah pegawai Ditjen PKRL s.d Desember tahun 2024 berdasarkan aplikasi e-pegawai yaitu berjumlah 1.070 orang pegawai (713 orang laki-laki; 357 orang perempuan). Rincian pegawai pusat terdiri dari 315 orang ASN (196 orang laki-laki; 119 orang perempuan), 25 orang PPPK (18 orang laki-laki; 7 orang perempuan), 1 orang JPT Non ASN (1 orang laki-laki), 42 orang Kontrak (23 orang laki-laki; 19 orang perempuan), dan 94 *Outsource* (58 orang laki-laki; 36 orang perempuan).

Sementara itu rincian pegawai UPT terdiri dari 363 orang ASN (236 orang laki-laki; 127 orang perempuan), 23 orang PPPK (12 orang laki-laki; 11 orang perempuan), 0 orang JPT Non ASN, 48 orang Kontrak (36 orang laki-laki; 12 orang perempuan), dan 159 *Outsource* (133 orang laki-laki; 26 orang perempuan).

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen PKRL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- b. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- d. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Ditjen PKRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PKRL.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen PKRL dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis Ditjen PKRL dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan Perikanan mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 - 2024, khususnya di sub sektor pengelolaan ruang laut.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Ditjen PKRL dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL;
- b. Direktorat Penataan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat penggabungan empat Direktorat yang sebelumnya masing-masing memiliki 1 DIPA tersendiri kemudian dilebur menjadi satu DIPA, yaitu pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL. Dalam rangka penggabungan satker pusat dalam lokasi yang sama sesuai kebijakan satu DIPA, beberapa hal menyangkut 1 DIPA, antara lain :

- a. Penggabungan DIPA dimaksud tidak disertai dengan peleburan identitas satker yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian tidak terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- b. Penetapan kode dan nomenklatur satker yang akan digunakan;
- c. Penetapan struktur pengelola anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan BPP); dan
- d. Penggabungan data keuangan, Aset Tetap, dan Aset Lancar

Untuk aset yang masih terdapat pada masing-masing Direktorat, telah ditransfer pada Semester I tahun 2021 menuju satker Sekretariat Ditjen PKRL. Sementara itu, untuk penatausahaan aset selanjutnya telah dibuatkan anak satker atau satker pembantu pada kode satker 622145 yaitu 622145.001 untuk Direktorat PRL, 622145.002 untuk Direktorat P4K, 622145.003 untuk Direktorat Jasa Kelautan, dan 622145.004 untuk Direktorat KEBP.

A.1.2. Rencana Strategis

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Ditjen PKRL merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Renstra Ditjen PKRL menjadi pedoman penyusunan Renja Direktorat Jenderal PKRL setiap tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKRL, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Periode kurun waktu 2015 - 2019 sebelumnya, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Ditjen PKRL, baik

secara kelembagaan maupun program dan kegiatan di lapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang ada, Ditjen PKRL berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut.

Secara garis besar, target IKU Ditjen PKRL telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha). IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian targetnya lebih cenderung dipengaruhi karena faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi kondisi alam.

A.1.3. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020 - 2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 - 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020 - 2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
- b. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui

“Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;

- c. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
- d. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PKRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu :

- 1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- 2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- 3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan pengelolaan ruang laut adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- e. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020 - 2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari :

- SP-1 Kesejahteraan petambak garam meningkat
- SP-2 Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SP-3 Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan kawasan
- SP-4 Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat
- SP-5 Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT
- SP-6 Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
- SP-7 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat

- SP-8 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
- SP-9 Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
- SP-10 Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali
- SP-11 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat
- SP-12 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL



Gambar A.1. 5 Prioritas Kebijakan KKP

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahunan TA. 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PKRL. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PKRL Periode Tahunan TA. 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal PKRL yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.2.1. Aplikasi SAKTI

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI menggunakan *database* terpusat, *multi user* dan/ atau multi satker. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kewenangannya. Terhadap pengiriman data antar modul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik.

SAKTI terdiri atas : a) Modul Administrasi; b) Modul Penganggaran; c) Modul Komitmen; d) Modul Bendahara; e) Modul Pembayaran; f) Modul Persediaan; g) Modul Aset Tetap; h) Modul Piutang; dan i) Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi : a) periode Januari sampai dengan Desember; b.) periode 13; dan c) periode 14. Periode Januari sampai dengan Desember digunakan untuk transaksi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* dengan tanggal buku sesuai dengan transaksi dimaksud. Periode 13 dan periode 14 digunakan untuk transaksi Laporan Keuangan *Audited* dengan tanggal buku 31 Desember.

Tutup buku transaksi pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Dalam hal terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku, terhadap transaksi dimaksud dicatat pada periode berikutnya.

Pengguna operasional modul terdiri atas : a) *operator*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI; b) *validator*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian/penelitian atas perekaman data yang dilakukan operator; dan/ atau c) *approver*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh operator dan/ atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh validator. Kewenangan Pengguna operasional modul tidak dapat dilakukan perangkapan dalam modul yang sama.

Modul-modul yang utamanya digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan diantaranya :

1. Modul Komitmen

Modul Komitmen digunakan untuk : a) pengelolaan data supplier, b) pengelolaan data kontrak; c) pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual; d) pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual; dan e) pengelolaan data capaian output.

2. Modul Persediaan

Pengguna Modul Persediaan terdiri atas operator dan *approver*. Modul Persediaan digunakan antara lain untuk kegiatan : a) perekaman referensi barang persediaan; b) perekaman transaksi persediaan; c) tutup buku persediaan; d) pencetakan laporan persediaan; e) konfigurasi metode pencatatan; dan f) konfigurasi metode penilaian. Modul persediaan menghasilkan laporan antara lain : a) buku persediaan; b) laporan persediaan; dan c) laporan posisi persediaan di neraca.

3. Modul Aset Tetap

Pengguna Modul Aset Tetap terdiri atas : a) operator; b) *validator*, dan c) *approver*. Modul Aset Tetap digunakan antara lain untuk pemrosesan transaksi : a) perekaman transaksi BMN; b) perhitungan penyusutan/ amortisasi; c) pembuatan data *summary* untuk keperluan pelaporan aset tetap; d) tutup buku aset tetap; dan e) pencetakan buku/daftar dan laporan BMN.

Modul Aset Tetap menghasilkan Laporan antara lain sebagai berikut : a) buku/daftar berupa buku barang, daftar transaksi BMN, *history* BMN, kartu konstruksi dalam pengerjaan, daftar barang rusak berat/hapus yang diusulkan ke pengelola; dan b) Laporan BMN berupa laporan barang, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BMN di neraca, dan catatan ringkas BMN.

4. Modul Piutang

Modul Piutang digunakan antara lain untuk : a) perekaman referensi debitur; b) perekaman transaksi piutang; c) perekaman *settlement* pembayaran/pelunasan piutang; d) perekaman surat penagihan; e) perekaman dokumen reklasifikasi kualitas piutang; f) perhitungan penyisihan piutang; g) transfer keluar-transfer masuk data piutang; h) perekaman hapus buku/hapus tagih; i) perekaman koreksi piutang; j) tutup buku piutang; dan k) pencetakan laporan piutang.

5. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul Akuntansi dan Pelaporan menghasilkan laporan antara lain sebagai berikut : a) Laporan Buku Besar; b) Neraca Percobaan; c) Laporan Operasional; d) Neraca; e) Laporan Realisasi Anggaran; f)

Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan *Sub Ledger*.

Konsolidasi Laporan Keuangan dilakukan oleh konsolidator pada tingkat : a) UAPPA-W; b) UAPPA-EI; dan c) UAPA. Konsolidator Laporan Keuangan melakukan pencetakan Laporan Keuangan konsolidasian sesuai dengan tingkat konsolidasiannya. Konsolidator Laporan Keuangan dapat melakukan pencetakan Laporan Keuangan tingkat di bawahnya.

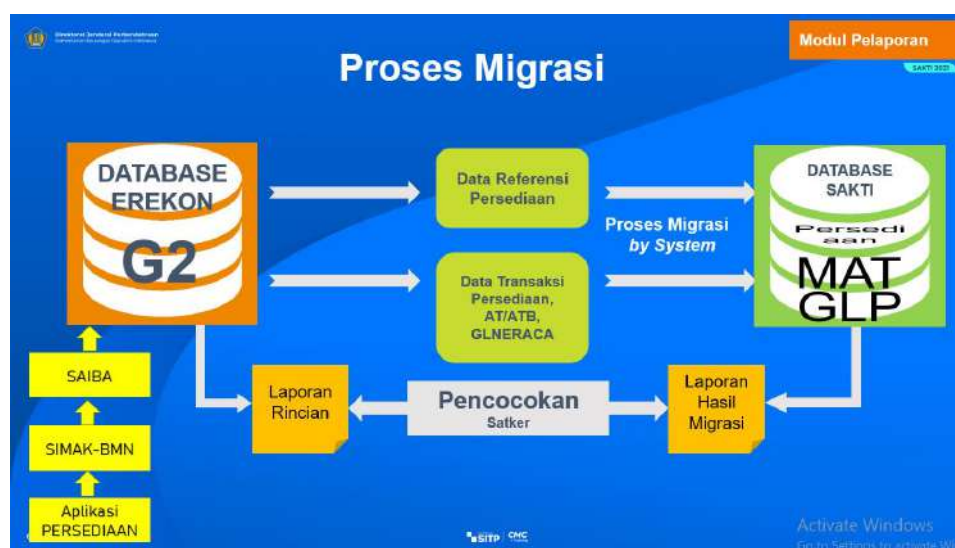
Migrasi Data Saldo Awal SAKTI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penerapan SAKTI seluruh modul termasuk Kelompok Modul Pelaporan dimulai pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Implementasi SAKTI pada Kelompok Modul Pelaporan diawali dengan proses migrasi data saldo awal. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan pada saat penggunaan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk pertama kali. Migrasi data saldo awal meliputi : a) migrasi data persediaan; b) migrasi data aset tetap; dan c) migrasi data buku besar neraca. Hasil pelaksanaan migrasi data dituangkan dalam berita acara migrasi data.

Terkait dengan pelaksanaan proses migrasi data saldo awal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan sebelum Kelompok Modul Pelaporan khususnya Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) untuk pertama kali;
2. Satker wajib memastikan konfigurasi Satker dan user Kelompok Modul Pelaporan sudah terdaftar sebelum pelaksanaan proses migrasi data saldo awal;
3. Migrasi data saldo awal wajib dilakukan oleh Satker yang memiliki data referensi dan saldo per tanggal 31 Desember 2021;
4. Proses migrasi data dilakukan dengan cara interkoneksi untuk menarik data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan TA. 2021 pada Aplikasi e-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI;
5. Satker menggunakan Aplikasi MONSAKTI untuk memantau penyelesaian migrasi data saldo awal;
6. Satker wajib melakukan verifikasi data hasil migrasi data saldo awal dan

- memastikan laporan-laporan SAKTI hasil migrasi sudah sama dengan laporan-laporan yang dihasilkan Aplikasi e-Rekon&LK;
7. Satker menuangkan hasil verifikasi dan penyandingan antara laporan-laporan SAKTI hasil migrasi data saldo awal dengan laporan-laporan dari Aplikasi e-Rekon&LK pada Berita Acara Migrasi;
 8. Satker menggunakan Aplikasi MONSAKTI untuk melakukan proses unggah berkas Berita Acara Migrasi;
 9. Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut) sebagai unit konsolidasi laporan keuangan melakukan pemantauan penyelesaian migrasi data saldo awal SAKTI dan memastikan kelengkapan berita acara migrasi Satker sudah diunggah di Aplikasi MONSAKTI.



Gambar A.2. Proses Migrasi dari Database E-Rekon menuju ke Database SAKTI

A.2.2. Satker Lingkup Ditjen PKRL

Jumlah entitas akuntansi dilingkup Direktorat Jenderal PKRL yang mendapatkan DIPA pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah 43 entitas. Rincian entitas tersebut berdasarkan jenis kewenangan tersaji sebagai berikut :

Tabel A.1. Rekapitulasi Satker Lingkup Ditjen PKRL

No.	Kode	Baru	NAMA UNIT/SATKER
			Kantor Pusat (KP)
1	622145		Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
			Kantor Daerah (UPT)
1	499346		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang
2	477456		Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru
3	477425		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak
4	477431		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar
5	477419		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar

6	499352		Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang
7	290145		Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSP) Serang
8	477440		Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSP) Sorong
			Tugas Pembantuan (TP)
1	603201	691046	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. DKI Jakarta
2	029092	691047	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Barat
3	039019	691048	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
4	049035	691049	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DI Yogyakarta
5	059034	691050	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur
6	069024	691051	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Aceh
7	079035	691052	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara
8	089006	691053	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat
9	099041	691054	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau
10	109037	691055	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi
11	119040	691056	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan
12	129036	691057	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
13	139027	691058	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat
14	149032	691059	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Tengah
15	159039	691060	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Selatan
16	169036	691061	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Timur
17	179057	691062	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara
18	189038	691063	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
19	199037	691064	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan
20	209035	691065	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara
21	219032	691066	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku
22	229057	691067	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
23	239069	691068	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Barat
24	249088	691069	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Timur
25	259040	691070	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua
26	269035	691071	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu
27	289031	691072	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara
28	299038	691073	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Banten
29	309041	691074	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bangka Belitung
30	319035	691075	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo
31	329013	691076	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau
32	339154	691077	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat
33	340066	691078	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat
34	417744	691079	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 bahwa Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun

2024 bahwa untuk TA. 2024 terdapat 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Ditjen PKRL.

Selain itu, sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor S-174/AG/AG.3/2024 tanggal 13 Februari 2024 Hal Penyampaian Kode Satker Tugas Pembantuan Lingkup KKP bahwa seluruh satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lingkup Ditjen PKRL terjadi perubahan kode satker.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal PKRL menerapkan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dilakukan mulai Tahun 2015.

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna *atau full disclosure*. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal PKRL dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PKRL, selaku entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PKRL adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

dilaksanakan

- b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
- c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1. Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

5.2. Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

5.3. Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

5.4. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- d. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- e. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- f. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Tabel A.3. Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

- akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berkas Akrua
Pertama Kali

A.6. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Pelaksanaan
Program
Penanganan
Pandemi Covid-
19 dan PEN
serta Dampak
Pandemi Covid-
19

A.7. Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 serta Dampak Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas

sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga maupun oleh satuan kerja lingkup Bendahara Umum Negara. Program PC-PEN sudah dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sementara itu untuk TA. 2024 sudah tidak ada anggaran PEN dan Covid-19.

Program
Prioritas
Nasional (PN)

A.8. Program Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan kegiatan dibagi atas berikut :

1. **Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Kerja Sama, Kemitraan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Bantuan Kelompok Masyarakat, Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, Konservasi Jenis/Spesies, Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
2. **Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Bantuan Peralatan/Sarana, dan Sarana Pengembangan Kawasan;
3. **Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan Klasifikasi Rincian Output : Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Bantuan Peralatan/Sarana, dan Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan;
4. **Perencanaan Ruang Laut** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan, Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
5. **Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan Klasifikasi Rincian Output : Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Bantuan

Peralatan/Sarana, Prasarana Bidang Pencarian Pertolongan dan Penanganan Bencana, Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan, dan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Ditjen PKRL telah melakukan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan sehingga diperlukan pergeseran akun, serta adanya himbauan pemerintah terkait dengan berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga adanya *refocusing* anggaran terkait dengan *automatic adjustment*. Perubahan pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel B.1.

Tabel B.1. Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2025 berdasarkan Jenis Belanja MonSAKTI

Uraian	2025		Naik/ Turun (%)
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	
Belanja			
Belanja Pegawai	134.729.720.000	134.729.720.000	0,00
Belanja Barang	468.099.569.000	468.670.286.000	0,12
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	20.763.997.000	20.193.280.000	-2,83
Jumlah Belanja	623.593.286.000	623.593.286.000	-

Revisi anggaran secara umum tidak mengalami perubahan dari pagu awal senilai Rp623.593.286.000,00 menjadi pagu revisi senilai Rp623.593.286.000,00. Perubahan terdapat di belanja Barang mengalami kenaikan pagu menjadi Rp468.099.569.000,00 yang sebelumnya Rp. 468.670.286.000,00 atau sebesar 0,12%. Belanja modal mengalami penurunan yang tidak signifikan dari sebelumnya Rp20.763.997.000.000,00 menjadi Rp20,193,280,000,00 atau sebesar 2,83%. Sementara untuk belanja Pegawai tidak mengalami perubahan.

Untuk pagu belanja pegawai lingkup Ditjen PKRL terdapat pada 1 satker pusat dan 8 satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp70.520.735.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja pegawai terbesar terdapat pada satker BPSPL Padang sebesar Rp9.466.000.000,00.

Untuk pagu belanja barang terdapat pada seluruh satker aktif lingkup Ditjen PKRL dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp313.790.487.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja barang terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang sebesar Rp37.691.367.000,00. Untuk lingkup satker Tugas Pembantuan pagu belanja barang terbesar terdapat pada satker Dinas KP Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00.

Untuk pagu belanja modal lingkup Ditjen PKRL terdapat pada 1 satker pusat dan 7 satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp10.722.383.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja modal terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang sebesar Rp 8.055.080.000,00.

Selain adanya revisi pagu, juga ada pagu blokir pada pagu revisi terkait Efisiensi Anggaran dan *automatic adjustment*. Hal ini merupakan implementasi kebijakan APBN Tahun 2025 dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan *automatic adjustment* pada semua K/L.

Pelaksanaan penambahan *automatic adjustment* melalui mekanisme revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Alokasi anggaran yang telah dicantumkan pada halaman IV DIPA dalam rangka *automatic adjustment*, akan dilakukan evaluasi sampai dengan kondisi perekonomian membaik.

Sampai dengan bulan Juni sebagian dari pagu blokir dikurangkan dari pagu anggaran satker dan terdapat penambahan pagu di satker pusat dan UPT dari pagu dengan pembiayaan PNB, dimana pagu Eselon I DJPKRL dari Rupiah Murni sebesar Rp236.869.794.000,00, pagu dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp250.000.000.000,00, pagu dari PNB sebesar Rp100.979.492.000,00, dan pagu dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp33.744.000,00.

Terdapat Revisi DIPA/POK selama satu tahun anggaran yang berhubungan dengan pemotongan anggaran/*refocusing* di awal tahun yaitu pembukaan blokir kegiatan, penambahan belanja pegawai (gaji), adanya penambahan kegiatan Prioritas Nasional (PN) (sarpras, pengadaan dan penanaman bibit mangrove, dll), perpindahan/pergeseran antara akun belanja sampai dengan revisi bulan Juni dimana hampir seluruh satker terkena dampak blokir anggaran.

Sedangkan apabila dilihat pagu berdasarkan kegiatan, tidak terjadi perubahan penurunan dari pagu awal Rincian anggaran Ditjen PKRL menurut jenis kegiatan disajikan pada Tabel B.2.

Tabel B.2. Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2025 berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	2025		Naik/ Turun (%)
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	
01 RUPIAH MURNI			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	0	0	#DIV/0!
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	8.921.225.000	8.921.225.000	-
Perencanaan Ruang Laut (2366)	11.100.000.000	11.100.000.000	-
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL (2367)	206.062.739.000	206.062.739.000	-
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4346)	2.785.830.000	2.785.830.000	-
04 PNBP			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	23.689.288.000	23.689.288.000	-
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	28.289.491.000	28.289.491.000	-
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	15.460.713.000	15.460.713.000	-
Perencanaan Ruang Laut (2366)	33.540.000.000	33.540.000.000	-
02 PINJAMAN LUAR NEGERI			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	250.000.000.000	250.000.000.000	-
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	-
09 HIBAH LUAR NEGERI			
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	33.744.000.000	33.744.000.000	
11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI			
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	0	0	-
03 RUPIAH MURNI PENDAMPING			
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	
Total Belanja	623.593.286.000	623.593.286.000	-

Realisasi Pendapatan
Rp290.118.767.216

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 361.774.972.720,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau 25,18% dari estimasi atau target pendapatan sebesar Rp1.436.919.916.000,00. Terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp0,00 sehingga realisasi pendapatan menjadi Rp359.299.149.620,00 atau 25,00% Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya disajikan pada Tabel B.3.

Tabel B.3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan MonSAKTI

Uraian	30-Jun-25		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Perikanan (4215)	427.125.000.000	-	0,00%
Pendapatan Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251)	2.559.257.000	169.968.475	6,64%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	994.512.318.000	349.861.932.146	35,18%
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	12.723.341.000	8.736.406.605	68,66%
Pendapatan Denda (4258)	-	40.370.000	100,00%
Pendapatan Lain-Lain (4259)	-	490.472.394	100,00%
	1.436.919.916.000	359.299.149.620,	25,00%

Rincian pendapatan per satker menurut MonSAKTI disajikan dalam lampiran AV dan AVI. Pendapatan Perikanan (4215) masih belum ada realisasi. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251) dengan total Rp169.968.475,00 dari estimasi Rp2.559.257.000,00 sehingga realisasi sebesar 6,64%. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp223.153.365,00 yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PRL dan tiga satker UPT yaitu LKKPN Pekanbaru, BKKPN Kupang dan BPSPL Makassar. Nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp128.357.000,00. Selain itu Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp20.665.077,00 antara lain PKPB Dit. P4K berupa Kendaraan dan Alsin sebesar Rp5.019.000,00 dan 4 unit sepeda motor sebesar Rp13.128.000,00; Setditjen PKRL berupa Kendaraan dan Alsin sebesar Rp261.000,00; PKPB BAPPEDA Provinsi Riau berupa Alsin sebesar Rp1.017.077,00; dan PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.240.000,00.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) senilai total Rp21.337.663,00. Pendapatan sewa terdapat pada dua satker UPT yaitu LPSPL Serang dan LPSPL Sorong berupa pendapatan sewa rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya. Nilai terbesar terdapat pada satker LPSPL Serang senilai Rp4.052.268,00 berupa pendapatan sewa mess pegawai.

Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan (425134) yang merupakan KSP di P. Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada aset tanah yang dimiliki satker Setditjen PKRL belum ada realisasi. Penjelasan terkait dengan KSP P. Nipa terdapat pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252) berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya (425259). Sejak tanggal 18 September 2021 pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk menjadi acuan KKP dalam mengelola PNPB di bidang kelautan dan perikanan. Aturan ini menggantikan PP

Nomor 75 Tahun 2015 dan juga sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak. PP tersebut mengatur 18 jenis PNPB pada sektor kelautan dan perikanan yang salah satunya terkait tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, selain pada satker pusat Setditjen PRL terdapat enam satker UPT pengelola jenis ikan yang memiliki mandat untuk melakukan penarikan PNBP pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI-DN/LN) dan Rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi. Enam satker tersebut yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Total Pendapatan Perizinan Lainnya senilai Rp352.336.042.146,00 dengan pengembalian Rp2.474.110.000,00 sehingga pendapatan perizinan menjadi Rp349.861.932.146,00. Dengan estimasi Pendapatan senilai Rp994.512.318.000,00 maka persentase realisasi total sebesar 35,18%. Nilai Pendapatan Perizinan Lainnya terbesar pada satker pusat Setditjen PKRL yaitu Rp347.526.565.000,00.

Pendapatan Perizinan Lainnya berasal dari : 1) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut berupa : a. Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, b. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri (SAJI-DN), c. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Luar Negeri (SAJI-LN), d. Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri, e. Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, f. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), g. Pelaksanaan Reklamasi, h. Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan, i. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km², j. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing; 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berupa : a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang

Menetap di Laut, b. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut, c. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut.

Selain itu terdapat selisih rekonsiliasi eksternal SAKTI - SPAN dikarenakan adanya setoran yang tidak diakui dan diinput pada SAKTI senilai Rp2.316.320.000,00. Angka tersebut merupakan Pendapatan Bukan Pajak, atas akun pendapatan perizinan lainnya (425259) pada satker Inaktif Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (kode satker 329013 - Dekonsentrasi). Atas hal tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah bersurat kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sesuai surat Nomor B.392/DJPKRL/KU.330/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang menyampaikan bahwa pendapatan perizinan lainnya untuk kegiatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau tidak memiliki kewenangan untuk memungut pendapatan tersebut dan dasar penerbitan pemungutan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : S-7/PB/PB.2/2024 tanggal 23 April 2024 Hal Tanggapan atas Penggunaan Akun Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (329013), menyampaikan agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai unit yang mengelola aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI). Untuk menghilangkan selisih tersebut akan dilakukan pemindahan kode satker dari yang sebelumnya 329013 menjadi 622145 Sekretariat Ditjen PKRL pada periode Triwulan III Tahun 2024 untuk selanjutnya dilakukan koordinasi kembali.

Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) senilai total Rp8.738.119.705,00 dengan pengembalian Rp1.713.100,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya menjadi Rp8.736.406.605,00 berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) yang merupakan mandat baru dari PP 85 Tahun 2021 bersumber dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi

Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKPN) yaitu LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang bersumber dari karcis masuk dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya berupa Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan. Total Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya senilai Rp8.738.119.705,00 dengan pengembalian Rp1.713.100,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya menjadi Rp8.736.406.605,00. Dengan estimasi Pendapatan senilai Rp12.723.341.000 maka persentase realisasi total sebesar 68,66%.

Gambar B.1. Beranda Aplikasi e-SAJI

Nilai Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya terbesar pada satker pusat Sekretariat Ditjen PKRL yaitu Rp4.398.886.602,00 berupa Pungutan Penangkapan Jenis Ikan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan sementara pada lingkup UPT yang terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang senilai Rp1.573.575.000,00.

Pendapatan Denda (4258) senilai Rp40.370.000,00 terdapat pada satu akun yaitu Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai total Rp40.370.000,00 yang hanya terdapat pada satu satker yaitu Setditjen PKRL yang merupakan setoran denda keterlambatan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Saluran/Jalan Produksi Tahun 2023 oleh CV. Aliah Consulindo pada Satker Dinas KP Kab. Jeneponto sebesar Rp31.360,00 dan denda keterlambatan atas pemenuhan dokumen perencanaan sebesar Rp294.000,00.

Pendapatan Lain-Lain (4259) senilai 490.472.394,00 terdiri dari : (1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) terdapat pada lima satker yaitu LPSPL Serang sebesar Rp8.581.500,00 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 a.n.Yuli Deviyani Riadi, BPSPL Denpasar sebesar Rp955.243,00 dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS, PPPK dan pembayaran uang makan tahun anggaran 2023, BPSPL Makassar sebesar Rp21.199.200,00 yaitu penerimaan pengembalian gaji pegawai dua orang PNS yakni A. Muhammad Ishak Yusma dikarenakan adanya perubahan data pegawai telah diuji kebenarannya dan sesuai dengan dokumen yang sah. Selanjutnya dokumen

pendukung tersebut disimpan sebagai pertinggal pada PPSPM. Berdasarkan perubahan data pegawai tersebut, pembayaran gaji menjadi sebesar Rp14.094.600,00 dan Moh. Yasir dikarenakan adanya kelebihan gaji dan tunjangan pada saat melakukan tugas belajar dalam negeri pada Tahun 2022 senilai Rp679.200,00 dan Tahun 2023 senilai Rp6.480.000,00, LKKPN Pekanbaru sebesar Rp119.245,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja 9 orang pegawai LKKPN Pekanbaru, dan Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp14.515.600,00 merupakan pengembalian atas temuan BPK RI berupa kelebihan pembayaran Gaji Pegawai tugas belajar Tahun 2023 sehingga total Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp45.370.788,00.

(2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) terdapat pada 7 satker dengan rincian 1 satker pusat yaitu Setditjen PKRL sebesar Rp256.480.559,00, 6 satker UPT yaitu BPSPL Denpasar sebesar Rp1.000.790,00, BPSPL Pontianak sebesar Rp11.674.100,00, BPSPL Makassar sebesar Rp300.000,00, LPSPL Sorong sebesar Rp28.004.797,00, LKKPN Pekanbaru sebesar Rp2.568.833,00, dan BPSPL Padang sebesar Rp425.500,00 sehingga penerimaan kembali belanja barang TAYL senilai total Rp300.454.579,00. Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan karena pengembalian atas kelebihan pembayaran honor enumerator senilai Rp1.000.000,00, pembayaran belanja pemeliharaan senilai Rp400,00 dan kelebihan pembayaran belanja barang operasional senilai Rp390,00 pada Tahun Anggaran 2023 pada BPSPL Denpasar. Selain itu pendapatan tersebut dari setoran mandiri atas tindak lanjut temuan audit inspektorat jenderal berupa temuan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, konsumsi rapat, penggandaan laporan dan langganan Listrik mess pada BPSPL Pontianak. Pengembalian kelebihan pembayaran biaya pencetakan bahan sosialisasi pada BPSPL Makassar. Selain itu pada LPSPL Sorong terdiri dari : a) Pengembalian terhadap *base camp* tenaga kerja konstruksi rehab kantor senilai Rp2.500.000,00 yang tertuang Surat Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari Perihal : Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023, b) Pengembalian terhadap Kelebihan pembayaran jamuan tamu tahun 2023 senilai Rp718.080,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari Perihal : Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023, c) Pengembalian terhadap realisasi belanja pemeliharaan pada LPSPL Sorong yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban senilai

Rp13.976.717,00 d) Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan senilai Rp10.810.000,00. LKKPN Pekanbaru memiliki rincian senilai Rp189,57 sesuai LHP Kinerja TA. 2022 s.d 2023 Nomor : T.127/ITJ/HP.110/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yakni pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan jalan dan komplek kantor/*paving block* a.n. CV. Rihandi Kartika Perkasa senilai Rp713.180,00 dan pengembalian belanja berupa kekurangan setor pajak kegiatan pembuatan dan pemasangan papan informasi P. Pieh dan P. Anambas, pemeliharaan pagar kantor dan gerbang gapura kantor senilai Rp1.855.653,00. Sedangkan pada BPSPL Padang berupa penerimaan TGR Rehab dan Perbaikan Dak Teras Kantor BPSPL Padang.

(3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) hanya pada satker BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 berupa temuan ltjen atas kelebihan pembayaran pembangunan Mushalla.

Selain itu, secara umum terdapat kenaikan pada akun Pendapatan dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu sebesar 30,36%. Peningkatan secara drastis terdapat pada Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) sebesar 34,57% berasal dari penerimaan fungsional antara lain Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi, Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan serta peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252) sebesar 31,2% berupa Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) dikarenakan pada tahun ini terdapat Penerimaan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut yaitu Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Pelaksanaan Reklamasi, dan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.

Tabel perbandingan realisasi pendapatan TA. 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel B.4.

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA. 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Pendapatan Perikanan (4215)	0	0	0,00
Pendapatan Dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251)	169.968.475	1.434.842.692	11,85
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252)	349.861.932.146	278.396.074.239	125,67
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	8.736.406.605	9.938.490.017	87,90
Pendapatan Denda (4258)	40.370.000	325.360	12.407,79
Pendapatan Lain-Lain (4259)	490.472.394	349.034.908	140,52
Jumlah	359.299.149.620	290.118.767.216	123,85

Secara umum realisasi pendapatan sudah mencapai sebesar 25,00%, dimana estimasi pendapatan senilai Rp1.436.919.916,00 dengan realisasi pendapatan Rp359.299.149.620,00. Atas target dan realisasi Pendapatan negara Bukan Pajak per satker lingkup Ditjen PKRL per tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.5.

Tabel B.5. Target dan Realisasi PNPB Satker Lingkup Ditjen PKRL per 30 Juni 2025

No	Satker	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	LPSPL Serang	1.700.000.000	1.207.815.675	71,05
2	BPSPL Denpasar	1.200.000.000	1.262.589.178	105,22
3	BPSPL Pontianak	1.800.000.000	1.096.757.329	60,93
4	BPSPL Makasar	543.000.000	315.645.599	58,13
5	LPSPL Sorong	1.500.536.000	581.659.874	38,76
6	BPSPL Padang	710.060.000	377.328.939	53,14
7	BKKPN Kupang	1.750.000.000	1.585.874.901	90,62
8	LKKPN Pekanbaru	29.890.000	101.019.727	337,97
9	Setditjen PKRL	1.427.686.430.000	352.770.458.398	24,71
	Jumlah	1.436.919.916.000	359.299.149.620	25,00

Realisasi Belanja
Rp88.805.593.016

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp88.997.254.792,00 atau 14,27% dari anggaran belanja sebesar Rp623.593.286.000,00. Dengan pengembalian sebesar Rp191.661.776,00 realisasi belanja menjadi sebesar Rp88.805.593.016,00 atau 14,24%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA. 2025 disajikan pada Tabel B.6.

Tabel B.6. Rincian Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	TA. 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	134.729.720.000	62.525.768.968	46,41
Belanja Barang	468.670.286.000	26.372.163.024	5,63
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	20.193.280.000	99.322.800	0,49
Total Belanja Kotor	623.593.286.000	88.997.254.792	14,27
Pengembalian		(191.661.776)	0,00
Jumlah	623.593.286.000	88.805.593.016	14,24

Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 238.869.794.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 88,364,235,848,00 atau 36,99% ditambah dengan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp250.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp323.458.927,00, serta anggaran tambahan PNBPN sebesar Rp100.979.492,00 dengan realisasi masih Rp0,00 dan anggaran hibah luar negeri sebesar Rp33.744.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp117.898.241,00 atau 0,35%, sehingga realisasi total per 30 Juni 2025 sebesar Rp88.805.593.016,00 atau 14,24%.

Anggaran Rupiah Murni terdapat pada enam kegiatan dimana realisasi yang terbesar yaitu pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PKRL (2367) sebesar Rp238.869.794.000,00. Anggaran Pinjaman Luar Negeri terdapat pada satu kegiatan yaitu kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp250.000.000.000,00. Anggaran PNBPN terdapat pada empat kegiatan yang semuanya belum realisasi. Anggaran Hibah Luar Negeri terdapat pada satu kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp33.744.000.000,00. Rincian realisasi belanja berdasarkan program kegiatan disajikan pada Tabel B.7.

Tabel B.7. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kegiatan

02 PINJAMAN LUAR NEGERI	250.000.000.000	323.458.927	0,13
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	250.000.000.000	323.458.927	0,13
04 PNBP	100.979.492.000	0	0,00
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	23.689.288.000	0	0,00
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	28.289.491.000	0	0,00
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	15.460.713.000	0	0,00
Perencanaan Ruang Laut (2366)	33.540.000.000	0	0,00
09 HIBAH LUAR NEGERI	33.744.000.000	117.898.241	0,35
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2363)	33.744.000.000	117.898.241	0,00
Total Belanja	623.593.286.000	88.805.593.016	14,24

Selain itu, secara umum terdapat penurunan yang cukup signifikan pada realisasi belanja dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu sebesar 68,98%. Penurunan yang sangat drastis terdapat pada Belanja Modal sebesar 4.374,28% dikarenakan pada tahun ini terdapat efisiensi anggaran termasuk didalamnya belanja Modal pada sembilan satker diantaranya satu satker pusat Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan delapan satker UPT antara lain LPSPL Sorong, LPSPL Serang, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Padang dan BKKPN Kupang, serta Belanja Barang dengan penurunan sebesar 232,67%. Sementara itu untuk Belanja Pegawai juga terdapat kenaikan sebesar 6,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian perbandingan realisasi belanja disajikan pada Tabel B.8.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA. 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	62.406.524.146	58.128.214.920	6,86
Belanja Barang	26.299.746.070	87.491.245.269	-232,67
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	99.322.800	4.443.976.653	-4.374,28
Jumlah	88.805.593.016	150.063.436.842	-68,98

Belanja Pegawai
Rp624.06.524.146

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Untuk jumlah pegawai Ditjen PKRL s.d Juni tahun 2025 berdasarkan aplikasi e-pegawai yaitu berjumlah 736 orang pegawai (460 orang laki-laki, 276 orang perempuan) yang terdiri dari kantor pusat sejumlah 324 PNS (200 orang laki-laki, 124 orang perempuan) dan 25 berstatus PPPK (18 orang laki-laki, 7 orang perempuan) serta kantor UPT berjumlah 360 PNS (226 orang laki-laki, 134 orang perempuan) dan 27 berstatus PPPK (16 orang laki-laki, 11 orang perempuan).

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp134.729.720.000,00 tanpa adanya revisi sehingga tidak terjadi perubahan dibandingkan anggaran awal. Untuk realisasi belanja pegawai *bruto* per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp62.525.768.968,00 atau 46,41%. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp119.244.822,00 sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp62.406.524.146,00 atau 46,32%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.9.

Anggaran dan realisasi terbesar yaitu pada Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus /Kegiatan) akun 512411 yaitu dengan anggaran Rp76.519.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.820.578.360,00 atau 40,28% dengan pengembalian Rp195.307,00 yang terdapat pada sembilan satker yaitu satu satker pusat dan delapan satker UPT. Realisasi terbesar terdapat pada satker pusat Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp16.410.909.797,00.

Pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp9.787.700,00 terdapat pada akun 511111, Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) senilai Rp7.445,00, Belanja Tunj. Struktural PNS (511123) senilai Rp24.780.000,00, Belanja Tunj. Fungsional PNS (511124) senilai Rp19.955.000,00, dan Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai Rp63.611.630,00.

Tabel B.9. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	53.379.733.000	29.717.609.383	55,67
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.568.886.000	1.676.941.225	46,99
Belanja Lembur (5122)	1.261.496.000	310.640.000	24,62
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124)	76.519.605.000	30.820.578.360	40,28
Jumlah Belanja Kotor	134.729.720.000	62.525.768.968	46,41
Pengembalian Belanja Pegawai		(119.244.822)	
Jumlah Belanja	134.729.720.000	62.406.524.146	46,32

Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA. 2024 sebesar 7,36%. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan jumlah anggaran yang juga cukup signifikan seiring dengan perubahan pembayaran tunjangan kinerja dan gaji pegawai karena adanya perpindahan menuju fungsional. Kenaikan yang paling signifikan yaitu pada Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124) dengan kenaikan 8,66%. Rincian perbandingan belanja pegawai Semester I TA. 2025 dengan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.10.

Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA. 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	29.717.609.383	28.158.727.610	5,54
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	1.676.941.225	1.303.081.816	0,00
Belanja Lembur (5122)	310.640.000	318.224.000	(2,38)
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124)	30.820.578.360	28.365.163.527	8,66
Jumlah Belanja Kotor	62.525.768.968	58.145.196.953	7,53
Pengembalian Belanja Pegawai	(119.244.822)	(16.982.033)	602,18
Jumlah Belanja	62.406.524.146	58.128.214.920	7,36

Belanja Barang
Rp26.299.746.070

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Anggaran semula sebesar Rp468.099.569.000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp468.670.286.000,00. Untuk realisasi belanja barang *bruto* per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp26.372.163.024,00 atau 5,63%. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp72.416.594,00 sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp26.299.746.070,00 atau 5,61%. Rincian Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.11.

Persentase realisasi belanja barang terbesar yaitu pada Belanja Barang Operasional dengan persentase 34,99% sementara belanja yang belum ada realisasi terdapat pada Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat.

Tabel B.11. Rincian Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional (5211)	11.193.463.000	3.916.218.424	34,99
Belanja Barang Non Operasional (5212)	35.115.369.000	1.322.402.217	3,77
Belanja Barang Persediaan (5218)	1.135.199.000	200.240.039	17,64
Belanja Jasa (5221)	215.068.757.000	13.678.344.276	6,36
Belanja Pemeliharaan (5231)	6.972.620.000	1.509.920.226	21,65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	176.094.410.000	4.707.145.828	2,67
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	7.992.867.000	279.633.484	3,50
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261)	14.997.601.000	758.258.530	5,06
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi & TP (5262)	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	100.000.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	468.670.286.000	26.372.163.024	5,63
Pengembalian Belanja		(72.416.954)	
Jumlah Belanja	468.670.286.000	26.299.746.070	5,61

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Dari pagu anggaran Rp11.193.463.000,00, realisasi sebesar Rp3.916.218.424,00, dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi 34,99%. Realisasi Belanja Barang Operasional terbesar yaitu Belanja Keperluan Perkantoran (521111) sebesar Rp3.169.077.307,00 yang terdapat pada 1 satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana yang nilai yang terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp1.932.654.148,00.

Pada Belanja Barang Operasional juga terdapat belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, belanja Honor Operasional Satuan Kerja dan belanja Barang Operasional Lainnya.

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Dari pagu Rp35.115.369.000,00, realisasi sebesar Rp1.322.402.217,00 tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 3,77%. Realisasi terbesar yaitu Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp75.784.951,00 tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 20,85%. Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada 6 satker dengan rincian 1 satker Kantor Pusat dan 4

satker UPT dan 1 satker Dekonsentrasi dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp30.000.000,00.

Selain itu juga terdapat belanja Bahan, Honor *Output* Kegiatan, dan belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel. Realisasi belanja Bahan (521211) sebesar Rp1.238.787.266,00 yang terdapat pada 7 satker dengan rincian 1 satker Kantor Pusat dan 6 satker UPT yaitu LPSPL Serang, BPSPL Pontinak, LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Padang dan BKKPN Kupang, dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp104.401.269.900. Realisasi belanja Honor Output Kegiatan (521213) sebesar Rp7.830.000,00 yang terdapat pada 2 Satker Setditjen PKRL dan LKKPN Pekanbaru.

Belanja Barang Persediaan merupakan pembelian barang yang memiliki masa manfaat selama satu tahun. Terdiri dari satu akun yaitu Persediaan Barang Konsumsi (521811) dengan pagu Rp1.135.199.000,00, realisasi sebesar Rp200.240.039,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 17,64%. Realisasi terdapat pada 9 satker yaitu Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp44.362.500,00

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp13.678.344.276,00 atau 6,36% dari total pagu sebesar Rp215.068.757.000,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja. Realisasi Belanja Jasa yang tergolong besar yaitu Belanja Sewa (522141) sebesar Rp5.286.107.298,00 tanpa pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 24,29% dari total pagu Rp21.762.398.000,00 diantaranya yaitu sewa tempat kerja, sewa gedung untuk pertemuan, sewa perahu/kapal, kendaraan operasional, alat selam untuk kegiatan, dll. Realisasi Belanja Jasa Sewa terdapat pada 9 satker yang terdiri dari satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana realisasi terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL yaitu Rp1.126.526.650,00.

Selanjutnya terdapat realisasi belanja Jasa Lainnya (522191) sebesar Rp7.108.382.969,00 atau 22,64% dari total pagu Rp31.399.617.000,00 dan tidak terdapat pengembalian. Belanja Jasa Lainnya terdapat pada 9 satker dengan rincian satu satker pusat dan seluruh satker UPT dimana realisasi yang terbesar terdapat pada satker Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp3.834.013.043,00. Selain itu, pada belanja Jasa juga terdapat diantaranya belanja Langganan Listrik, Telepon, Air, belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya, belanja Jasa Konsultan, dan belanja Jasa Profesi.

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp1.509.920.226,00 atau 21,65% dari total pagu sebesar Rp6.972.620.000,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja. Realisasi belanja pemeliharaan yang tergolong besar yaitu terkait Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp796.510.333,00 atau 19,29% dari total pagu Rp4.130.142.000,00. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat pada 1 satker pusat dan seluruh satker UPT dengan yang terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp204.321.422,00. Selain itu juga terdapat realisasi belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, belanja pemeliharaan Jaringan, dan belanja Pemeliharaan Lainnya. Seluruh belanja pemeliharaan hanya terdapat pada satker Kantor Pusat dan UPT.

Realisasi belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp4.707.145.828,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp72.416.954,00 sehingga realisasi *netto* Rp4.634.728.874,00 atau 2,63% dari total pagu sebesar Rp176.094.410.000,00. Realisasi yang tergolong besar yaitu belanja Perjalanan Biasa (524111) yang merupakan pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, dan lain-lain sebesar Rp2.799.190.499,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp72.416.954,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp2.726.773.545,00 atau 2,57% dari total pagu Rp106.074.699.000,00.

Realisasi belanja Perjalanan Biasa (524111) terdapat pada 9 satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Pengembalian belanja Perjalanan Biasa hanya terdapat pada satker BPSPL Makasar. Realisasi belanja Perjalanan Dalam Negeri juga terdapat pada belanja perjalanan Dinas Dalam Kota, belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam dan Luar Kota.

Realisasi belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp279.633.484,00 tanpa pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 4,32% dari total pagu sebesar Rp7.992.867.000,00. Belanja perjalanan luar negeri terdiri dari perjalanan biasa luar negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, dan perjalanan lainnya luar negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja

perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri belum ada realisasi dan Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri senilai Rp279.633.484,00 tanpa pengembalian belanja.

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp 758.258.530,00 dari total pagu sebesar Rp14.997.601.000,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 5,06%. Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat diantaranya terdiri dari : (1) Realisasi belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526112) sebesar Rp0,00 dari total pagu sebesar Rp6.653.000.000,00 yang terdapat pada satu satker pusat Setditjen. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat diantaranya berupa kegiatan Kompak berupa pengadaan alat selam dan lain sebagainya untuk satker UPT.

(2) Realisasi belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526113) sebesar Rp608.861.400,00 atau 14,66% dari total pagu sebesar Rp4.154.601.000,00 dan tidak terdapat pengembalian. Realisasi akun ini hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL.

(3) Realisasi belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526115) sebesar Rp149.397.130,00 atau 3,57% dari total pagu sebesar Rp4.190.000.000,00 yang terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL.

Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp100.000.000,00 tanpa pengembalian belanja. Realisasi belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (526311) hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL diantaranya berupa kegiatan bantuan penanaman mangrove dan vegetasi pantai serta pengadaan sarana pengolahan produk mangrove.

Realisasi belanja barang TA. 2025 secara umum dibandingkan dengan TA. 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 232,67%. Secara rinci menurut akun belanja, penurunan yang paling signifikan terdapat pada belanja Perjalanan Luar Negeri dimana pada tahun sebelumnya realisasi sebesar Rp3.218.340.068,00 mengalami penurunan pada tahun ini menjadi sebesar Rp279.633.484,00 atau

turun 1.050,91%. Sementara itu, terdapat juga penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar 812,83% dimana pada tahun sebelumnya realisasi anggaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp42.968.323.179,00 dibandingkan tahun ini masih Rp4.707.145.828,00. Rincian perbandingan belanja TA. 2025 dengan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.12.

Tabel B.12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Semester I TA. 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Barang Operasional (5211)	3.916.218.424	4.935.016.432	(26,01)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	1.322.402.217	9.935.156.204	(651,30)
Belanja Barang Persediaan (5218)	200.240.039	276.318.945	(37,99)
Belanja Jasa (5221)	13.678.344.276	20.000.536.319	(46,22)
Belanja Pemeliharaan (5231)	1.509.920.226	1.952.864.446	(29,34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	4.707.145.828	42.968.323.179	(812,83)
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	279.633.484	3.218.340.068	(1.050,91)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261)	758.258.530	4.044.483.105	(433,39)
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi & TP (5262)	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	0	172.246.800	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	26.372.163.024	87.503.285.498	(231,80)
Pengembalian Belanja	(72.416.954)	(12.040.229)	83,37
Jumlah Belanja	26.299.746.070	87.491.245.269	(232,67)

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.2.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal PKRL tidak mempunyai anggaran belanja sosial. Rincian Realisasi Belanja Sosial Semester I disajikan pada Tabel B.13.

Tabel B.13. Rincian Realisasi Belanja Sosial per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	30 Jun 2024 (Rp)	30 Jun 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Belanja Modal
Rp99.322.800

B.2.4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran awal sebesar Rp20.763.997.000,00 dan direvisi menjadi Rp20.193.280.000,00. Untuk realisasi belanja modal *bruto* per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp99.322.800,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal pada akun Belanja Modal sehingga realisasi belanja *netto* tetap sebesar Rp99.322.800,00 atau 0,49%.

Terdapat Realisasi di belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 99.322.800,00 atau 0,51%. Sementara itu, ada dua akun yang belum sama sekali ada realisasi yaitu Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) dengan pagu senilai Rp200.000.000,00 hanya terdapat pada satker LKKPN Pekanbaru, serta Belanja Modal Lainnya (536111) dengan pagu senilai Rp555.500.000,00 yang juga hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL pada Direktorat KEPB rencana pembelian software untuk Kawasan Trumbu Karang Lautra Sejahtera (SIDAKO).. Rincian Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.14.

Tabel B.14. Rincian Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	19.437.780.000	99.322.800	0,51
Belanja Modal Perjalanan Peralatan & Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Perencanaan & Pengawasan GB	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai GB	200.000.000	0	0,00
Belanja Modal JIJ	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	555.500.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	20.193.280.000	99.322.800	0,49
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	20.193.280.000	99.322.800	0,49

Realisasi belanja modal periode Semester I TA. 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 97,77% dibandingkan dengan TA. 2024 dikarenakan anggaran belanja modal tahun 2025 jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan tahun 2024. Selain itu, pada periode Semester I 2025 masih banyak anggaran belanja modal yang diblokir. Rincian perbandingan belanja modal TA. 2025 dengan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.15.

Tabel B.15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA. 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Naik (Turun)%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	99.322.800	3.575.000.755	-97,22
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	868.975.898	-100,00
Belanja Modal JIJ	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	99.322.800	4.443.976.653	-97,77
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	99.322.800	4.443.976.653	-97,77

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.2.4.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah (5311) merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual). Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah untuk tahun 2025 ini.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp99.322.800

B.2.4.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Anggaran semula Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.511.897.000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp19.437.780,000,00. Untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin *bruto* per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp99.322.800,00. Tidak terdapat pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin sehingga realisasi belanja *netto* tetap sebesar Rp99.322.800,00 atau 0,51%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.16.

Tabel B.16. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.437.780.000	99.322.800	0,51
Jumlah Belanja Kotor	19.437.780.000	99.322.800	0,51
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	19.437.780.000	99.322.800	0,51

Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu dari Belanja modal Peralatan dan Mesin (532111) yang terdapat pada tujuh satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan 6 satker UPT (satker BPSPL Padang dan LPSPL Serang yang tidak memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dengan realisasi terdapat hanya pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp99.322.800,00.

B.2.4.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Anggaran semula sebesar Rp1.696.600.000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp200.000.000,00. Untuk realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan *bruto* per 30 Juni 2025 adalah masih Rp0,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.17.

Tabel B.17. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200.000.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	200.000.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja	200.000.000	0	0,00

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) dengan sampai ini belum ada realisasi.

B.2.4.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (5341) pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.18.

Tabel B.18. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal JIJ	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.2.4.5. Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu dapat juga digunakan untuk mencatat atau memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan *software*, pengembangan *website*, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya yaitu pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

Anggaran Belanja Modal Lainnya (5361) sebesar Rp555.000.000,00. Belum terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya (536111) sampai dengan 30 Juni 2025 atau masih 0,00%. Akun Belanja Modal Lainnya hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL Direktorat KEBP rencana pembelian software untuk Kawasan Trumbu Karang Lautra Sejahtera (SIDAKO). Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel B.19.

Tabel B.19. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	555.500.000	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	555.500.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja	555.500.000	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp5.066.098.382*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (1116) per 30 Juni 2025 sebesar Rp5.066.098.382,00. Akun ini terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran (111611) sebesar Rp880.000.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) sebesar Rp4.186.098.382,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Sementara itu Saldo Kas di Bendahara Penerimaan (1117) per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir Tahunan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2024 *Audited* senilai Rp0,00 atau tidak ada akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun. Kas di Bendahara Pengeluaran (111611) terdapat pada 9 satker pada seluruh satker UPT dan Pusat dengan yang terbesar pada satker Setditjen PKRL senilai Rp300.000.000,00.

Tabel C.1. Perbandingan Kas di BP 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30 Jun 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	880.000.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4.186.098.382	0
Jumlah	5.066.098.382	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.472.051.579*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas (1118XX) per 30 Juni 2025 sebesar Rp1.472.051.579,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Akun ini terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821) senilai Rp91.099.078,00 dan

Kas Lainnya di K/L dari Hibah (111822) senilai Rp1.380.952.501,00.

Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp113.000,00 yang hanya terdapat pada 1 satker yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo yang merupakan pajak atas kegiatan dari dana UP/TUP yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran yang disetorkan melewati Tahun Anggaran 2024 yaitu tanggal 2 Januari 2025 dengan kode billing 029599369123002 telah hilang. Sementara itu untuk periode 30 Juni 2025 hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp91.099.078,00.

Saldo Awal dan Saldo per 30 Juni 2025 pada akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah hanya terdapat pada satu satker kantor pusat yaitu Setditjen PKRL senilai Rp1.380.952.501,00. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp883.191.198,00 yaitu hibah luar negeri berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concorium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari satker Pusat Riset Perikanan (403821) BPPSDM dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00 yang telah didaftarkan dengan nomor register 2PG6AJQA. Perubahan data hibah register dari Pengelola Satker Pusrisan menjadi Satker Sekretariat Ditjen PKRL telah tertuang dalam Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement Nomor S-682/PR.8/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Kemudian terdapat penambahan sebesar Rp1.008.181.303,00 atau senilai KRW510.420.000 pada tanggal 28 Juni 2024. Saldo akhir pada rekening koran per 30 Juni 2025 sebesar Rp1.380.952.501,00.

Pemindahan pengelolaan kerja sama dikarenakan secara strategis proyek kerja sama ini sangat relevan dengan tugas dan fungsi pada Direktorat Jasa Kelautan - Ditjen PKRL dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan bangunan dan instalasi laut dan wisata bahari. Selain itu kegiatan ini mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi sebagaimana tusi Ditjen PKRL.

Terdapat kenaikan saldo 30 Juni 2025 jika dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 *Audited* sebesar 36,05% dengan rincian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel C.2. Perbandingan Kas Lainnya di BP 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
Audited

Perkiraan	30 Jun 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	91.099.078	113.000	0,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.380.952.501	1.380.952.501	0,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0	0,00
Jumlah	1.472.051.579	1.381.065.501	6,18

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp0*

C.3. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berupa Belanja Barang yang Dibayar Dimuka/*prepaid* (114112) per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00. Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, domain *website* dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi kerja. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan disajikan pada pos belanja dibayar dimuka pada neraca.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 *Audited* juga senilai Rp0,00. Hal ini salah satunya diakibatkan yang umumnya sewa kendaraan dan sewa kantor yang melewati akhir tahun sudah tidak ada lagi pada Laporan Keuangan.

Tabel C.3. Perbandingan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30 Jun 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima (114311) per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00. Tidak ada perubahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited*.

Uang Muka Belanja
Rp0

C.5. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja (*prepayment*) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Saldo Uang Muka Belanja per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat perbedaan Uang Muka Belanja dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited* dimana pada tahun sebelumnya tidak ada juga akun Uang Muka Belanja.

Tabel C.4. Perbandingan Uang Muka Belanja 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
Audited

Perkiraan	30 Jun 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Uang Muka Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Piutang Bukan
Pajak
Rp6.531.405.912

C.6. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (1152XX) per 30 Juni 2025 sebesar Rp6.531.405.912,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Terdapat penurunan nilai yang sangat signifikan jika dibandingkan Laporan Keuangan Tahunan 2024 *Audited* sebesar 72,09% pada akun Piutang Bukan Pajak Ditjen PKRL dimana sebelumnya sebesar Rp11.239.891.322,00 diantaranya karena adanya jurnal balik koreksi *Audited* baik yang diakibatkan temuan BPK maupun koreksi dari KKP.

Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211) dan Piutang Lainnya (115212). Pada awal tahun terdapat Piutang PNPB sebesar Rp2.559.256.077,00 pada satker Setditjen PKRL yang

merupakan nilai kontribusi tetap yang akan diterima pada tahun 2025. Periode 30 Juni 2025 nilai masih tidak berubah yaitu Rp2.559.256.077,00 dan belum dilakukan jurnal balik karena belum dilakukan penyetoran yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret tahun 2025, yaitu berupa piutang Pendapatan KSP Tanah Pulau Nipa berupa nilai kontribusi tetap yang telah diakui di akhir tahun 2024. Namun dikarenakan terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025, maka seharusnya pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2025 ini yaitu Rp1.279.628.039,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Untuk tahun ini direncanakan akan dilakukan pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan dengan Surya Mina Asinusa KSO yang telah dijalin sejak penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa tanggal 16 April 2014. Kondisi ini diakibatkan adanya tantangan dan hambatan yang pada akhirnya berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan perjanjian KSP Pulau Nipa.

Tabel C.5 Perbandingan Piutang PNBPN 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Piutang PNBPN	2.559.256.077	2.559.256.077	0,00
Piutang Lainnya	3.972.149.835	8.680.635.245	-118,54
Jumlah	6.531.405.912	11.239.891.322	-72,09

Selain itu pada awal tahun juga terdapat Piutang Lainnya (115212) senilai Rp8.680.635.245,00. Senilai Rp143.266.052,00 terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL dengan rincian nilai Rp14.746.000,00 yang merupakan temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton yang belum disetor dari nilai total temuan Rp123.046.000,00, diantaranya terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, pengeluaran tanpa bukti pendukung, pembayaran tidak sesuai ketentuan, dll. Dinas terkait telah melakukan pembayaran secara bertahap, untuk tahun lalu juga telah dilakukan pembayaran telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang lainnya pada neraca. Sampai dengan Semester I tahun 2024 terdapat beberapa setoran sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Setoran NTPN No. 72AD03G81K68OBR0 tanggal 6 Desember 2018 senilai Rp5.000.000,00 (belum tercatat pada periode

sebelumnya);

- b. Setoran atas CV. Mitra Alami NTPN No. 6519948VVEE6IU9G tanggal 26 Januari 2024 Rp5.000.000,00;
- c. Setoran atas LEHPI NTPN No. 5CA107QLUOQC9S6N tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- d. Setoran atas LEHPI NTPN No. 5752D55DF96JOM7Q tanggal 28 Maret 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- e. Setoran atas LEHPI NTPN No. 54FDF7QLUP0M6CR0 tanggal 27 April 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- f. Setoran atas LEHPI NTPN No. DCCEE7QLUP3N4J4H tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- g. Setoran atas LEHPI NTPN No. E88543CIFKANITOE tanggal 28 Juni 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- h. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. 2F8467QLUPCN5BUI tanggal 30 Agustus 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- i. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. AC77361QV4ASLD8D tanggal 28 September 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- j. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. FE5B26U8EV08L7UI tanggal 29 Oktober 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- k. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. FE5B26U8EV08L7UI tanggal 30 November 2024 senilai Rp1.000.000,00.

Sementara itu, untuk sisanya senilai Rp128.520.052,00 berasal dari temuan BPK Dinas KP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN Cabang Sulawesi Tenggara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. CV. Putra Ridi Mandiri, Kekurangan volume atas pengadaan alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas sesuai LHP BPK RI No.22C/LHP/XVII/06/2017 senilai Rp0,00 (sudah lunas). Dimana saldo awal senilai Rp17.450.000,00 ini pada tahun 2024 terdapat setoran dengan NTPN No. CD30C61QV4JM9D8C tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp5.584.000,00 dan mendapat *crash program* dari Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-2085/KNL.1505/2024 tanggal 17 Desember 2024 hal Persetujuan *Crash Program* berupa Keringanan Utang

- Debitur a.n. CV. Putra Ridi Mandiri (Iskadir) senilai sisa piutang yaitu Rp11.866.000,00;
- b. CV. Lande Bersaudara, kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* sesuai LHP BPK RI No. 22C/LHP/XVII/06/2017 dimana pada Tahun 2024 terdapat setoran pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp1.980.198,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp12.019.802,00;
 - c. CV. L, Kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multi fungsi senilai Rp28.000.250,00;
 - d. CV. YJ, Kekurangan volume atas pengadaan perlengkapan perahu senilai Rp88.500.000,00.

Sementara itu sisa Saldo Awal Piutang Lainnya merupakan koreksi *Audited* pada 5 satker dengan rincian satker Setditjen PKRL dan empat satker UPT (BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong, dan BKKPN Kupang). Untuk satker UPT telah dilakukan jurnal balik sementara satker Setditjen PKRL beberapa telah dilakukan jurnal balik karena telah dilakukan pembayaran/setoran.

Untuk saldo per 30 Juni 2025 senilai Rp3.972.149.835,00 yang terdiri enam satker UPT dan satu satker pusat. Untuk satker UPT merupakan sewa rumah negara untuk bulan Juli yang sudah diajukan SPM pada bulan Juni dengan nilai beragam sesuai dengan jumlah serta tipe rumah yang ditempati. Sementara untuk satker Setditjen PKRL senilai Rp3.968.958.974,00 terdiri dari 1) izin pelaksanaan reklamasi yang menghasilkan PNBPN dengan pembayaran melewati Tahun Anggaran 2024 oleh PT. Vesinter Indonesia dengan total Rp9.564.232.305,00. Pembayaran dilakukan dengan tiga tahap dimana satu tahap telah dibayarkan pada tahun 2024, sementara sisanya dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2025 senilai Rp3.825.692.922,00 dengan NTPN Nomor : AE9C17QLV24IKI61 dan rencana pada bulan Juli 2025 senilai Rp3.825.692.922,00 dan 2) senilai Rp143.266.052,00 dengan rincian nilai Rp14.746.000,00 yang merupakan temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton yang belum disetor dan Rp128.520.052,00 berasal dari temuan BPK Dinas KP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN Cabang Sulawesi Tenggara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak
Rp(175.190.795)

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 30 Juni 2025 sebesar Rp(175.190.795,00) atau terdapat penurunan jika dibandingkan Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited* yang senilai Rp(198.749.177,00) sesuai dengan penurunan pada nilai piutangnya. Nilai ini menjelaskan maksimum besarnya uang yang tidak dapat tertagih yang biasanya sebesar 5 permil dari total piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih terdiri atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN senilai Rp(12.796.279,00) dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya senilai Rp(162.394.516,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN (116211) yang pada awal tahun senilai Rp(12.796.279,00) merupakan perhitungan 5 permil dari Piutang PNBPN P. Nipa yang pembayarannya diterima tahun 2025 belum dilakukan jurnal balik. Pada Semester I belum dilakukan jurnal manual sehingga nilai per 30 Juni 2025 tetap sebesar Rp(12.796.279,00) atau tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan saldo LK *Audited*.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) yang pada awal tahun senilai Rp(185.952.898,00) pada beberapa satker telah dilakukan jurnal balik sehingga untuk LK Semester I 2025 senilai Rp(162.394.516,00) atau turun sebesar 11,85%. Penyisihan Piutang pada Dinas KP Kab. Buton yang tercatat pada satker Setditjen PKRL senilai sama dengan piutangnya atau 100% dan termasuk golongan kualitas piutang macet karena pembayaran secara bertahap yang sudah terlampaui lama dan telah dilayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga untuk segera dilakukan pelunasan.

Tabel C.6. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30 Jun 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Peny. Piutang PNBPN	12.796.279	12.796.279	0,00
Peny. Piutang Lainnya	162.394.516	185.952.898	-12,67
Jumlah	175.190.795	198.749.177	-11,85

Piutang dari KUN
Rp0

C.8. Piutang dari KUN

Saldo Piutang dari KUN pada Ditjen PKRL per 30 Juni 2025 yaitu Rp0,00. Tidak terdapat perubahan nilai Piutang dari KUN dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited* dimana sebelumnya senilai Rp0,00.

Piutang dari KUN dapat berupa (1) Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima (115613) digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan dan (2) Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima (115614) digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan.

Persediaan
Rp28.658.347

C.9. Persediaan

Saldo awal persediaan 1 Januari 2025 senilai Rp1.641.794.412,00. Total mutasi tambah persediaan selama periode Tahunan TA. 2024 senilai Rp137.253.456.790,00. Total mutasi kurang persediaan selama periode Tahunan TA. 2024 senilai Rp136.639.935.163,00, sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2024 *Audited* senilai Rp28.658.347,00. Adapun rincian mutasi dan saldo terdapat pada tabel C.7.

Tabel C.7. Neraca Persediaan Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025

No.	Akun	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 30 Jun 2025 (Rp)
1	117111	Barang Konsumsi	17.291.935	9.839.208.184	9.828.977.957	27.522.162
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	263.800	263.800	0
3	117121	Pita Cukai Materai Leges	0	3.070.000	3.070.000	0
4	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	32.939.518.241	32.939.518.241	0
5	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	3.699.317.078	3.699.317.078	0
6	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	33.564.438.835	33.564.438.835	0
7	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	4.300.971.062	4.300.971.062	0
8	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	744.470.250	0	744.470.250
9	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	2.428.969.000	2.428.969.000	0
10	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1.010.980.850	49.666.583.840	49.807.762.690	869.802.000
11	117131	Bahan Baku	0	65.000	65.000	0
12	117141	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	0	66.581.500	66.581.500	0
13	117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	0
			1.028.272.785	137.253.456.790	136.639.935.163	1.641.794.412

Sisa saldo barang persediaan terdapat pada 16 satker lingkup Ditjen PKRL (1

satker pusat, 8 satker UPT, dan 7 satker TP) yaitu berupa alat tulis kantor, kertas HVS, tinta printer, dan Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Persediaan yaitu berkurang senilai Rp290.000,00 hanya pada satker Dinas KP Prov. NTB.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami jelaskan secara rinci akun-akun persediaan sebagai berikut :

1. Barang Konsumsi (117111)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Barang Konsumsi adalah Rp27.522.162,00 dengan mutasi tambah senilai Rp9.839.208.184,00 terdiri dari pembelian, reklasifikasi masuk, koreksi, hasil opname fisik, serta mutasi kurang senilai Rp9.828.977.957,00 dengan transaksi habis pakai, reklasifikasi keluar, dan opname fisik, sehingga saldo Bahan Konsumsi per 30 Juni 2025 Rp28.658.347,00. Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Barang Konsumsi per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8. Mutasi Barang Konsumsi

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	27.522.162
MUTASI TAMBAH	9.839.208.184
Pembelian	929.113.740
Reklasifikasi Masuk	6.194.550
Koreksi Nilai Bertambah	8.902.299.893
Koreksi Kuantitas Bertambah	1
Saldo Awal	1.600.000
MUTASI KURANG	(9.828.977.957)
Habis Pakai	(917.196.213)
Reklasifikasi Keluar	(3.124.550)
Koreksi Kuantitas Kurang	(8.902.299.894)
Hasil Opname Fisik	(6.357.300)
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	37.752.389

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Barang Konsumsi yaitu berkurang senilai Rp290.000,00 hanya pada satker Dinas KP Prov. NTB karena koreksi mandiri satker pada periode 14. Saldo Barang Konsumsi terdapat pada 16 satker lingkup Ditjen PKRL (1 satker pusat, 8 satker UPT, dan 7 satker TP) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.9. Rincian Saldo Barang Konsumsi

No.	Nama Satker	Saldo 30 Jun 2025 (Rp)
1	LPSPL Serang	699.500
2	BPSPL Denpasar	1.604.250
3	BPSPL Pontianak	2.910.400
4	BPSPL Makassar	2.831.500
5	LPSPL Sorong	540.000
6	LKKPN Pekanbaru	829.700
7	BPSPL Padang	3.625.800
8	BKKPN Kupang	7.456.800
9	Setditjen PKRL	4.293.680
10	Dinas KP Prov. Jawa Barat	30.400
11	Dinas KP Prov. Jawa Tengah	489.000
12	Dinas KP Prov. Jawa Timur	471.500
13	Dinas KP Prov. Sumatera Utara	120.000
14	Dinas KP Prov. Maluku	75.000
15	Dinas KP Prov. Bali	934.000
16	Dinas KP Prov. Gorontalo	610.632
TOTAL		27.522.162

2. Bahan untuk Pemeliharaan (117113)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Bahan untuk Pemeliharaan adalah Rp0,00. Mutasi tambah senilai Rp263.800,00 dan mutasi kurang senilai Rp263.800,00 sehingga Saldo Bahan untuk Pemeliharaan per 30 Juni 2025 Rp0,00. Mutasi kurang disebabkan karena adanya pemakaian pada Satker LPSPL Serang. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Bahan untuk Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.10 berikut :

Tabel C.10. Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	263.800
Pembelian	263.800
Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	(263.800)
Habis Pakai	(263.800)

Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	0

3. Pita Cukai, Materai, Leges (117121)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Pita Cukai, Materai, Leges adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp3.070.000,00 dan mutasi kurang senilai Rp3.070.000,00. Mutasi kurang disebabkan karena adanya reklasifikasi keluar dengan nilai yang sama, sehingga Saldo Pita Cukai, Materai, Leges Per 30 Juni 2025 adalah Rp0,00. Transaksi ini hanya terdapat pada satker UPT yaitu BKKPN Kupang karena adanya salah catat pada modul komitmen yang seharusnya barang tersebut merupakan barang konsumsi berupa ATK.. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Pita Cukai, Materai, Leges per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.11 berikut :

Tabel C.11. Mutasi Pita Cukai, Materai, Leges

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	3.070.000
Pembelian	3.070.000
Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	(3.070.000)
Habis Pakai	0
Reklasifikasi Keluar	(3.070.000)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	0

4. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)

Saldo awal per 1 Januari 2025 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang dengan nilai yang sama sebesar Rp32.939.518.241,00 pada akun ini. Saldo Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2025 adalah Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.12 berikut :

Tabel C.12. Rincian Mutasi Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	32.939.518.241
Pembelian	6.750.668.462
Persediaan Dalam Proses Masuk	26.188.849.779
MUTASI KURANG	(32.939.518.241)
Habis Pakai	(28.654.365.841)
Reklasifikasi Keluar	(4.285.152.400)
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat perolehan/pembelian Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp6.750.668.462,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Satker PKPB Dit. P4K sebesar Rp4.285.152.400,00 terdiri dari 41 pekerjaan
 - ii. Satker PKPB Dit. Jasa Kelautan sebesar Rp2.465.516.062,00 terdiri dari 34 pekerjaan
- Terdapat Persediaan Dalam Proses Masuk berupa Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp26.188.849.779,0 sebagai berikut :
 - i. PKPB Dit. P4K dengan nilai keseluruhan Rp7.878.647.779,00 berupa pembangunan dermaga apung/tambat labuh di 4 lokasi yaitu Kab. Banggai Laut, Kab. Kep. Aru, Kab. Pesisir Selatan, dan Kab. Sumbawa
 - ii. PKPB Dit. Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.310.202.000,00 berupa pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) pada 13 lokasi diantaranya di Kab. Jeneponto, Kab. Lombok, Kab. Pamekasan, dll, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) pada 1 lokasi yaitu Kab. Cirebon, pembangunan Rumah Garam pada 1 lokasi yaitu Kab. Sambas, dan Rehabilitasi GGN pada 1 lokasi yaitu Kab. Bima.

Penjelasan mutasi kurang Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat Reklasifikasi Keluar Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp4.285.152.400,00

- Terdapat transaksi Habis Pakai Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp10.344.163.84100
- Terdapat transaksi Habis Pakai Tanah Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp18.310.202.000,00 berupa pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) pada 13 lokasi diantaranya di Kab. Jeneponto, Kab. Lombok, Kab. Pamekasan, dll, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) pada 1 lokasi yaitu Kab. Cirebon, pembangunan Rumah Garam pada 1 lokasi yaitu Kab. Sambas, dan Rehabilitasi GGN pada 1 lokasi yaitu Kab. Bima

5. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117123)

Saldo awal per 1 Januari 2025 Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp3.699.317.078,00 dan mutasi kurang senilai Rp3.699.317.078,00 sehingga saldo per 30 Juni 2025 menjadi Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.13.

Tabel C.13. Rincian Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	3.699.317.078
Pembelian	3.699.317.078
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
MUTASI KURANG	(3.699.317.078)
Habis Pakai	(3.699.317.078)
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	0

Mutasi tambah Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat karena terdapat transaksi Perolehan/Pembelian Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp3.699.317.078,00. Sementara mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat Terdapat transaksi Habis Pakai Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp3.699.317.078,00.

Penjelasan mutasi tambah Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Perolehan/Pembelian Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K yang terdiri dari 128 Pekerjaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.699.317.078,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Penanaman Mangrove yang tersebar pada 48 lokasi di kabupaten Demak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.032.374.900,00
 - b. Pekerjaan Penanaman Vegetasi untuk Mitigasi Bencana yang tersebar pada 17 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp500.825.000,00 yaitu terdapat pada Kabupaten Pangandaran sebanyak 8 lokasi, dan pada Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 lokasi
 - c. Pekerjaan Penyulaman Mangrove yang tersebar pada 56 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.111.079.700,00 yaitu terdapat Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 lokasi, Kabupaten Kebumen sebanyak 6 lokasi, Kabupaten Sampang sebanyak 1 lokasi, Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Banyuwangi sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Brebes sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Indramayu sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Pesawaran sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Probolinggo sebanyak 6 lokasi, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 6 lokasi, Kabupaten Sampang sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Situbondo sebanyak 4 lokasi, Kota Pasuruan sebanyak 5 lokasi, Kota Surabaya sebanyak 5 lokasi, Kota Pasuruan sebanyak 2 lokasi
 - d. Penyulaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana yang tersebar pada 7 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp55.037.478,00 yaitu terdapat pada Kabupaten Pangandaran sebanyak 4 lokasi dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 3 lokasi

Penjelasan mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat yaitu terdapat transaksi Habis Pakai Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K sebesar Rp3.699.317.078,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

6. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

(117124)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00, mutasi tambah senilai Rp33.564.438.835,00 dan mutasi kurang dengan nilai yang sama. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.14 berikut :

Tabel C.14. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	33.564.438.835
Pembelian	15.734.768.674
Persediaan Dalam Proses Masuk	15.293.191.215
Reklasifikasi Masuk	2.310.900.946
Reklasifikasi Dari Aset	225.578.000
MUTASI KURANG	(33.564.438.835)
Habis Pakai	(32.674.594.435)
Koreksi Kuantitas Kurang	(85.800.000)
Reklasifikasi Keluar	(804.044.400)
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Perolehan/Pembelian Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.7346.768.674,00 pada seluruh satker UPT dan Dit. Jasa Kelautan dan Dit. P4K
- Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.293.191.215,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) BPSPL Pontianak berupa Kapal Fiber sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp99.900.000, hal tersebut dilakukan karena kesalahan akuntansi pencatatan oleh Operator Persediaan, yaitu melakukan transaksi Habis Pakai terhadap barang Persediaan 526 Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, yang seharusnya transaksi yang dilakukan adalah transaksi Penyelesaian

Barang Dalam Proses

- 2) PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.193.291.215,00 berupa rumah garam di Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Utara, Kab. Malang, Kab. Pidie Jaya, dan *Washing Plant* di Kab. Bima

Hal tersebut karena kesalahan akuntansi pencatatan oleh Operator Persediaan, yaitu melakukan transaksi Habis Pakai terhadap barang Persediaan 526 Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, yang seharusnya transaksi yang dilakukan adalah transaksi Penyelesaian Barang Dalam Proses.

- Transaksi Reklaifikasi Persediaan Masuk Peralatan dan Mesin sebanyak 14 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.310.900.946,00 dengan rincian pada satker : (1) BPSPL Makassar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp66.581.500,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dan (2) Dit. Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.224.319.446,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat.
- Transaksi Reklaifikasi Dari Aset pada Satker BPSPL Makassar berupa berupa belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebanyak 8 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp225.578.000,00. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Penjelasan mutasi kurang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp33.564.438.835,00 pada seluruh satker UPT dan Dit. Jasa Kelautan dan

Dit. P4K

- Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K berupa Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Rembang, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp85.800.000,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu *double input*, sehingga dilakukan koreksi pencatatan (Koreksi Kuantitas Kurang) sebesar Rp85.000.000,00
- Transaksi Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebanyak 5 unit, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp804.044.400,00
- Reklasifikasi Keluar berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Peralatan dan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat, yang seharusnya dicatat sebagai belanja 526 Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses.

7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)

Saldo awal Tahun 2025 Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp4.300.971.062,00 dan mutasi kurang senilai Rp4.300.971.062,00 sehingga saldo menjadi Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.15 berikut :

Tabel C.15. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	4.300.971.062
Pembelian	1.487.899.062
Persediaan Dalam Proses Masuk	2.813.072.000
MUTASI KURANG	(4.300.971.062)
Habis Pakai	(3.754.440.062)
Reklasifikasi Keluar	(546.531.000)
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada Satker Kantor Pusat yaitu Dit. Jasa Kelautan dan Dit. P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.487.899.062,00
- Terdapat transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.813.071.000,00 berupa Integrasi Lahan Pergaraman. Transaksi Persediaan Dalam Proses tersebut dilakukan, karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Kode 05), yang seharusnya dicatat sebagai AKUN belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09).

Penjelasan mutasi kurang Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dan Dit. P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.754.440.062,00
- Transaksi Reklasifikasi Keluar berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp546.531.000,00 yaitu Integrasi Lahan Pergaraman. Reklasifikasi Keluar berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat tersebut dilakukan, karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Kode 05), yang seharusnya dicatat sebagai AKUN belanja 526 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09).

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

8. Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)

Saldo awal TA. 2025 Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat

senilai Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp744.470.250,00 sedangkan mutasi kurang pada akun ini senilai Rp0,00 sehingga saldo akhir Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 adalah Rp744.470.250,00. Pagu anggaran untuk akun Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA. 2025 adalah Rp0,00. Terdapat Transfer Masuk dari Biro Umum dan PBJ KKP berupa Aset Lain-Lain Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pekerjaan Ijin Lingkungan pembangunan SKPT MOA (Konsultan Ijin Lingkungan/UKLUPL) pada PKPB Direktorat Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp744.470.250,00, yang selanjutnya akan dilakukan transfer ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Kepelabuhanan.

9. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat (117128)

Saldo awal Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat adalah Rp0,00. Mutasi tambah sebesar Rp2.428.969.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.428.969.000,00, sehingga Saldo Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.16.

Tabel C.16. Rincian Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	2.428.969.000
Pembelian	100.000.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	1.086.299.000
Reklasifikasi Masuk	1.242.670.000
MUTASI KURANG	(2.428.969.000)
Persediaan Dalam Proses Keluar	0
Habis Pakai	(2.428.969.000)
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	0

Penjelasan mutasi tambah Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Pembelian/Pengadaan Sarana Wisata Bahari Kab. Jepara

dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00;

- Persediaan Dalam Proses Masuk dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.086.299.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Rumah Produksi Minyak Ikan di Kab. Cirebon dengan nilai sebesar Rp445.200.000,00
 - b) Rumah Produksi Minyak Ikan di Kab. Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp641.099.000,00
- Reklaifikasi Masuk dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.242.670.000,00 berupa pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari di Kab. Kendal dan Sarana Wisata Bahari di Kab. Kep. Anambas, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Pidie.

Penjelasan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai dengan nilai sebesar Rp2.428.969.000,00 dengan rincian pekerjaan Pondok Informasi Wisata Bahari di Kab. Kendal, Sarana Wisata Bahari di Kab. Jepara, Kab. Kep. Anambas, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Pidie, dan Rumah Produksi Minyak Ikan di Kab. Cirebon dan Kab. Lombok Timur.

10. Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)

Saldo awal Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 1 Januari 2025 adalah Rp1.010.980.850,00 dengan rincian pada Dit. P4K Perencanaan Dermaga Apung di Kab. Banggai senilai Rp145.158.000,00, Perencanaan Dermaga Apung di Kab. Sumbawa senilai Rp242.081.900,00, Perencanaan Dermaga Apung di Kab. Aru senilai Rp17.400.000,00 dimana kegiatan tersebut dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024. Pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa dokumen perencanaan Pembangunan Gudang Garam Nasional di Kab. Kupang - Prov. Nusa Tenggara Timur senilai Rp147.186.000,00 telah dilakukan penghapusan pada Semester I TA. 2024 berdasarkan Surat Bupati Nomor : BU.523/3043/DISKAN/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan PKPB Dit. PRL berupa Dokumen Konsultan Izin lingkungan pada SKPT Moa senilai Rp459.154.950,00.

Terdapat mutasi tambah senilai Rp49.566.683.840,00 dan mutasi kurang senilai Rp49.707.862.690,00 sehingga Saldo Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses per 30 Juni 2025 senilai

Rp869.802.000,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.17 berikut :

Tabel C.17. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	1.010.980.850
MUTASI TAMBAH	49.666.583.840
Pembelian	43.597.935.740
Reklasifikasi Masuk	5.683.432.800
Transfer Masuk Online	285.315.300
Opname Fisik	99.900.000
MUTASI KURANG	(49.807.762.690)
Persediaan Dalam Proses Keluar	(46.025.982.244)
Habis Pakai	(99.900.000)
Barang Persediaan Rusak/Usang	(147.186.000)
Reklasifikasi Keluar	(3.534.694.446)
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	869.802.000

Penjelasan mutasi tambah Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Perolehan/Pembelian Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses sebanyak 128 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp43.597.935.740,00 diantaranya sebagai berikut :
 - 1) PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp36.123.927.861,00 antara lain kegiatan Intergrasi Lahan Garam yang tersebar pada 5 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.931.932.000,00 yaitu Kab. Lombok Barat, Kab. Pamekasan, serta Kab. Pangkajene Kepulauan; Pekerjaan Bangunan Rumah Produksi Minyak Ikan yang tersebar pada 3 lokasi yaitu Kab. Lombok Timur 1 lokasi dan Kab. Cirebon 2 lokasi; Pekerjaan Konstruksi/Pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR); Pekerjaan Konstruksi/Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN); Pembangunan Rumah Produksi Minyak Ikan; Pekerjaan Bangunan dan Mesin *Washing Plant*; Pekerjaan/Pembangunan Wisata Bahari (Wisbar) yang terdiri dari 13 lokasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.337.889.446,00; Pengadaan Peralatan dan Mesin (Geomembran), dll.

- 2) PKPB Direktorat P4K sebanyak 16 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.474.007.879,00 antara lain kegiatan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di beberapa lokasi
- Terdapat transaksi Opname Fisik pada satu satker yaitu BPSPL Pontianak senilai Rp99.000.000,00
- Reklasifikasi Masuk Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebanyak 45 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.683.432.800,00. Hal tersebut dilakukan karena, terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09)
- Transfer Masuk Online pada PKPB Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang berasal dari Biro Umum dan PBJ KKP berupa Pembayaran Termin 3 Jasa Konsultan UKLPL sebesar Rp285.315.300,00

Penjelasan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, dengan rincian sebagai berikut :

- Reklasifikasi Keluar Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses sebanyak 17 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.534.694.446,00. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu dicatat sebagai perolehan belanja 526 berupa Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Kode 09), yang seharusnya dicatat sebagai akun belanja 526 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Kode 05)
- Transaksi Habis Pakai terdapat pada satu satker yaitu BPSPL Pontianak senilai Rp99.000.000,00
- Persediaan Dalam Proses Keluar berupa Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses (Penyelesaian Barang Dalam Proses) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp46.125.882.244,00
- Transaksi Barang Persediaan Usang/Rusak pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp147.186.000,00

11. Bahan Baku (117131)

Saldo awal per 1 Januari 2025 untuk akun Bahan Baku adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada akun Bahan Baku senilai Rp65.000,00 yang terdapat hanya pada satker UPT LPSPL Serang. Transaksi

Habis Pakai pada Satker LPSPL Serang yang seharusnya barang tersebut merupakan nilai Barang Konsumsi berupa ATK. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Bahan Baku per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.18 berikut :

Tabel C.18. Rincian Mutasi Bahan Baku

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	65.000
Pembelian	65.000
MUTASI KURANG	(65.000)
Habis pakai	(65.000)
Reklasifikasi Keluar	(0)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	0

12. Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial (117141)

Saldo Awal Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial per 1 Januari 2025 senilai Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp66.581.500,00 dan mutasi kurang senilai Rp66.581.500,00 dikarenakan reklasifikasi keluar (kesalahan catat pada modul komitmen) berupa bantuan pemerintah yang diserahkan pada masyarakat (KOMPAK) yang dicatat pada modul aset dimana seharusnya pada modul persediaan dan sudah diserahkan terimakan kepada kelompok dengan BAST kegiatan KOMPAK pada Satker BPSPL Makassar, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 adalah Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel C.19 berikut :

Tabel C.19. Rincian Mutasi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	66.581.500
Pembelian	66.581.500
MUTASI KURANG	(66.581.500)
Reklasifikasi Keluar	(66.581.500)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	0

13. Persediaan Lainnya (117199)

Saldo awal Persediaan Lainnya adalah Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada akun Persediaan Lainnya sehingga saldo Persediaan Lainnya per 30 Juni 2025 adalah Rp0,00. Tidak ada perubahan

nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Persediaan Lainnya. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Lainnya per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel C.20 berikut :

Tabel C.20. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	0
MUTASI TAMBAH	0
Pembelian	0
MUTASI KURANG	(0)
Habis Pakai	(0)
Reklasifikasi Keluar	(0)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	0

*Piutang Tagihan
TP/TGR Rp0*

C.10. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel C.21. Perbandingan Tagihan TP/TGR 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30 Jun 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Tagihan TP/TGR	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp98.155.639.556*

C.11. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya (1551XX) 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp98.155.639.556,00 dan Rp98.155.639.556,00 atau terdapat penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,61%. Penurunan diakibatkan adanya setoran di tahun berjalan sehingga dilakukan penyesuaian dengan Jurnal Manual pada akhir tahun 2024. Nilai ini merupakan sisa Piutang Pendapatan dari Kontribusi tetap dari KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PKRL (622145) selama 30

tahun. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan CaLK Neraca akun Piutang PNBPN.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penyetoran atas kontribusi tetap P. Nipa secara tepat waktu, namun seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, penyesuaian pada akun Piutang Jangka Panjang Lainnya dilakukan pada akhir tahun 2024 sehingga pada akhir tahun nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berkurang sebesar nilai setoran tahun ini. Pada Laporan Keuangan 2023 sempat berpindah akun menjadi Piutang PNBPN dikarenakan kewajiban untuk menginput pada Modul Piutang. Namun pada Laporan Keuangan *Audited* 2023 saldo Piutang tersebut dipindahkan kembali ke Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Dikarenakan terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025, maka pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2024 ini yaitu Rp1.190.351.664,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Tabel C.22. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30-Jun-25	31-Dec-24	Naik/ Turun %
Piutang Jangka Panjang Lainnya	98.155.639.556	98.155.639.556	0,00
Jumlah	98.155.639.556	98.155.639.556	0,00

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp(490.778.189)*

C.12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya (1569) 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(490.778.189,00) dan Rp(503.574.469,00) atau terdapat penurunan nilai sebesar 2,61% sesuai dengan nilai Piutang Jangka Panjangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar 5/1000 dalam hal ini atas KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PKRL (622145).

Tabel C.23. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	30-Jun-25	31-Dec-24	Naik/ Turun %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	490.778.189	490.778.189	0,00
Jumlah	490.778.189	490.778.189	0,00

Tanah

Rp328.758.991.227

C.13. Tanah

Saldo awal tanah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna periode Tahunan per 1 Januari 2025 seluas 3.109.405 m² dengan nilai sebesar Rp308.545.890.024,00. Mutasi tambah seluas 4.960.419 m² dengan nilai keseluruhan sebesar Rp130.559.388.375,00 dan mutasi kurang sebanyak 24.000 m² sebesar Rp110.346.287.172,00 sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 seluas 4.742.025 m² dengan nilai sebesar Rp328.758.991.227,00. Penjelasan rinci terkait mutasi Tanah terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.24. Rincian Mutasi Tanah

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	308.545.890.024
MUTASI TAMBAH	130.559.388.375
Pengembangan Nilai Aset Langsung	0
Pembelian	0
Koreksi Nilai Bertambah	0
Perolehan Lainnya	500.800.000
Hibah Masuk	36.698.203
Transfer Masuk	0
Perubahan dari Aset Kemitraan ke BMN	110.346.287.172
Saldo awal	19.675.603.000
MUTASI KURANG	(110.346.287.172)
Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Perubahan BMN ke PI	(110.346.287.172)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
Transfer Keluar	0
Saldo Akhir Per 30 Jun 2025 (Rp)	328.758.991.227

Penjelasan mutasi tambah tanah sebagaimana tabel tersebut di atas adalah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat Hibah Masuk pada Satker BKKPN Kupang berupa 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 750 m² dengan

nilai sebesar Rp36.698.203,00 yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao seluas 750 m² sesuai BAST Nomor : 000.232/1249/BKA/2023 tanggal 28 November 2023;

- 2) Terdapat transaksi Perubahan Aset Kemitraan ke BMN berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah seluas 24.000 m² dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- 3) Terdapat transaksi Perolehan Lainnya berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 2 Bidang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp500.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 1 Bidang yang berlokasi di Pulau Batek, Desa Netemnanu Utara, Kec. Amfoang Timur, Kab. Kupang, Prov. NTT dengan nilai perolehan sebesar Rp250.800.000,00;
 - b. Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 1 Bidang yang berlokasi di Pulau Manggudu, Desa Prai Salura, Kec. Karera, Kab. Sumba Timur, Prov. NTT dengan nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,00.
- 4) Terdapat transaksi Saldo Awal lingkup Direktorat Jenderal PKRL seluas 4.606.969 m² dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.675.603.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Transaksi Saldo Awal pada Satker Setditjen PKRL berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT) sebanyak 15 bidang dengan luas 4.606.834 m² dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.257.219.000,00. Transaksi Saldo Awal berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan (Tanah PPKT), sebanyak 14 bidang tersebut di atas, dilakukan karena keberadaan data dukung/dokumen tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tabel C.24.1;
 - b. Transaksi Saldo Awal pada Satker BPSPL Denpasar berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebanyak 1 bidang dengan total luas

sebesar 135 m² dengan sebesar Rp1.418.384.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp152.467.040,00, kenaikan tersebut berdasarkan hasil penilaian oleh KPKNL Sidoarjo Nomor Lap-0320/1/PRO-01/KNL.1/2/01.01.11/2024 sesuai nilai NJOP tanah disekitarnya yaitu Tanah Kantor Pemerintah tersebut digunakan sebagai kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur yang berlokasi di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, transaksi Saldo Awal dilakukan karena pada tahun 2022 pencatatan tanah tersebut masih tergabung dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 02.

Penjelasan mutasi kurang tanah sebagaimana tabel tersebut di atas adalah dengan rincian sebagai berikut : Terdapat transaksi Perubahan dari BMN ke Properti Investasi berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah seluas 24.000 m² dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00, hal tersebut dilakukan juga sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi.

*Peralatan dan Mesin
Rp122.723.219.023*

C.14. Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel periode per 1 Januari 2025 sebanyak 11.955 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp125.006.191.641,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 1.357 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp15.060.059.156,00 dan mutasi kurang sebanyak 1.552 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.047.029.231,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 sebanyak 11.913 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp122.723.219.023,00. Adapun uraian transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang saldo pada akun Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.25. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	122.993.161.716
MUTASI TAMBAH	15.060.059.156
Likuidasi Masuk	259.925.800
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.899.000
Penggunaan Kembali BMN yg Sudah Dihentikan	57.847.720
Saldo Awal	14.988.500
Pembelian	13.255.235.559
Pengembangan Nilai Aset Langsung	263.993.000
Perolehan Lainnya	111.084.660
Reklasifikasi Masuk	617.945.617
Transfer Masuk	477.139.300
MUTASI KURANG	(13.047.029.231)
Hibah Keluar	(259.925.800)
Koreksi Pencatatan	(198.800.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(111.084.660)
Penghapusan	(966.568.950)
Penghentian Aset dari Penggunaannya	(9.284.994.720)
Reklasifikasi Keluar	(716.782.617)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(224.948.000)
Transfer Keluar	(1.023.998.684)
Likuidasi Keluar	(259.925.800)
Saldo Akhir Per 30 Juni 2025 (Rp)	125.006.191.641

Rincian mutasi tambah Peralatan dan Mesin

- 1) Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 1.187 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.255.235.559,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.26. Rincian Satker Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin

No	Nama Satker	Nilai	Jumlah
1	BPSPL DENPASAR	878.592.590	126
2	BPSPL MAKASSAR	1.736.950.472	90
3	BPSPL PONTIANAK	695.970.822	37
4	LPSPL SERANG	399.765.131	60
5	LPSPL SORONG	1.145.488.109	81
6	BPSPL PADANG	562.621.593	80
7	BKKPN KUPANG	501.880.000	22
8	PKPB Dit. JASA KELAUTAN	369.340.000	22
9	PKPB Dit. KKHL	1.054.761.150	96
10	PKPB Dit. PRL	1.384.150.000	118
11	PKPB Dit. P4K	773.137.652	47
12	SETDITJEN PRL	3.752.578.040	408
	TOTAL	13.255.235.559	1.187

- 2) Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset Langsung pada LKKPN Pekanbaru berupa mesin Kapal Pengawas Perikanan NUP 3 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp263.993.000,00, dengan rincian berupa penambahan 1 (satu) Yamaha 200 PK Mesin Tempel 200A ETX dan 1 (satu) Yamaha Generator Set EF 5500 EW berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor 72/LKKPN/PPK.E-Purchasing/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 101/LKKPN.PPK.E-Purchasing/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta penambahan wiper dan kaca kapal senilai Rp6.993.000,00;
- 3) Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Satker LKPPN Pekanbaru berupa Note Book yang berasal dari Koreksi Pencatatan berupa Software dengan nilai sebesar Rp1.899.000,00;
- 4) Terdapat transaksi Perolehan Lainnya pada Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang sebanyak 12 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp111.084.660,00 hal tersebut dilakukan terkait penertiban penatausahaan Barang Milik Negara, akibat kesalahan pencatatan kuantitas dan nilai barang pada Modul Komitmen;

Tabel C.27. Transaksi Perolehan Lainnya pada satker LPSPL Serang

No	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Selam seet	102.796.000	4
2	Kursi Besi/Metal	6.000.000	6
3	Kursi Zeis	2.288.660	2
	TOTAL	111.084.660	12

- 5) Terdapat transaksi Likuidasi Masuk pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Jenis Kewenangan Tugas Pembantuan), yang berasal dari Satker Off (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Jenis Kewenangan Dekonsentrasi) berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 27 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp259.925.800,00, hal tersebut dilakukan dikarenakan perubahan Kebijakan Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.28. Transaksi Likuidasi Masuk pada satker Dinas KP Prov. Kaltim

No	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	3.973.000	1
2	Camera Digital	3.500.000	1
3	Camera Electronic	5.000.000	1
4	Camera Video	20.289.300	1
5	Compressor	64.000.000	1
6	Conductivity Meter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	2.350.000	1
7	Disolved Oksigen Analyzer	18.500.000	1
8	Disolved Solid Mater Por (Alat Laboratorium Klimatologi)	1.342.500	1
9	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	18.000.000	1
10	GPS Receiver	10.000.000	1
11	Komputer Unit Lainnya	1.661.000	2
12	Note Book	80.500.000	8
13	PH Meter (Alat Ukur Universal)	14.250.000	2
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11.000.000	3
15	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	5.560.000	2
	Jumlah	259.925.800	27

- 6) Terdapat transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp57.847.720,00, dengan rincian satker sebagai berikut :
- Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jenis Kewenangan Dekonsentrasi (DK) dengan nilai keseluruhan sebesar

Rp25.634.000,00, hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk dilakukan transfer Masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jenis Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) dan selanjutnya untuk proses hibah lebih lanjut dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

- Setditjen PKRL dengan nilai keseluruhan sebesar Rp32.213.720,00
- 7) Terdapat transaksi Transfer Masuk sebanyak 49 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp477.139.300,00, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Satker BPSPL Denpasar sebanyak 32 unit Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp370.928.208,00, dengan rincian:
 - i. Berupa Mini Bus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp167.101.500,00 yang berasal dari Satker Setditjen PKRL;
 - ii. Berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp28.900.000,00 yang berasal dari Satker BPSPL Makassar;
 - iii. Berupa Meubelair sebanyak 30 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp174.926.708,00, yang berasal dari Satker Setditjen PKRL;
 - b. BPSPL Makassar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp20.699.000,00, yang berasal dari Satker BPSPL Denpasar;
 - c. LPSPL Serang berupa 6 unit Kursi untuk Kantor Gerai Layanan yang berlokasi di Prov. Yogyakarta yang berasal dari Setditjen PKRL dengan nilai keseluruhan Rp20.790.000,00;
 - d. Setditjen PKRL berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 10 unit dengan nilai keseluruhan Rp64.722.092,00, hal tersebut dilakukan karena barang-barang yang sudah terlanjur diserahkan/ditransfer keluar ke BPSPL Denpasar adalah barang-barang pengadaan untuk Kantor CTI Manado, akhirnya barang-barang senilai Rp64.722.092,00 tersebut dibalikin/ditransfer masuk lagi ke Setditjen PKRL.
- 8) Terdapat transaksi Saldo Awal pada lingkup Ditjen PKRL sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp14.988.500,00, dengan rincian sebagai berikut :
- BPSPL Makassar berupa Timbangan Barang sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan Rp6.488.500,00
 - PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Papan Gambar sebanyak 1 unit dengan nilai Rp8.500.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat

pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B. 1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)

- 9) Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp617.945.617,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Setditjen PKRL berupa 1 unit Mobil Jeep dengan nilai sebesar Rp534.000.000,00, hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terdapat kesalahan Kode Barang yaitu dicatat sebagai Mini Bus menjadi Jeep
 - PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Rambu-rambu Lalu Lintas Laut Lainnya dengan nilai Rp49.950.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 dicatat sebagai Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya (Surat Keterangan Nomor : B. 1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)
 - LPSPL Sorong berupa Camera Digital dengan nilai sebesar Rp33.995.617,00, hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terdapat kesalahan Kode Barang, yaitu dicatat sebagai Kamera Digital.

Rincian mutasi kurang Peralatan dan Mesin

- 1) Terdapat transaksi Reklasifikasi Aset ke Barang Persediaan pada Satker BPSPL Makassar sebanyak 11 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp224.948.000,00, hal tersebut dilakukan karena kesalahan pemilihan akun pada Modul Komitmen, yang seharusnya adalah realisasi anggaran belanja Barang Persediaan 526 untuk diserahkan kepada Masyarakat, namun dicatat sebagai Aset Tetap (Peralatan dan Mesin);
- 2) Koreksi Pencatatan pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Alat Kantor Lainnya yang berlokasi Pulau Cemara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah senilai Rp198.800.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B.1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024);
- 3) Terdapat transaksi Likuidasi Keluar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Kewenangan Dekonsentrasi (Satker Off) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jenis Kewenangan Tugas Pembantuan, berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 27 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp259.925.800,00;

Tabel C.29. Transaksi Likuidasi Keluar pada satker Dinas KP Prov. Kaltim

No	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	3.973.000	1
2	Camera Digital	3.500.000	1
3	Camera Electronic	5.000.000	1
4	Camera Video	20.289.300	1
5	Compressor	64.000.000	1
6	Conductivity Meter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	2.350.000	1
7	Disolved Oksigen Analyzer	18.500.000	1
8	Disolved Solid Mater Por (Alat Laboratorium Klimatologi)	1.342.500	1
9	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	18.000.000	1
10	GPS Receiver	10.000.000	1
11	Komputer Unit Lainnya	1.661.000	2
12	Note Book	80.500.000	8
13	PH Meter (Alat Ukur Universal)	14.250.000	2
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11.000.000	3
15	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	5.560.000	2
	Jumlah	259.925.800	27

- 4) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada Satker LPSPL Serang sebesar Rp111.084.660,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.30. Rincian Aset Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang LPSPL Serang

No.	Nama Barang	Nilai	Jumlah
1	Alat Selam Seet	(102.796.000)	0
2	Kursi Besi/Metal	(6.000.000)	0
3	Kursi Zeis	(2.288.660)	0
	JUMLAH	(111.084.660)	0

Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen berupa Alat Selam Seet, tercatat 1 unit yang seharusnya secara kuantitas sebanyak 5 unit, Kursi Besi/Metal tercatat 1 unit yang seharusnya secara kuantitas sebanyak 7 unit, dan berupa Kursi Zeis tercatat 1 unit yang seharusnya secara kuantitas sebanyak 3 unit, dan sebagai data dukung Surat Keterangan Nomor : 2547/LPSPL.2/PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN.

- 5) Terdapat Transfer Keluar sebanyak 40 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.023.998.684,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Transfer Keluar pada Satker BPSPL Makassar kepada BPSPL Denpasar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar

- Rp28.900.000,00;
- ii. Transfer Keluar pada Satker BPSPL Denpasar berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 11 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp85.421.092,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Transfer Keluar kepada Satker BPSPL Makassar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai Rp20.699.000,00;
 - b) Transfer Keluar kepada Satker Setditjen PKRL sebanyak 10 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp64.722.092,00
 - iii. Transfer Keluar dari PKPB Direktorat KKHL kepada BPPSDMKP berupa Mini Bus sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp299.318.500,00;
 - iv. Terdapat Transfer Keluar berupa Mini Bus dari Satker Setditjen PKRL kepada pada Satker BPSPL Denpasar, sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp176.101.500,00,00;
 - v. Transfer Keluar dari Satker Setditjen PKRL kepada BPPSDMKP berupa Mini Bus sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp322.940.500,00
 - vi. Setditjen PKRL berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 25 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp601.859.092,00, dengan rincian :
 - a) Berupa Mini Bus sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp499.042.000,00 dengan rincian :
 - Transfer keluar kepada Satker BPSPL Denpasar sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp167.101.500,00;
 - Transfer keluar kepada BPPSDMKP sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp331.940.500,00
 - b) Berupa Meubelair sebanyak 22 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp102.817.092,0
- 6) Hibah Keluar pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 27 unit nilai keseluruhan sebesar Rp259.925.800,00;
 - 7) Reklasifikasi Keluar sebanyak sebanyak 3 unit nilai keseluruhan sebesar Rp716.782.617,00, dengan rincian :
 - LPSPL Sorong berupa Kamera Digital sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp33.995.617,00
 - PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebanyak 1 unit dengan sebesar Rp148.787.000,00

- Setditjen PKRL berupa Mini Bus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp534.000.000,00
- 8) Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 1.284 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp9.284.994.720,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.31. Rincian Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	BAPPEDA Provinsi Riau	(329.661.000)	(38)
2	PKPB Dit. KEPB	(764.916.160)	(48)
3	PKPB Dit. PRL	(3.695.554.000)	(296)
4	PKPB Dit. P4K	(1.783.859.121)	(368)
5	BPSPL Makassar	(45.280.000)	(3)
6	LKKPN Pekanbaru	(325.351.930)	(94)
7	LPSPL Serang	(65.176.500)	(4)
8	PKPB Dit. Jaskel	(2.194.857.009)	(427)
9	Setditjen PKRL	(80.339.000)	(6)
	Jumlah	(9.284.994.720)	(1.284)

- 9) Penghapusan BMN sebanyak 1.043 unit nilai keseluruhan sebesar Rp966.568.950,00 dengan rincian sebagai berikut :
- PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 65 unit nilai keseluruhan sebesar Rp611.349.800,00
 - PKPB BAPPEDA Provinsi Gorontalo berupa Peralatan Inventaris Kantor sebanyak 97 unit nilai keseluruhan sebesar Rp355.219.150,00

Gedung dan
Bangunan
Rp90.736.630.532

C.15. Gedung dan Bangunan

Saldo awal per 1 Januari 2025 pada Gedung dan Bangunan sebanyak 107 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp86.958.983.679,00. Sampai dengan periode Tahunan TA. 2024 terdapat mutasi tambah sebanyak 26 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.754.590.017,00 dan mutasi kurang sebanyak 25 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.976.943.164,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 sebanyak 108 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp90.736.630.532,00. Berikut mutasi tambah dan mutasi kurang Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel C.32. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	86.958.983.679
MUTASI TAMBAH	6.754.590.017
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	414.991.086
Pengembangan Melalui KDP	2.054.735.385
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	535.318.140
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.837.630.819
Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	9.107.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	363.810.587
Saldo Awal	529.890.000
Perubahan Properti Investasi ke BMN	9.107.000
MUTASI KURANG	(2.976.943.164)
Perubahan BMN Ke Properti Investasi	(9.107.000)
Koreksi Pencatatan	(257.821.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(636.926.401)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.774.831.763)
Reklasifikasi Keluar	(59.057.000)
Transfer Keluar	(239.200.000)
Saldo Akhir Per 30 Jun 2025 (Rp)	90.736.630.532

Rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan

a. Terdapat transaksi Koreksi Nilai Tambah sebesar Rp363.810.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Satker BPSPL Makassar, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terhadap Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp199.800.000,00, sesuai Surat Keterangan Nomor : 1262.A/ BPSPL.3/ PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan Perolehan/Penambahan KDP atas pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen, sehingga pada saat penyelesaian Pembangunan dengan KDP membentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP baru;
- 2) Satker LPSPL Serang, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terhadap Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp58.021.000,00, nilai bertambah tersebut berasal dari transaksi Koreksi Pencatatan Kanopi;
- 3) Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terhadap Rumah Negara Golongan I Tipe

D Permanen sebesar Rp105.989.587,00, yang berasal Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523), berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B. 1215/LPSPL.1/PL.760/XII/2024 tanggal 30 Juni 2025

- b. Transaksi Pengembangan Melalui KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.054.735.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker LKKPN Pekanbaru, yaitu pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp49.868.415,00
 - 2) Satker BPSPL Pontianak, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp168.260.000,00
 - 3) Satker BPSPL Makassar, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 dengan nilai sebesar Rp214.500.000,00
 - 4) Satker BKKPN Kupang, yaitu pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp49.868.415,00
 - 5) PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu pekerjaan Renovasi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp1.472.106.970,00
- c. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai keseluruhan sebesar Rp414.991.086,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada Satker LKKPN Pekanbaru berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp347.355.086,00
 - 2) BPSPL Denpasar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp27.736.000,00
 - 3) BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai sebesar Rp39.900.000,00
- d. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan pada PKPB Direktorat P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp535.318.140,00. Hal tersebut dilakukan karena pada waktu mau melakukan proses penghapusan pada Aplikasi SAKTI, diketahui bahwa aset-aset sebagaimana tersebut di atas ternyata masih dalam kondisi Baik, sehingga harus dilakukan proses Penggunaan Kembali, kemudian baru bisa dilakukan proses perubahan dari kondisi Baik menjadi Rusak Berat;
- e. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.837.630.819,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Satker BPSPL Makassar, yaitu berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 01 (pekerjaan renovasi ruang pelayanan Gedung Kantor) dengan nilai sebesar Rp199.800.000,00
 - 2) Satker LKKPN Pekanbaru, yaitu berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Kantor Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh) yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat, dengan nilai sebesar Rp2.637.830.819,00
- f. Perubahan Aset Kemitraan ke BMN pada Satker Setditjen PKRL yang berlokasi di Pulau Nipa yang menjadi objek Properti Investasi berupa Bangunan Lainnya (Tugu/Prasasti) sebesar Rp9.107.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB. 179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- g. Saldo Awal sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp529.890.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) BPSPL Denpasar berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp265.090.000,00
 - 2) PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Aset yang berlokasi di Pulau Cemara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp239.200.000,00 berupa Gazebo, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Terbuka Lainnya masing-masing 1 unit. Penjelasan transaksi Saldo Awal, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang, sebagai dasar perubahan pencatatan adalah Berita Acara Inventarisasi, dan Surat Keterangan Nomor : B. 1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024
- h. Reklasifikasi dari Properti Investasi ke BMN berupa Bangunan Lainnya yang berlokasi di Pulau Nipa-Kota Batam sebesar 9.107.000,00.

Rincian mutasi kurang Gedung dan Bangunan

- a. Koreksi Pencatatan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp257.821.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada Satker BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp199.800.000,00, hal tersebut karena salah pencatatan Perolehan KDP atas Renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen, sehingga pada saat penyelesaian Pembangunan dengan

KDP membentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP baru, atas hal tersebut maka dilakukan koreksi pencatatan

- 2) Pada Satker LPSPL Serang berupa Kanopi dengan nilai sebesar Rp58.021.000,00, dan sudah Kapitalisasi/Penambah ke Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K dengan nilai keseluruhan sebesar Rp636.926.401,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Bangunan Pabrik Es, Rumah Sederhana, dan Rumah Khusus;
- c. Terdapat transaksi Perubahan dari BMN ke Properti Investasi berupa Bangunan Lainnya dengan nilai sebesar Rp9.107.000,00. Hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- d. Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.774.831.763,00, dengan rincian satker sebagai berikut :
 - PKPB Direktorat Jasa Kelautan berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya dengan nilai sebesar Rp74.500.000,00. Hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan jumlah maupun Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B.1906/DJPKRL.1/PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)
 - BPSPL Denpasar dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.697.122.222,00
 - 1) Berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dengan nilai sebesar Rp418.418.222,00, hal tersebut dilakukan dikarenakan secara substansi jumlah terdiri dari 3 petak bangunan, namun sebelumnya pada saat pencatatan perolehan dicatat dalam satu unit Rumah Negara
 - 2) Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 02, yang berasal dari Kementerian Keuangan RI yang berlokasi di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp1.278.704.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2022 pencatatan nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen tersebut masih tergabung dengan Tanah

- BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen dengan nilai sebesar Rp3.209.541,00, hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil Audit Kinerja Inspektorat III KKP, T.152/ITJ/HP.110/IV/2024 pada BPSPL Makassar bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushollah) senilai Rp.3.209.541,00, (Surat Keterangan Nomor : NOMOR B. 1549/BPSPL.3/KP.120/VIII/2024), tanggal 6 Agustus 2024
- e. Terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai sebesar Rp49.950.000,00, hal tersebut dilakukan karena pada saat pencatatan perolehan tahun 2018 terdapat kesalahan Kode Barang (Surat Keterangan Nomor : B. 1906/ DJPKRL.1/ PL.110/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024)
- f. Terdapat transaksi Transfer Keluar pada Satker Setditjen PKRL berupa Bangunan Lainnya, yaitu aset berlokasi di Pulau Nipa-Kota Batam dengan nilai sebesar Rp9.107.000,00, hal tersebut dilakukan Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : KPB. 310/DJPKRL.1/PL.760/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sebagai tindak lanjut atas Hasil Reviu APIP atas Laporan Keuangan KKP untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, terdapat kesalahan Kode Barang berupa Aset Tetap (Properti Investasi)

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.616.970.810

C.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Keuangan Semester I per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp12.616.970.810,00. Jumlah tersebut terdiri atas Jalan dan Jembatan sebesar Rp7.094.333.844,00, Irigasi sebesar Rp4.234.153.463,00, dan Jaringan sebesar Rp1.288.483.503,00. Terdapat penurunan nilai jika dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 *Audited*. Rincian terhadap akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jalan dan Jembatan

Saldo awal Jalan dan Jembatan pada Laporan Keuangan per 1 Januari 2025 senilai Rp7.923.125.327,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp13.121.507.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp13.950.298.483,00 sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 untuk Jalan dan Jembatan senilai keseluruhan sebesar Rp7.094.333.844,00. Tidak ada pagu anggaran untuk

akun Jalan dan Jembatan pada TA. 2025 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.33. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	7.923.125.327
MUTASI TAMBAH	13.121.507.000
Pengembangan melalui KDP	0
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	13.121.507.000
MUTASI KURANG	(13.121.507.000)
Transfer Keluar	(0)
Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	(13.121.507.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(828.791.483)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	7.094.333.844

Terdapat transaksi Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB. 179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi.

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi Perubahan BMN ke Aset Kemitraan pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Jalan dan Jembatan.

Selain itu, Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K berupa Jalan Lainnya dengan nilai sebesar Rp828.791.483,00. Saat ini sudah diusulkan permohonan persetujuan penghapusan karena sebab-sebab lain ke Biro Keuangan KKP.

Irigasi

Saldo awal Irigasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel per 1 Januari 2025 senilai Rp4.234.153.463,00, periode Semester I TA. 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp92.079.770.860,00 dan mutasi kurang sebesar Rp92.079.770.860,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 senilai keseluruhan sebesar Rp4.234.153.463,00. Tidak ada pagu anggaran untuk

akun Irigasi pada TA. 2025 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.34. Rincian Mutasi Irigasi

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	4.234.153.463
MUTASI TAMBAH	92.079.770.860
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	90.754.497.000
Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan	1.325.273.860
MUTASI KURANG	(92.079.770.860)
Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	(90.754.497.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.325.273.860)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	4.234.153.463

Rincian mutasi tambah Irigasi :

- a. Terdapat transaksi Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB. 179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, dan sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;
- b. Terdapat transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan pada PKPB Direktorat P4K sebanyak 12 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.325.273.860,00, Hal tersebut dilakukan karena pada waktu mau melakukan proses penghapusan pada Aplikasi SAKTI, diketahui bahwa aset-aset sebagaimana tersebut di atas ternyata masih dalam kondisi Baik, sehingga harus dilakukan proses Penggunaan Kembali, kemudian baru bisa dilakukan proses perubahan dari kondisi Baik menjadi Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Berupa Bangunan Pelimpah Sampah sebanyak 7 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp138.000.000,00;
 - 2) Berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.108.069.000,00, dan;
 - 3) Berupa Bangunan Mandi Cuci/Kakus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar 79.204.860,00,

Rincian mutasi kurang Irigasi :

- a. Terdapat transaksi Perubahan BMN ke Aset Kemitraan pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000, hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Irigasi;
- b. Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K sebanyak 12 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.325.273.860,00, berupa Bangunan Pelimpah Sampah, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.108.069.000,00;
 - 2) Berupa Bangunan Mandi Cuci/Kakus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar 79.204.860,00 dan
 - 3) Berupa Bangunan Pelimpah Sampah sebanyak 7 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp138.000.000,00.

Jaringan

Saldo awal Jaringan pada Laporan Keuangan per 1 Januari 2025 senilai Rp1.335.050.271,00. Tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang sebesar Rp46.566.768,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 untuk Jaringan sebesar Rp1.288.483.503,00 atau terdapat penurunan yang tidak signifikan dibandingkan saldo 31 Desember 2024 *Audited*. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Jaringan pada TA. 2025 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.35. Rincian Mutasi Jaringan

Saldo Awal per 1 Januari 2025 (Rp)	1.335.050.271
MUTASI TAMBAH	0
Pengembangan melalui KDP	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
MUTASI KURANG	(46.566.768)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(46.566.768)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	1.288.483.503

Terdapat transaksi Penghentain Aset dari Penggunaan pada PKPB Direktorat P4K berupa Instalasi Pengaman Lainnya dengan nilai sebesar Rp46.566.768,00. Hal ini sudah diusulkan surat permohonan persetujuan penghapusan karena sebab-sebab lain ke Biro Keuangan KKP.

Aset Tetap Lainnya
Rp129.293.869.571

C.17. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 senilai Rp129.293.869.571,00 terdiri atas Aset Tetap Renovasi (135111) sebesar Rp0,00 dan Aset Tetap Lainnya (135121) sebesar Rp129.293.869.571,00. Terdapat penurunan yang tidak signifikan nilai antara 30 Juni 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 *Audited* pada akun Aset Tetap Lainnya Ditjen PKRL dimana sebelumnya sebesar Rp129.357.185.571,00.

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebesar Rp0,00 dan Rp232.856.000,00 atau terdapat penurunan nilai yang cukup signifikan. Saldo awal akun ini terdapat hanya pada satker pusat Setditjen PKRL. Aset Tetap Renovasi terdapat pada Gedung Mina Bahari II yang merupakan aset dari Kementerian Keuangan dan telah dilakukan Transfer Keluar.

Tabel C.36.1 Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi

Saldo Awal per 1 Januari 2025 (Rp)	232.856.000
MUTASI TAMBAH	232.856.000
Batal Transfer Keluar	232.856.000
Reklasifikasi Masuk	232.856.000
MUTASI KURANG	(465.712.000)
Transfer Keluar	(465.712.000)
Reklasifikasi Keluar	(232.856.000)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	0

Gedung tersebut ditempati oleh Direktorat Jasa Kelautan yang berlokasi di GMB II (Gedung Lukman Hakim) Lantai 2 milik Kementerian Keuangan. Adapun kronologi terkait Aset Tetap Renovasi (ATR) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Renovasi Ruangan pertama Tahun 2021 dengan nilai ATR sebesar Rp148.000.000,00, dengan Nomor BAST : 78/PPK-JK/XI/2021 tanggal 25 November 2021;
- Pekerjaan Renovasi Ruangan Kedua Tahun 2022 dengan nilai ATR sebesar Rp84.856.000,00 dengan Nomor BAST : 3512/DJPR.1/PPK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022;
- Sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.3268/SJ.2/HP.310/VIII/2023 tanggal 23

Agustus 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Setditjen PKRL mengirim surat kepada Kepala Biro Umum dan PBJ dalam bentuk Nota Dinas Nomor : B.5270/DJPKRL.1/PL.750/IX2024 tanggal 4 September 2024 tentang Penyerahan BMN berupa Aset Tetap Renovasi pada Satker Setditjen PKRL yang digunakan oleh Direktorat Jasa Kelautan yang berlokasi di GMB II (Gedung Lukman Hakim) Lantai II.

Mutasi Tambah yaitu berasal dari transaksi Batal Transfer Keluar berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi kepada Biro Umum Kementerian Keuangan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp232.856.000,00, hal tersebut dilakukan disebabkan Kementerian Keuangan selaku obyek penerima ATR tidak bersedia melakukan Transfer Masuk, dikarenakan ketidaksesuaian Kode Barang, yang seharusnya Kode Barang adalah Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi. Selain itu juga terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk senilai Rp232.856.000,00 dari sebelumnya Nama Barang Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi (Kode Barang 6070501001) menjadi Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi (Kode Barang 6070301001) karena kesalahan pemilihan kode barang pada saat pencatatan Tahun 2021.

Mutasi Kurang yaitu berasal dari transaksi Transfer Keluar Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi dan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi masing-masing sebesar Rp232.856.000,00. Selain itu juga terdapat transaksi Reklasifikasi Keluar dengan nilai dan keterangan yang sama dengan transaksi Reklasifikasi Masuknya.

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025 pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel sebanyak 137.576 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp129.359.185.571,00. Tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 sebesar 137.572 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp129.357.185.571,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.36.2 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)	129.359.185.571
MUTASI TAMBAH	0
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
Opname Fisik	0
MUTASI KURANG	(2.000.000)
Persediaan Dalam Proses Keluar	(2.000.000)
Habis Pakai	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo Akhir per 30 Jun 2025 (Rp)	129.357.185.571

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB Dit. PRL berupa Aset Tetap Lainnya (Bahan Kartografi Lainnya) sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 1 Januari 2025 pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel senilai Rp492.149.864,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp5.343.516.826,00 dan mutasi kurang sebesar Rp5.835.666.690,00 sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 senilai Rp0,00. Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo KDP terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.37. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal per 1 Jan 2025	0
MUTASI TAMBAH	5.343.516.826
Perolehan/Penambahan KDP	627.523.842
Pengembangan KDP	4.264.842.362
Koreksi Nilai KDP Bertambah	451.150.622
MUTASI KURANG	(5.835.666.690)
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	(2.837.630.819)
Pengembangan Melalui KDP	(2.054.735.385)
Penghapusan/Penghentian KDP	(477.649.864)
Koreksi Pencatatan KDP	(465.650.622)
Saldo Akhir Per 30 Jun 2025	-492.149.864

Rincian mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Terdapat transaksi Perolehan/Penambahan KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp627.523.842,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker BPSPL Makassar dengan nilai total sebesar Rp11.000.000,00 dengan rincian Rp6.000.000,00 berupa pekerjaan Perluasan/Renovasi Ruang Rapat dan Rp5.000.000,00 berupa pekerjaan Perluasan/Renovasi Ruang Pelayanan;
 - 2) Satker BPSPL Pontianak dengan nilai sebesar Rp19.856.000,00, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan;
 - 3) Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp24.679.612,00 yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan;
 - 4) PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp561.488.230,00 yaitu pekerjaan Renovasi Gudang BMKT (Cileungsi, Kabupaten Bogor).
- b. Pengembangan KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.264.842.362,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Satker BPSPL Makassar dengan nilai sebesar Rp403.300.000,00, yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1;
 - 2) Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp2.663.019.622,00, yaitu pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 01 senilai Rp2.637.830.819,00 yang mana diperuntukkan untuk kantor pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat;
 - 3) BPSPL Pontianak yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan Gedung Kantor sebesar Rp148.404.000,00;
 - 4) PKPB Direktorat Jasa Kelautan, pekerjaan renovasi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp910.618.740,00;
 - 5) BKKPN Kupang dengan nilai sebesar Rp139.500.000,00 yaitu pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan Gedung Kantor.
- c. Terdapat Koreksi Nilai KDP Bertambah pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp451.150.622,00

Rincian mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan :

- a. Transaksi Penghapusan/Penghentian KDP pada Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp477.649.864,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Satker LKKPN Pekanbaru yang rencana dibangun di Pulau Pieh sebanyak 1 NUP dengan nilai sebesar Rp202.860.929,00;
 - 2) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Satker LKKPN Pekanbaru yang rencana dibangun di Kepulauan Anambas sebanyak 1 NUP dengan nilai sebesar Rp274.788.935,00
- b. Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan nilai keseluruhan Rp2.837.630.819,00, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar berupa pekerjaan Ruang Pelayanan Gedung Kantor dengan nilai sebesar Rp199.800.000,00;
 - 2) Pada Satker LKKPN Pekanbaru dengan sebesar Rp2.637.830.819,00, yaitu Penyelesaian Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Kantor Pelayanan) Kawasan Konservasi Pulau Pieh yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat)
- c. Transaksi Pengembangan Melalui KDP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.054.735.385,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Satker BPSPL Pontianak dengan nilai sebesar Rp168.260.000,00 atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1;
 - 2) Satker BPSPL Makassar dengan nilai sebesar Rp214.500.000,00 atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1;
 - 3) Satker LKKPN Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp49.868.415,00 pekerjaan pengembangan Bangunan Gedung Kantor Lainnya, (Kantor Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh) yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat);
 - 4) PKPB Direktorat Jasa Kelautan yaitu pengembangan atas pekerjaan renovasi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp1.622.106.970,00, yang berlokasi di Gudang BMKT Cileungsi-Kabupaten Bogor.
- d. Koreksi Pencatatan KDP pada Satker BPSPL Pontianak dengan nilai sebesar Rp14.500.000,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : B.4037/BPSPL.2/PL.750/XI/2024 tanggal 18 November 2024 antara

Kepala BPSPL Pontianak dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan serta pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp451.150.622,00.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(114.990.543.618)*

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (137XXX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(110.273.396.926,00) dan Rp(107.252.414.395,00).

Terdapat kenaikan nilai antara 30 Juni 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 *Audited* pada akun Penyusutan Aset Tetap Ditjen PKRL. Hal ini dikarenakan adanya transaksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan pada beberapa satker, sehingga secara otomatis juga terjadi penambahan Akumulasi Penyusutan aset tersebut. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per satker dan keterangan terkait transaksi mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dijelaskan pada Laporan BMN per 30 Juni 2025 atau pada periode Semester I 2025 dikarenakan penyusutan dilakukan per Semester.

*Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Rp103.876.004.000*

C.20. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Awal Aset Kemitraan per 1 Januari 2025 sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp214.231.398.172,00. Periode Semester I TA. 2025 terdapat mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp103.876.004.000 dan mutasi kurang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp214.231.398.172,00, sehingga saldo per 30 Juni 2025 untuk Aset Kemitraan Pihak Ketiga sebesar 2 unit senilai sebesar Rp103.876.004.000,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.38. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Awal per 1 Jan 2025	214.231.398.172
MUTASI TAMBAH	103.876.004.000
Perubahan dari BMN ke Aset Kemitraan	103.876.004.000
Pengembangan Aset Kemitraan	0
MUTASI KURANG	(214.231.398.172)
Perubahan dari Aset Kemitraan ke Properti Investasi	(214.231.398.172)
Pengembangan Aset Kemitraan	0
Saldo Akhir Per 30 Jun 2025	103.876.004.000

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen PKRL terdapat pada satker Setditjen PKRL yang merupakan nilai aset yang dikerjasamakan dalam KSP P. Nipa. Awalnya aset yang dikerjasamakan berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang senilai Rp110.346.287.172,00, Bangunan Lainnya senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00, dan Tanggul Keliling senilai Rp90.754.497.000,00. Tahun 2024 ini terdapat mutasi diantaranya :

Rincian mutasi tambah Kemitraan Pihak Ketiga

Terdapat transaksi Perubahan dari BMN ke Aset Kemitraan pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 2 unit dengan keseluruhan Rp103.876.004.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000,00. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Irigasi;
- 2) Berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, Hal tersebut dilakukan karena tidak ada Mapping Kode Akun untuk Kode Barang Jalan dan Jembatan.

Rincian mutasi kurang Kemitraan Pihak Ketiga

Terdapat transaksi Perubahan dari Aset Kemitraan ke Properti Investasi pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebanyak 2 unit dengan keseluruhan Rp214.231.398.172,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah ke BMN seluas 24.000 m² dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 yang berlokasi di Pulau Nipa. Hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, serta sebagai tindak lanjut atas Konsep

Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi;

- 2) Berupa Bangunan Lainnya (Tugu/Prasasti) yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp9.107.000,00. Hal tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Nomor : KPB.179/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Asersi Manajemen, serta sebagai tindak lanjut atas Konsep Temuan BPK-RI Nomor : 52/KKP/LK.KKP/04/2024 tanggal 24 April 2024 terkait Properti Investasi.

Sementara nilai penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp46.557.374.318,00. Informasi lengkap terkait dengan KSP P. Nipa terdapat pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Kemitraan Pihak Ketiga.

Aset Tak Berwujud
Rp1.115.000.534

C.21. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (1621XX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL hanya terdiri dari Software (162151) sebesar Rp1.194.618.534,00. Saldo awal per 1 Januari 2025 berupa Software sebanyak 8 unit sebesar Rp1.194.618.534,00. Pada periode Semester I TA. 2025 terdapat mutasi tambah sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp512.777.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp150.686.000,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 sebanyak 10 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.115.000.534,00. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel C.39. Rincian Mutasi Software

Saldo Awal per 1 Januari 2025 (Rp)	832.527.534
MUTASI TAMBAH	512.777.000
Saldo Awal	363.990.000
Reklasifikasi Masuk	148.787.000
MUTASI KURANG	(150.686.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.899.000)
Koreksi Pencatatan	(148.787.000)
Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp)	1.194.618.534

Transaksi mutasi tambah diantaranya :

- a. Transfer Masuk dengan nilai keseluruhan sebesar Rp363.990.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PKPB Direktorat KKKHL berupa Software Komputer yang berasal dari PUSDATIN KKP sejumlah 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp271.535.000,00;
 - 2) PKPB Direktorat Perencanaan Ruang Laut berupa Software Komputer yang berasal dari Pusdatin KKP sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp92.455.000,00
- b. Reklasifikasi Masuk pada PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00
 - 1) Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan pada Satker LKKPN Pekanbaru berupa Software dan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai Lap Top dengan nilai sebesar Rp1.899.000,00;
 - 2) Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Software sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Aset Tak Berwujud.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0*

C.22. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berupa Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga (163139) per 30 Juni 2025 senilai Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah. Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Kementerian Negara/Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas Lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya.

Saldo awal Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga per 1 Januari 2025 senilai Rp411.012.378,00 yang hanya terdapat pada satu satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Kab. Jeneponto. Dana tersebut yang masuk ke rekening penampungan K/L terhadap pekerjaan Integrasi Lahan Pergaraman dan Konsultan Pengawasan Intergrasi Lahan Pergaraman dengan

masa pelaksanaan kontrak tanggal 4 Desember s.d 31 Desember 2024 dan pekerjaan tersebut telah selesai 100%.

Jangka waktu kontrak pada pekerjaan tersebut berakhir di tanggal 31 Desember 2024, sehingga menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Pembayaran terhadap pekerjaan tersebut baru dapat dilaksanakan 9 Januari 2024, sehingga masih memunculkan akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111). Setelah itu dilakukan Jurnal Manual sehingga terdapat akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191). Secara sistem akun Dana Yang Dibatasi Penggunaannya tereliminasi pada TA. 2024 ini.

Aset Lain-Lain
Rp12.498.783.982

C.23. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain senilai Rp12.498.783.982,00 terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (166112) senilai Rp13.782.435.459,00 dan Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) senilai Rp0,00.

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna per 1 Januari 2025 sebanyak 1.627 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp20.458.826.980,00. Mutasi tambah sebanyak 1.540 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.124.553.232,00 dan mutasi kurang sebanyak 1.818 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.800.944.753,00, sehingga saldo akhir per 30 Juni 2025 sebanyak 1.349 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.782.435.459,00. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada akun ini dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 *Audited*. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel C.40 dibawah ini :

Tabel C.40. Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Saldo Awal per 1 Januari 2025 (Rp)	20.458.826.980
MUTASI TAMBAH	12.124.553.232
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	12.124.553.232
MUTASI KURANG	(18.800.944.753)
Pencatatan Barang yg Mau Dihapuskan	(16.785.413.908)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1.918.439.720)
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	(97.091.125)
Saldo Akhir Per 30 Juni 2025 (Rp)	13.782.435.459

Rincian mutasi tambah Penghentian Aset dari Penggunaan :

Penghentian Aset dari Penggunaan Dalam Operasional Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 652 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.124.553.232,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL (PKPB BAPPEDA Prov. Riau, Dit. KEBP, Dit. PRL, Dit. P4K, Dit. Jasa Kelautan, dan Setditjen PKRL), BPSPL Makassar, LPSPL Serang, dan LKKPN Pekanbaru.

Rincian mutasi kurang Penghentian Aset dari Penggunaan

- a. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 1.515 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp16.785.413.908,00 dengan rincian per satuan kerja sebagai berikut :

Tabel C.41. Mutasi Kurang Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	BKKPN Kupang	(1.493.307.935)	(26)
2	BPSPL Padang	(1.460.513.954)	(199)
3	BPSPL Makassar	(887.514.648)	(121)
4	LKKPN Pekanbaru	(199.500.000)	(1)
5	LPSPL Serang	(130.000.000)	(1)
6	PKPB BAPPEDA Provinsi Gorontalo	(21.872.000)	(168)
7	PKPB BAPPEDA Provinsi Riau	(329.661.000)	(38)
8	PKPB Direktorat KKHL	(764.916.160)	(48)
9	PKPB Direktorat PRL	(3.950.004.000)	(311)
10	PKPB Direktorat P4K	(5.272.928.202)	(539)
11	PKPB Direktorat Jasa Kelautan	(2.194.857.009)	(57)
12	Setditjen PKRL	(80.339.000)	(6)
	JUMLAH	(16.785.413.908)	(1.515)

- b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap pada PKPB Direktorat P4K sebanyak 88 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.892.805.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.42. Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

Nama Barang	Nilai Total	Jumlah
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(70.955.000)	(5)
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	(79.204.860)	(1)
Bangunan Pabrik Es	(97.000.000)	(1)
Bangunan Pelimpah Sampah	(138.000.000)	(7)
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	(1.108.069.000)	(4)
Filing Cabinet Kayu	(2.853.375)	(5)
Kursi Besi/Metal	(8.892.000)	(23)
Lemari Kayu	(2.419.470)	(4)
Meja Kerja Kayu	(16.645.875)	(26)
Rak Kayu	(1.403.000)	(2)
Rumah Sederhana	(367.363.140)	(10)
Jumlah	(1.892.805.720)	(88)

- c. Transaksi Penghapusan sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp97.091.125,00, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) BPSPL Padang berupa Sepeda Motor 1 unit dengan nilai sebesar

Rp20.000.000,00;

- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara berupa Peralatan Inventansi Kantor sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp76.580.000,00.

Saldo awal Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 1 Januari 2025 sebesar Rp751.336.900,00. Pada periode Tahunan 2024 terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp900.123.900,00, sehingga saldo per 30 Juni 2025 tetap sebesar Rp0,00.

Tabel C.43. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Saldo Awal Per 1 Januari 2025	751.336.900
MUTASI TAMBAH	148.787.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	148.787.000
MUTASI KURANG	(900.123.900)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(900.123.900)
Penghapusan	0
Saldo Akhir Per 30 Juni 2025	0

Mutasi tambah yaitu transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00. Mutasi kurang terdapat transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Aset Tak Berwujud sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp900.123.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. PKPB Direktorat P4K sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp416.700.000,00, dengan rincian :
 - i. Berupa Aset Tak Berwujud Lainnya sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00
 - ii. Berupa Software Komputer sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp216.700.000,00
- b. PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp148.787.000,00
- c. BKKPN Kupang berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai

sebesar Rp334.636.900,00

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(61.430.985.274)*

C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Lain-lain dan Aset Tak Berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(61.430.985.274,00) dan Rp(59.526.552.128,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per satker dan keterangan terkait transaksi mutasinya dijelaskan pada Laporan BMN per 30 Juni 2025.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya terdiri dari Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp46.557.374.318,00, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp11.954.300.876,00, Akumulasi Amortisasi Software senilai Rp1.014.876.934,00, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan senilai Rp0,00.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp5.885.312.938*

C.27. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga (2121XX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp5.885.312.938,00 dan Rp774.372.777,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Beban Pegawai yang masih harus Dibayar (212111) senilai Rp3.853.251.061,00, Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) senilai Rp1.940.962.799,00, Beban Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp0,00, Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar (212144) senilai Rp880.950.871,00, dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp789.851.793,00.

Terdapat perubahan nilai antara Laporan Keuangan 30 Juni 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan 2024 *Audited* pada akun Utang kepada Pihak Ketiga Ditjen PKRL, dimana sebelumnya sebesar Rp522.601.474,00 atau terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya

penambahan akun Beban Pegawai yang masih harus Dibayar, dimana pada periode sebelumnya tidak ada.

Beban Pegawai yang Masih harus Dibayar (212111) per 30 Juni 2025 senilai Rp3.853.251.061,00. Beban Pegawai yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya belanja pegawai oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Beban Pegawai yang Masih harus Dibayar hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu LKKPN Pekanbaru yang merupakan kekurangan tunjangan kinerja untuk sembilan orang pegawai bulan Desember 2024 yang dibayarkan di bulan Januari 2024 a.n Sri Mulia Hamonangan, dkk.

Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) per 30 Juni 2025 senilai Rp1.940.962.799,00. Beban Barang yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Beban Barang yang Masih harus Dibayar terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Beban Barang yang Masih Harus Dibayar diantaranya berupa jurnal manual akrual Jasa Listrik, Air, Telepon, dan Daya dan Jasa Lainnya baik di kantor utama maupun kantor wilker untuk tagihan bulan Desember 2024 yang dibayarkan Januari 2025 pada satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker BPSPL Makassar senilai Rp29.085.655,00.

Sementara pada satker Setditjen PKRL senilai Rp608.861.400,00 berasal dari UAKPB Direktorat Jasa Kelautan dimana terdapat 3 SPM yang tertolak yaitu SPM Nomor 4410, 4412, dan 4413. Adapun SPM tersebut adalah SPM pelunasan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin II/Pelunasan Pekerjaan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Aceh Besar sebesar Rp164.836.000,00. Hal ini sesuai SPK Nomor SPK.124/PPK-JK/PL.450/X/2024 Tgl 09 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp235.480.000,00
- b. Pembayaran Termin II/Pelunasan Pekerjaan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Aceh Utara sebesar Rp165.872.000,00. Hal ini sesuai SPK Nomor SPK.125/PPK-JK/PL.450/X/2024 Tgl 09 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp236.960.000,00
- c. Pembayaran Termin II/Pelunasan Pekerjaan Sarana Pendukung Rumah Garam Pidie Jaya Aceh Besar Aceh Utara sebesar Rp278.153.400,00. Hal

ini sesuai SPK Nomor SPK.132/PPK-JK/PL.450/X/2024 Tgl 14 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp397.362.000,00

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) per 30 Juni 2025 senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan nilai 31 Desember 2024 *Audited* (tidak ada perubahan). Belanja Modal yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja modal yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar (212144) per 30 Juni 2025 senilai Rp880.950.871,00. Nilai ini sama dengan nilai 31 Desember 2024 *Audited* (tidak ada perubahan). Akun ini merupakan kontra akun Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima. Hal ini dikarenakan pengajuan SPM di akhir bulan namun realisasi di bulan berikutnya. Nilai tersebut akan terkoreksi setelah dilakukan proses pembayaran. Biasanya merupakan kuitansi TUP yang belum di SPJ-kan di bulan pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) per 30 Juni 2025 senilai Rp789.851.793,00. Nilai ini sama dengan nilai 31 Desember 2024 *Audited* (tidak ada perubahan). Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Akun ini merupakan kontra akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp120.563.621*

C.28. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan berupa Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) senilai Rp120.563.621,00. Nilai Utang Yang Belum Diterima Tagihannya jika dibandingkan per 31 Desember 2024 *Audited* sebesar Rp0,00 maka tidak terjadi perubahan pada akun ini. Dimulai pada tahun 2023 dimungkinkan terdapat akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya tiap bulannya dikarenakan sistem baru aplikasi SAKTI yang memungkinkan saldo Utang Yang Belum Diterima Tagihannya tampil di neraca.

Akun ini biasanya muncul diantaranya disebabkan karena satker telah mencatat pengeluaran sampai dengan akhir bulan namun belum dilakukan

pembayaran sampai dengan bulan yang bersangkutan berakhir, atau juga dapat disebabkan nilai kuitansi yang sudah dibelanjakan dan dicatat di aplikasi SAKTI Modul Komitmen atas pertanggungjawaban Uang Persediaan namun belum dibuat tagihan pembayaran melalui DRPP, SPBy, dan SPM sampai dengan bulan yang bersangkutan berakhir.

*Hibah yang belum
Disahkan Rp0*

C.29. Hibah yang belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan berupa akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan (219211) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terdapat perubahan karena pada saldo 31 Desember 2024 *Audited* juga tidak ada Hibah yang Belum Disahkan. Hibah Langsung yang Belum Disahkan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Hibah Langsung dari pihak ketiga yang belum memperoleh pengesahan.

Pada tahun ini terdapat Hibah Langsung Barang dan Jasa yang hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL berupa hibah luar negeri yang berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concorium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari satker Pusat Riset Perikanan (403821) BPPSDM dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00.

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0*

C.30. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka berupa akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada awal tahun hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp42.391.800,00 yaitu sewa sebagian tanah di Kawasan SKPT Morotai, Desa Daeo Majiko, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara seluas 523,84 m² selama 5 tahun dari CV. Putra Karya Jaya untuk SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan). Harga sewa menurut perjanjian sewa selama jangka waktu lima tahun adalah sebesar Rp282.612.000,00 yang dimulai pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka mengalami penurunan karena penyesuaian perhitungan dilakukan pada akhir tahun. Sementara itu untuk obyek tanah yang ditempati pada tahun 2023 ini telah diserahkan pencatatannya berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan dari Direktorat Jenderal PKRL ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp5.066.098.382*

C.31. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN (219511) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp5.066.098.382,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Tidak terdapat perubahan nilai Uang Muka dari KPPN dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan saldo pada akhir tahun telah dilakukan penyetoran pada pelaporan TA. 2024.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp00*

C.32. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan, dan utang jangka pendek lainnya. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp113.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan karena pada saldo 31 Desember 2024 *Audited* tidak ada akun Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor merupakan utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara. Dalam hal ini hanya terdapat pada satu satker TP yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo dengan kondisi pajak petugas Validator yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran namun disetor oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 2 Januari 2025 dengan bukti setoran pajak dengan NTPN Nomor 940126110642167D75BBSE08HLQ.

Ekuitas

C.33. Ekuitas

Rp835.060.137.810 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp835.060.137.810,00 dan Rp856.829.743.540,00. Terdapat perubahan nilai antara Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan 2023 *Audited* pada akun Ekuitas, atau terjadi penurunan yang cukup signifikan karena ada beberapa koreksi di beberapa akun.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp354.217.556.008

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp354,217,556,008,00 dan Rp286,043,353,798,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah pendapatan PNB yang sangat seiring dengan kenaikan jumlah aktivitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan. Selain itu kenaikan yang cukup signifikan juga terdapat pada Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya. Walaupun juga terdapat penurunan pada akun Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Denda Lainnya. Adapun rincian pendapatan PNB Semester I 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel. D.1.

Tabel. D.1. Rincian Pendapatan Operasional per 30 Juni 2024

Kode Akun	Uraian Pendapatan	Jenis Pendapatan	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024(Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	PNBP Lainnya	7.279.268	24.784.182
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	PNBP Lainnya	19.349.374	
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	PNBP Lainnya	345.414.150.761	276.079.754.239
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	PNBP Lainnya	8.736.406.605	9.938.490.017
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	PNBP Lainnya	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat	PNBP Lainnya	0	0
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	PNBP Lainnya	40.370.000	325.360
425839	Pendapatan Denda Lainnya	PNBP Lainnya	0	0
425591	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	PNBP Lainnya	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	PNBP Lainnya	0	0
		Jumlah	354.217.556.008	286.043.353.798

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan ini merupakan pendapatan sewa mess/rumah pegawai yang diterima pada tahun berjalan yang terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa

pendapatan sewa rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya dengan nilai pendapatan di LO Rp7.279.268,00. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada LRA juga senilai Rp7.279.268,00. sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi merupakan pendapatan sewa mess/rumah pegawai yang diterima pada tahun berjalan yang terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa pendapatan sewa rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya dengan nilai pendapatan di LO Rp19.349.374,00. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi pada LRA juga senilai Rp19.349.374,00. sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Perizinan Lainnya (425259), sejak tanggal 18 September 2021 pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan. Aturan ini menggantikan PP Nomor 75 Tahun 2015 dan juga sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak. PP tersebut mengatur 18 jenis PNPB pada sektor kelautan dan perikanan yang salah satunya terkait tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, selain pada satker pusat Setditjen PKRL terdapat enam satker UPT pengelola jenis ikan yang memiliki mandat untuk melakukan penarikan PNBP pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI-DN/LN) dan Rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi. Enam satker tersebut yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Total Pendapatan Perizinan Lainnya pada LO senilai Rp345.414.150,761,00

dengan pengembalian Rp2.474.100.000,00 sehingga pendapatan perizinan tetap senilai Rp345.414.150,761,00. Pendapatan Perizinan Lainnya pada LRA juga senilai Rp349.861.932.146,00 terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya telah dijelaskan pada CaLK LRA

Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) senilai total Rp8,736,406,605,00 dengan pengembalian Rp1.713.100,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya tetap senilai Rp8,736,406,605,00 berasal dari satker pusat Setditjen PRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) yang merupakan mandat baru dari PP 85 Tahun 2021 bersumber dari pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi dan pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKPN) bersumber dari karcis dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya pada LRA juga senilai Rp8,736,406,605,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai total Rp40.370.000.00. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada LRA juga senilai Rp40.370.000.00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah telah dijelaskan pada CaLK LRA. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) hanya terdapat pada satu satker pusat yaitu Setditjen PKRL yang merupakan setoran denda keterlambatan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Saluran/Jalan Produksi Tahun 2023 oleh CV. Aliah Consulindo pada Satker Dinas KP Kab. Jeneponto sebesar Rp31.360,00 dan denda keterlambatan atas pemenuhan dokumen perencanaan sebesar Rp294.000,00 pada satker Dinas KP Kab. Bima.

*Beban Pegawai
Rp66.220.716.591*

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.220.716.591,00 dan Rp61.697.004.670,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Beban Pegawai yang tidak terlalu signifikan sebesar 14,00% seiring dengan kenaikan jumlah anggaran pegawai karena adanya pegawai yang baru masuk serta karena adanya kenaikan tunjangan fungsional. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Pegawai. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas sebesar Rp58.128.214.920,00 atau terdapat selisih Rp3.568.789.750,00. Hal ini diakibatkan adanya tunjangan kinerja dan gaji induk bulan Juli 2024 yang sesuai dengan ketentuan teknis proses pengajuan SPM-LSnya dilakukan pada bulan sebelumnya yaitu Juni 2024 sehingga telah diakui sebagai beban pada bulan Juni. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Koreksi Audited temuan BPK pada tiga satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, dan LPSPL Serang dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Adapun rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 sebagaimana Tabel D.2. berikut ini.

Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024

Uraian	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	32.994.514.211	31.518.725.323	4,47
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	1.872.388.445	1.493.526.801	20,23
Beban Lembur (5122)	310.640.000	318.224.000	-2,44
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito (5124)	31.043.173.935	28.366.528.546	8,62
Jumlah Beban	66.220.716.591	61.697.004.670	6,83

Beban Persediaan
Rp1.472.772.033

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.472.772.033,00 dan Rp294.094.994,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dalam operasional kegiatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Beban Persediaan yang cukup signifikan sebesar 30,83%. Adapun rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 sebagaimana Tabel D.3. berikut ini.

Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan Konsumsi (593111)	205.656.389	294.029.994	-42,97
Beban Persediaan bahan baku (593131)	0	65.000	#DIV/0!
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan (593122)	406.772.217	0	100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau (593124)	387.903.427	0	100,00
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan (593125)	472.440.000	0	100,00
Jumlah Beban	1.472.772.033	294.094.994	80,03

Beban persediaan hanya terdiri atas : (1) Beban Persediaan Konsumsi senilai Rp1.049.371.886,00 yang terdapat pada 10 satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan satu satker Tugas Pembantuan Dinas KP Prov. Gorontalo dengan yang terbesar pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp50.510.350,00. (2) Beban Persediaan Bahan Baku senilai Rp65.000,00 hanya terdapat pada satu satker UPT LPSPL Serang yang sebetulnya berupa ATK namun salah pencatatan kode barang pada Modul Komitmen.

*Beban Barang &
Jasa
Rp21.653.597.142*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.653.597.142,00 dan Rp53.094.711.416,00. Beban Barang dan Jasa adalah terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan nilai Beban Barang dan Jasa yang sangat signifikan yaitu sebesar 145,60%. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 sebagaimana Tabel D.4. berikut ini.

Tabel D.4. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025

Uraian	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Barang Operasional (5211)	4.269.123.005	5.333.989.631	-24,94
Beban Barang Non Operasional (5212)	1.580.795.046	10.514.615.744	-565,15
Beban Jasa (5221)	15.803.679.091	37.238.114.041	-135,63
Jumlah Beban	21.653.597.142	53.086.719.416	-145,16

Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Jasa. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Barang dan Jasa total sebesar Rp34.867.108.955,00 atau selisih Rp18.227.602.461,00 dengan rincian Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.935.016.432,00 atau selisih Rp398.973.199,00, Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp9.935.156.204,00 atau selisih Rp579.459.540,00, dan Belanja Jasa sebesar Rp19.996.936.319,00 atau selisih Rp17.241.177.722,00. Selisih ini diantaranya diakibatkan adanya jurnal manual terkait dengan aset ekstrakomptabel, Beban Dibayar Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dll. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Koreksi Audited temuan BPK dan Itjen pada tiga satker yaitu Setditjen PRL, LPSPS Sorong, Dinas KP Kab. Cirebon, dan Dinas KP Kab. Bima dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

Beban
Pemeliharaan
Rp1.602.002.364

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.602.002.364,00 dan Rp2.195.441.817,00. Terdapat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 8,63%. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan yang terbesar dari akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp1.280.084.835,00 yang terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL. Adapun rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 sebagaimana Tabel D.5. berikut ini.

Tabel D.5. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024

Uraian	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan (523111)	741.067.919	736.796.569	0,58
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya (523119)	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin (523121)	858.712.445	1.280.084.835	-49,07
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya (523129)	2.222.000	3.819.200	-71,88
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (523131)	0	0	0
Beban Pemeliharaan Jaringan (523133)	0	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya (523199)	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113)		263.800	0
Beban Persediaan Suku Cadang (593114)	0	0	0
Jumlah Beban	1.602.002.364	2.020.964.404	-26,15

Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.952.864.446,00 atau selisih Rp68.099.958,00. Selisih ini salah satunya karena pada Beban Pemeliharaan terdapat akun Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113) yang terdapat pada satu satker UPT LPSPL Serang karena pencatatan persediaan yang masuk kategori Bahan untuk Pemeliharaan walaupun berasal dari anggaran Barang Konsumsi. Selain itu juga dikarenakan adanya resume tagihan yang sudah terbit dan telah dicatat baik di Modul Komitmen maupun Modul Pembayaran namun belum keluar SP2D sehingga belum muncul realisasi pada LRA. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Balik Koreksi Audited temuan BPK pada satker LPSPL Sorong dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp5.418.005.850*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.418.005.850,00 dan Rp47.572.752.387,00 atau mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 33,06%. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Beban Perjalanan Dinas yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan anggaran perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Nilai tertinggi terdapat pada akun Beban Perjalanan Biasa (524111) senilai Rp23.999.975.683,00. Kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) sebesar 56,61%, Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri sebesar 55,59%, dan Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524119) sebesar 54,24% seiring dengan naiknya pagu anggaran. Satu-satunya akun yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada akun Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) turun sebesar 2,53%. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Perjalanan Dinas. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 sebagaimana Tabel D.6. berikut ini.

Tabel D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025

Uraian	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111)	3.061.036.369	23.999.975.683	-684,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)	150.812.210	1.206.871.000	-700,25
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)	733.763.500	5.415.447.346	-638,04
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)	1.189.002.049	13.732.118.290	-1.054,93
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri (524211)		2.041.858.386	0,00
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524219)	283.391.722	1.176.481.682	-315,14
Jumlah Beban	5.418.005.850	47.572.752.387	-778,05

Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp46.178.223.018,00 atau selisih Rp1.394.529.369,00. Selisih ini terdapat pada seluruh akun Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dikarenakan adanya jurnal balik manual Koreksi Audited pada awal tahun akibat setoran temuan BPK Tahun 2023 pada satker Setditjen PKRL dan Dinas KP Kab. Pangkep dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Selain itu karena juga terdapat resume tagihan yang sudah terbit dan telah dicatat baik di Modul Komitmen maupun Modul Pembayaran namun belum keluar SP2D sehingga belum muncul realisasi pada LRA.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp1.267.115.644*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp1.267.115.644,00 dan Rp1.538.416.647,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar 24,32% walaupun terdapat dua akun yang terdapat pada Semester I tahun ini namun tidak ada pada tahun sebelumnya, seiring dengan serah terima BAST di tahun 2024 yaitu Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan ke Masyarakat dan Beban Persediaan Jalan, Irigasi, Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tersebut sebagaimana Tabel D.7.

Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Diserahkan ke Masyarakat (593122) senilai Rp27.082.204,00 terdapat hanya pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 292,14%. Beban persediaan tanah dan bangunan untuk diserahkan ke masyarakat berasal dari Dit. Jasa Kelautan berupa Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk pencatatan kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GGR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi sesuai LH Pemantauan Nomor : T.608/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai Rp4.151.386,00, Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk Pencatatan Pengakuan Temuan pada Dit. Jasa Kelautan a.n. CV. Gibran Raka Pratama senilai Rp76.511,17 dan CV. Bangun senilai Rp.85.447,83 sesuai dengan LH Pemantauan Nomor : T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp161.959,00, Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk pencatatan Biofarmakologi (Dit. Jasa Kelautan) atas Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin sesuai dengan LH Evaluasi Nomor : T.41/ITJ/KP.730/XII/2024 tanggal 11 Januari 2024 senilai Rp4.230.627,00. Sedangkan dari Dit. P4K berupa Jurnal Balik terkait Koreksi BPK untuk Belanja 526 pada Ditjen PKRL melalui mekanisme swakelola belum didukung bukti pertanggungjawaban yaitu Bantuan Pengembangan Pesisir Tangguh di Lampung Selatan KMP Anugerah Bahari, Mutiara Laut, Mina Segara, Berkah senilai Rp18.538.232,00.

Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan ke Masyarakat (593123)

sebesar Rp7.830.000,00 terdapat hanya pada satker Setditjen PKRL. Pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama tidak terdapat akun ini. Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan berasal dari Dit. P4K yaitu Jurnal Balik terkait koreksi BPK untuk Belanja 526 pada Ditjen PKRL melalui mekanisme swakelola belum didukung bukti pertanggungjawaban berupa penanaman vegetasi pantai di Kab. Aceh Besar dari kelompok Tunas Usaha Sejahtera senilai Rp7.830.000,00.

Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat (593124) senilai Rp1.500.561.043,00 terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Nilai terbesar yaitu pada satker BPSPL Makassar sebesar Rp299.988.625,00. Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu sebesar 20,08%. Pada satker Setditjen PKRL berasal dari Dit. P4K yaitu Jurnal Balik koreksi BPK Pencatatan Pengakuan Temuan Penusahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP pada Setditjen PKRL Tidak Tertib tahun 2023, belanja barang yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp6.660,00, Jurnal Balik terkait Koreksi Itjen untuk Denda Keterlambatan CV. Three Putra Abadi sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp6.393.528,00, Habis Pakai Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano Kab. Seram Bagian Barat senilai Rp39.940.000,00. Pada seluruh satker UPT terdapat pada kegiatan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi diantaranya berupa peralatan selam, compressor, kamera, laptop, dll.

Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat (593125) senilai Rp2.943.400,00 dimana pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama tidak terdapat akun ini. Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL. Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan berasal dari Dit. P4K yaitu Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMK pada Kab. Banyuwangi sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp1.025.000,00 dan Jurnal Balik terkait Koreksi Itjen untuk Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMK pada Kota Ambon sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp1.918.400,00.

Sementara itu untuk Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke

Masyarakat (593128) yang pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama terdapat saldo senilai Rp4.394.000,00 pada Semester I tahun ini tidak terdapat saldo beban tersebut.

Tabel D.7. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025

Uraian	30 Jun 2025 (Rp)	30 Jun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121)	0	0	0
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593122)	406.772.217	27.082.204	93,34
Beban Persediaan Hewan Tanaman untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593123)	0	7.830.000	0
Beban Persediaan Alsin untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593124)	387.903.427	1.500.561.043	-286,84
Beban Persediaan JIJ untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593125)	472.440.000	2.943.400	99,38
Beban Persediaan ATL untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593126)	0	0	0
Beban Lain-Lain untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593127)	0	0	0
Beban Brng Lainnya utk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593128)	0	0	0
Jumlah Beban	1.267.115.644	1.538.416.647	-21,41

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen PKRL untuk Tahun Anggaran 2025. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp9.613.881.262

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp10.231.881.262,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan beban penyusutan dan amortisasi yang tidak terlalu signifikan disebabkan

bertambahnya nilai aset tiap tahunnya. Nilai yang terbesar yaitu pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp5.487.411.869,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 sebagaimana Tabel D.8. berikut ini.

Tabel D.8. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024

Uraian Jenis Beban	Akun	30 Jun 2025 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	5.718.105.419
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211	1.012.956.764
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	591311	215.325.325
Beban Penyusutan Irigasi	591312	170.627.468
Beban Penyusutan Jaringan	591313	15.632.914
Beban Penyusutan Properti Investasi	591611	0
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	592211	2.388.276.237
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk Digunakan dlm Operasional	592222	36.299.781
Jumlah Penyusutan		9.557.223.908
Beban Amortisasi Software	592115	56.476.366
Beban Amortisasi Lisensi	592116	0
Jumlah Amortisasi		56.476.366
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		9.613.700.274

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp(23.558.382)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(23.558.382,00) dan Rp(6.924.559,00). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Terdapat kenaikan angka Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB (594211) pada satker Sekretariat Ditjen PKRL senilai Rp(5.951.759,00) dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) senilai Rp(972.800,00) pada empat satker yaitu Setditjen PKRL, LPSPL Serang, BPSPL Makassar, dan LPSPL Sorong karena adanya jurnal balik atas piutang di tahun sebelumnya, serta adanya jurnal koreksi atas temuan BPK maupun Itjen pada beberapa satker seperti yang telah dijelaskan pada CaLK Neraca akun Piutang Lainnya.

Beban Lain-Lain
Rp0

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain yang dimiliki Direktorat Jenderal PRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak ada perubahan nilai. Tidak ada akun Beban Lain-Lain pada Ditjen PKRL untuk Tahun Anggaran 2024. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(584.819.394)

D.12 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(977.891.451,00) dan Rp226.248.035,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri atas Defisit Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp(1.172.581.159,00) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp194.689.708,00. Terdapat penurunan nilai antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp(1.172.581.159,00) terdiri atas : (1) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp223.153.365,00 berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) dengan nilai yang sama yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan dua satker UPT yaitu BPSPL Makassar dan BPSPL Padang. Pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp20.665.077,00, berupa penjualan Peralatan dan Mesin pada BAPPEDA Prov. Riau dan BAPPEDA Prov. Bengkulu, serta 4 unit Sepeda Motor pada Dit. P4K. Pendapatan penjualan Peralatan dan Mesin pada Satker BPSPL Padang dengan nilai sebesar Rp187.832.107,00, berupa 2 unit Mini Bus, 4 unit Sepeda Motor, dan penjualan Peralatan Inventaris Kantor, serta BPSPL Makassar dengan nilai sebesar Rp14.656.181,00 berupa Peralatan Inventaris Kantor.

Selain itu Defisit Pelepasan Aset Non Lancar juga berupa (2) Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp1.395.734.524,00 berupa Beban Pelepasan Aset (596111) yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL senilai Rp568.809.915,00 berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, serta dua satker UPT yaitu BPSPL Padang Rp627.424.609,00 dan LKKPN Pekanbaru senilai Rp199.500.000,00 juga berupa Pencatatan Barang

Yang Mau Dihapuskan yaitu Buku Lainnya dan Peta (Map).

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp194.689.708,00 terdiri atas Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp341.875.708,00, sementara Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun ini senilai Rp147.186.000,00 berupa Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) hanya pada satker Setditjen PKRL yaitu Dit. Jasa Kelautan karena adanya Penghapusan 526 berupa Kegiatan Perencanaan Gudang Garam Nasional menjadi Persediaan yang rusak/usang.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri atas (1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp38.211.588,00, (2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp300.454.579,00, dan (3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp3.209.541,00.

Tabel D.9. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2024

Uraian Jenis Beban	Akun	30 Jun 2024 (Rp)
Pendapatan Penyelesaian Ganti KN thd Pegawai Negeri	425791	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	425911	70.878.010
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	425912	419.594.384
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	425913	
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	491429	94.347.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	491511	0
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		584.819.394

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) terdapat pada lima satker yaitu Setditjen PRL, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, dan LPSPL Serang senilai total Rp38.211.588,00 terdiri dari pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS, PPPK, dan uang makan Tahun Anggaran 2023. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini, yang hanya terdapat pada satker BPSPL Makassar dikarenakan ada jurnal balik hasil temuan BPK. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

(2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) terdapat pada 7 satker dengan rincian 1 satker pusat yaitu Setditjen PKRL dan 6 satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong, dan LKKPN Pekanbaru senilai total Rp300.454.579,00. Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan karena pengembalian atas kelebihan

pembayaran honor enumerator, pembayaran belanja pemeliharaan, pembayaran belanja barang operasional Tahun Anggaran 2023. Selain itu pendapatan tersebut dari setoran mandiri atas tindak lanjut temuan audit Inspektorat Jenderal berupa temuan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, konsumsi rapat, penggandaan laporan dan langganan listrik mess. Tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

(3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 berupa temuan Itjen atas kelebihan pembayaran pembangunan Mushalla. Tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pos Luar Biasa Rp0

D.13. Pos Luar Biasa

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, berada di luar kendali entitas dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat akun Pos Luar Biasa pada LK Ditjen PKRL periode Semester I TA. 2025 ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp856.829.743.540

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp856.829.743.540,00. Nilai ini sama dengan nilai saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2024 *Audited* pada aplikasi SAKTI pada periode tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit LO
Rp248.080.562.765

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp248.080.562.765,00 dan Rp108.622.561.126,00. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Terdapat kenaikan Surplus LO sebesar Rp139.458.001.639,00 dari tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp834.518

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp(834.518,00) dan Rp(2.878.419,00). Rincian koreksi yang menambah ekuitas dapat dirinci di bawah ini :

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp60.000

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan (391113) mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp60.000,00 dan Rp0,00. Akun ini hanya terdapat pada satu satker TP yaitu Dinas KP Prov. Papua. Sehubungan terdapat kesalahan pencatatan Persediaan Barang Konsumsi dengan menggunakan transaksi Saldo Awal pada Modul Persediaan berupa *Sticky Note* sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp60.000,00, melakukan Koreksi Pencatatan Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada tanggal 30 Juni 2025.

Koreksi atas
Reklasifikasi Rp0

E.3.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Akun 391151 (Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bagian dari Pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara Lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar. Akun ini baru disajikan pada LPE mulai tahun 2019. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset, dalam hal ini yaitu aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi Rp0

E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.878.419,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya atau bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dapat terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap dan Koreksi Nilai Aset Lainnya.

Terdapat penurunan nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dimana pada tahun 2024 ini terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) sebesar Rp18.496.254.440,00 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118) sebesar Rp(949.500,00).

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi terdapat pada tujuh satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL senilai Rp18.412.798.658,00 dan enam satker UPT dengan rincian sebagai berikut :

- LPSPL Serang senilai Rp(24.787.236,00) merupakan selisih yang terjadi dari penjumlahan aset lainnya terhadap koreksi aset non revaluasi sebesar Rp(111.084.660,00). Sebelumnya pada akun koreksi aset tetap non revaluasi sudah terdapat saldo sebesar Rp86.297.236,00, sehingga adanya penjumlahan tersebut menghasilkan nilai Rp24.787.236,00 dengan rincian :
 - Transaksi **Koreksi Pencatatan** aset berupa Kanopi dengan nilai

penyusutan transaksional sebesar Rp57.440.790,00 (Kredit), dan nilai masa manfaat Kanopi tersebut selanjutnya dikapitalisasi ke Bangunan Gedung Kantor Permanen, hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa aset berupa Kanopi sebagaimana dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen, sebagai data dukung Koreksi Pencatatan adalah Surat Keterangan Nomor : 2547/LPSPL.2/ PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN

- Transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, yaitu penambahan nilai kuantitas masa manfaat sebesar Rp55.700.160,00 (Debet), dan nilai tersebut berasal dari koreksi pencatatan nilai Kanopi, sesuai Surat Keterangan Nomor : 2547/LPSPL.2/ PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
- Transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang** berupa Alat Selam Seet senilai Rp77.097.000,00, Kursi Besi/Metal senilai Rp5.400.000,00, dan Kursi Zeis senilai 2.059.794,00, yaitu sebagai pengurangan nilai masa manfaat dari masing-masing aset tersebut, dan sebagai data dukung Surat Keterangan Nomor : 2547 /LPSPL.2/ PL.450/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
- Transaksi **Jurnal Balik** atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang berasal dari koreksi pencatatan aset karena kesalahan kode barang sebesar Rp111.084.660,00, (Debet), sebagai data dukung Surat Keterangan Nomor : 2547 /LPSPL.2/PL.450 /VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
- BPSPL Makassar senilai Rp27.624.664,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - **Transaksi Koreksi Pencatatan** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai masa manfaat (Debet) sebesar Rp199.800.000,00, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen, yaitu kesalahan proses pencatatan dengan menggunakan menu transaksi Perolehan/ Penambahan KDP, sehingga pada saat dilakukan transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP, membentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP baru, sebagai data dukung koreksi pencatatan yaitu Surat Keterangan Nomor :

1262.A/BPSPL.3/PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024 adalah dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN

- **Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah/Kapitalisasi Nilai** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1, yaitu penambahan nilai kualitas atas pekerjaan renovasi ruangan pelayanan dengan nilai masa manfaat sebesar Rp169.971.037,00, (Debet) pada Bangunan Gedung Kantor Permanen sebagaimana dimaksud, data dukung Surat Keterangan Nomor : 1262.A/BPSPL.3/ PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024, dalam rangka tertib administrasi terkait Pengelolaan BMN
- **Transaksi Saldo Awal** berupa Timbangan Barang, dengan nilai masa manfaat sebesar Rp5.349.650,00, (Kredit), hal tersebut dilakukan karena pada TA. 2023 terdapat belanja pengadaan timbangan digital sebanyak 4 unit menggunakan akun belanja barang operasional lainnya (521119), yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin (532111) mengingat timbangan digital telah memenuhi kriteria sebagai aset tetap secara nilai, fungsi dan manfaat, data dukung Surat Keterangan Nomor : 1262.A/BPSPL.3/ PL.110/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024
- **Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang** berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp3.145.351,00, hal tersebut dilakukan dalam rangka meniadakan hasil Audit Kinerja Inspektorat III KKP, T.152/ITJ/HP.110/IV/2024 pada BPSPL Makassar bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushollah), sebagai data dukung adalah Surat Keterangan Nomor : B.1549/BPSPL.3/KP.120/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024
- LKKPN Pekanbaru senilai Rp(103.625,00), yang berasal dari nilai buku atas Software Komputer yang ditambahkan kepada aset tetap berupa Notebook (NUP 66) saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (kode transaksi 204), yang diperoleh dari Rp1.899.000,00 (nilai perolehan awal Software Komputer) dikurangi dengan Rp1.795.375,00 (nilai penyusutan software komputer yang sudah dilekatkan dengan Aset Tetap berupa Notebook
- Setditjen PKRL senilai Rp18.412.798.658,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - Terdapat transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

(Penghapusan) berupa berupa Personal Komputer Lainnya pada PKPB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp2.340.467,00 (Kredit)

- Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp66.305.000,00
- Terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk Rambu-rambu Lalu Lintas Laut Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp11.446.875,00
- Saldo Awal Bangunan Gazebo pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar (24.208.000,00)
- Saldo Awal Bangunan Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(129.940.000,00)
- Saldo Awal Bangunan Terbuka Lainnya pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(58.740.000,00)
- Saldo Awal Gedung Pos Jaga Semi Permanen pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(22.784.000,00)
- Saldo Awal Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan pada Setditjen PKRL, yaitu nilai penyusutan transaksional sebesar Rp(7.625.395.000,00)
- BPSPL Denpasar senilai Rp9.871.792,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - Transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang diakibatkan karena adanya penilaian dari KPKNL Denpasar atas aset rumah negara yang semula 1 NUP dilakukan penilaian Kembali menjadi 3 NUP
 - Transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang diakibatkan karena penilaian dari KPKNL Sidoarjo atas pemisahan nilai tanah dan Gedung bangunan kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur
- LPSPL Sorong senilai Rp90.817.793,00 hal tersebut disebabkan transaksi Reklasifikasi Masuk berupa Camera Digital yang semula tercatat sebagai Kamera Digital
- BPSPL Pontianak senilai Rp14.500.000,00 yang disebabkan adanya transaksi koreksi nilai KDP yang diinput kedalam persediaan dikarenakan akan diserahkan ke Pemda setempat.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi hanya terdapat di satker LKKPN

Pekanbaru senilai Rp(949.500,00), yang berasal dari nilai penyusutan atas Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer (NUP 9), yang dikembalikan kepada nilai aset tersebut pada saat dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan (kode transaksi 305).

*Koreksi Lain-Lain
Rp(894.518)*

E.3.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain berupa Koreksi Lainnya (391119) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(894.518,00) dan Rp0,00. Koreksi Lainnya terdapat pada dua satker yaitu BPSPL Makassar senilai Rp6.250,00 berupa Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR yang masih menyisakan angka tersebut dimana nilai tersebut merupakan nilai penyisihan pada pelaporan tahun yang lalu. Pada saat penginputan terakhir di SAKTI modul piutang sistem tidak menghilangkan penyisihan tersebut sehingga diperlukan jurnal manual pada modul GLP.

Sementara itu pada satker Setditjen PKRL senilai Rp1.169.090.320,00, diantaranya senilai Rp10.158.659,00 merupakan Jurnal Umum untuk Pencatatan setoran atas CV. Mitra Alami dan LEHPI (penyisihan piutang) dari temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton serta Jurnal untuk mencatat Piutang Lainnya atas setoran pada lima satker Eks Tugas Pembantuan Pugar terkait temuan Itjen tahun 2023 dan Rp1.190.351.664,00 berupa jurnal manual KSP P. Nipa sisa Piutang PNBP yang telah dibayarkan 50% sebelumnya.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(269.849.333.977)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(269.849.333.977,00) dan Rp(120.544.341.128,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas terdiri dari Diterima dari Entitas Lain berupa pendapatan, Ditagihkan ke Entitas Lain berupa realisasi belanja, Transfer Masuk, Transfer Keluar, serta Pengesahan Hibah Langsung. Rincian atas Transaksi Antar Entitas sebagai berikut :

Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (313121)	(359.299.149.620)
Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)	88.805.593.016
Transfer Masuk (313221)	0
Transfer Keluar (313211)	(744.470.250)
Pengesahan Hibah Langsung (391131)	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (391132)	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL (391133)	1.388.692.877
Jumlah	(269.849.333.977)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp(359.299.149.620,00) sedangkan DKEL sebesar Rp88.805.593.016,00. Terdapat perubahan nilai antara 30 Juni 2025 dibandingkan dengan 30 Juni 2024 pada Pos Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain karena adanya perubahan pada pos realisasi dan pendapatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara rinci pada pos CaLK LRA.

E.4.2 Transfer Masuk /Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Pada LK Semester I Tahun Anggaran 2025 ini hanya terdapat transaksi Transfer Keluar (313211) yang terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Transfer Keluar senilai Rp744.470.250,00 berupa

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung (391131) per 30 Juni 2025 senilai Rp0,00 atau tidak ada akun Pengesahan Hibah Langsung untuk periode ini.

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (391133) per 30 Juni 2025 senilai Rp1.388.692.877,00. Pengesahan Hibah Langsung tersebut merupakan Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk uang pada tahun 2024 yang hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL.

Ekuitas Akhir
Rp835.060.137.810

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI adalah masing-masing sebesar Rp835.060.137.810,00 dan Rp825.897.402.676,00. Terdapat perubahan nilai atau kenaikan Ekuitas Akhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat 5 satker dari Tugas Pembantuan Pugar yang pada Tahun Anggaran 2023 statusnya aktif menjadi tidak aktif karena tidak memperoleh anggaran, yaitu Dinas KP Kab. Cirebon (029447), Dinas KP Kab. Pamekasan (059490), Dinas KP Kab. Pangkep (199060), Dinas KP Kab. Jenepono (199056), dan Dinas KP Kab. Bima (239050) dimana keseluruhan satker tidak meninggalkan Aset Tetap, namun masih terdapat Aset Lancar berupa Piutang Lainnya yang merupakan temuan Inspektorat Jenderal TA. 2023 yang dilakukan penyetoran TA. 2024. Rincian temuan tersebut terdapat pada bagian lainnya dari Pengungkapan Penting Lainnya dibawah ini. Piutang Lainnya tersebut telah dilakukan transfer terlebih dahulu ke satker Setditjen PKRL dikarenakan penyetoran dilakukan menggunakan akun satker Setditjen PKRL. Setelah itu dilakukan jurnal manual pada satker Setditjen PKRL pada periode Triwulan III 2024 karena seluruhnya telah dilakukan penyetoran.

Untuk Tahun Anggaran 2024 sudah tidak terdapat satker Tugas Pembantuan Pugar. Sementara itu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 bahwa Tahun Anggaran 2024 ada perubahan kewenangan dari Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan beberapa penyesuaian administrasi terutama terkait perubahan kode satker pada 34 satker Dinas KP Provinsi (daftar kode satker pada CaLK Pendahuluan).

F.2. Hasil Monitoring pada Aplikasi MonSAKTI

Status Rekonsiliasi untuk seluruh satker aktif telah selesai sehingga hasil rekonsiliasi terbentuk dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) pada masing-masing satker. Sementara itu untuk posisi tutup buku/periode pada masing-masing modul yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan GLP telah ditutup. Bahkan untuk seluruh satker Eks Dekonsentrasi Dinas KP Provinsi juga telah tutup periode untuk seluruh modul.

Terdapat ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode BMN pada 12 barang kode akun 526115 senilai Rp225.578.000,00 pada satker BPSPL Makassar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan pencatatan pada SPM pada modul komitmen dengan nomor SPM 00083 A, 00082 A, 00080 A, dan 00079 A, senilai Rp225.578.000,00 yang

seharusnya tercatat pada aplikasi SAKTI modul persediaan, namun pada saat pemilihan pada SAKTI modul komitmen dipilih sebagai Aset. Atas kesalahan pencatatan tersebut telah dilakukan reklasifikasi keluar persediaan pada modul aset tetap lalu dilanjutkan dengan transaksi reklasifikasi dari aset pada modul persediaan. Barang-barang tersebut dari akun Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dengan barang berupa kamera, notebook, dan set alam selam.

Selisih rekonsiliasi internal piutang jangka panjang yang pada satker Setditjen PKRL senilai Rp100.858.161.685,00 karena telah dilakukan penginputan pada SAKTI Modul Piutang yang merupakan sisa piutang KSP di P. Nipa yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga. Selisih tersebut awalnya muncul dikarenakan pada tahun lalu telah diwajibkan penginputan piutang melalui SAKTI Modul Piutang. Untuk menginput di Modul Piutang, dibutuhkan informasi-informasi terkait dengan debitur, kontrak, dll. Setelah seluruh data dikumpulkan satker telah menginput data tersebut pada Modul Piutang. Penjelasan terkait dengan perpindahan dari Piutang Jangka Panjang menjadi Piutang PNPB telah dilakukan sebelumnya pada Laporan Keuangan Tahun sebelumnya.

Pada LK *Unaudited* terdapat 420 jurnal atau 210 pasang jurnal manual pada periode Tahunan 2024 dengan berbagai deskripsi. Jurnal tersebut terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan satker TP Dinas KP Prov. Maluku. Pada satker Setditjen PKRL terdapat 210 jurnal atau 105 pasang jurnal diantaranya berupa jurnal balik atas belanja akrual tahun 2023, jurnal balik atas temuan tahun 2023 yang telah dibentuk piutang beserta penyisihannya, jurnal balik untuk mencatat pembayaran 50% kontribusi KSP Pulau Nipa, jurnal Piutang Lainnya karena setoran atas temuan BPKP pada Dinas KP Kab. Buton, jurnal atas temuan Itjen tahun 2023 pada lima satker eks Tugas Pembantuan yang membayar menggunakan Simponi Setditjen PKRL, dll.

Pada satker lingkup UPT, secara umum diantaranya berupa jurnal balik atas belanja akrual tahun 2023, jurnal balik atas temuan tahun 2023 yang telah dibentuk piutang beserta penyisihannya, jurnal balik atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang berasal dari koreksi pencatatan aset karena kesalahan kode barang pada satker LPSPL Serang, jurnal balik transaksi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi pada satker BPSPL Pontianak, jurnal ketidaksesuaian akun kode barang pada satker BPSPL Makassar, serta belanja akrual jasa tagihan bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025, dll. Sementara itu untuk satker Dinas KP Prov. Maluku berupa jurnal manual Beban Barang Persediaan Konsumsi atas kesalahan penginputan barang konsumsi pada transaksi Saldo Awal senilai total Rp1.600.000,00 yang seharusnya diinput dengan transaksi Pembelian.

Sementara pada LK *Audited* terdapat 476 jurnal atau 238 pasang jurnal manual karena adanya penambahan 28 pasang jurnal terkait koreksi *Audited*. Penambahan jurnal tersebut terdapat pada enam satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, dan Dinas KP Prov. Gorontalo. Pembentukan jurnal manual yang paling banyak terdapat pada pembentukan akun Piutang Lainnya baik dikarenakan temuan BPK maupun koreksi dari KKP.

F.3. Kendala Pelaksanaan Anggaran Belanja

Capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja *output* Ditjen PKRL TA. 2024 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi pada satker-satker lingkup Ditjen PKRL. Adapun kendala pelaksanaan anggaran belanja yang dihadapi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pada satker Tugas Pembantuan adanya perubahan jenis kewenangan dimana sebelumnya Dekonsentrasi, sehingga menyebabkan perubahan administrasi keuangan termasuk didalamnya pada aplikasi SAKTI dan rekening satker;
2. Adanya perubahan atau kekosongan pejabat struktural/pejabat pembendaharaan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja;
3. Keterlambatan proses pekerjaan lelang sehingga kegiatan direncanakan baru dimulai pada selepas Semester I;
4. Adanya *refocusing* untuk kegiatan yang sudah berjalan, sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai dengan akhir tahun; dan
5. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana.

F.4. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Itjen KKP dan BPKP

A. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

1. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Terdapat temuan BPK RI Tahun 2009 yang sudah tuntas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 09/LHP-P/XVII/05/2010 pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan Rumah Ramah Bencana Khusus Nelayan Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Bartim sebesar Rp28.859.500,00 dan oleh CV. Galang Mitra Sejahtera sebesar Rp9.795.000,00. Terdapat sisa temuan sebesar Rp28.654.500,00 yang telah disetor pada tanggal 09 Juli 2024 dengan NTPN Nomor : CD8C561QV44BV1KC.

Selain itu pada Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 22C/LHP/XVII/06/2017 Tanggal 16 Juni 2017 atas Loan WB IBRD NO.8336-ID dan Grant WB NO.TF 015470 pada Coremap CTI Project Tahun 2016 dengan nilai temuan sebesar Rp475.987,133,84 terdapat pada satker Dinas KP Kab. Pangkajene Kepulauan, Dinas KP Kabupaten Sikka, BKKPN Kupang, Dinas KP Kabupaten Buton dan LIPI dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp316.333.069,32 sehingga sisa temuan sebesar Rp159.654.064,52, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas honor narasumber, moderator, panitia serta pelaksana kegiatan pada Dinas KP Kab. Buton sebesar Rp37.872.500,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp30.617.500,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp7.255.000,00;
2. Kekurangan volume atas pengadaan alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. PRM sebesar Rp24.450.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp7.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp17.450.000,00;
3. Kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. LB sebesar Rp27.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp15.480.198,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp12.019.802,00;
4. Kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multi fungsi pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. L sebesar Rp50.000.250,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp28.000.250,00;
5. Kekurangan volume atas pengadaan perlengkapan perahu pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. YJ sebesar Rp102.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp14.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp88.500.000,00;
6. Kekurangan volume atas pekerjaan pengadaan keramba jaring apung ramah lingkungan pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. YJ sebesar Rp22.800.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.800.000,00;
7. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan pos jaga pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. BP sebesar Rp672.001,32 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp672.001,32;
8. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pos jaga pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. CB sebesar Rp7.429.012,52 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp6.429.012,52.

Adapun Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Loan WB IBRD NO.8336-ID dan Grant WB NO.TF 015470 Tahun 2016 yang disetor Tahun 2024 yaitu Setoran Temuan BPK atas :

1. Kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* oleh CV. Lande Bersaudara pada Dinas KP Kab. Buton dengan NTPN C96A87QLUOQIP2AJ tanggal 21 Februari 2024 senilai Rp1.980.198,00;
2. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Tenaga Pendamping Desa dengan NTPN EA2E561QV47G38ML tanggal 14 Agustus 2024 senilai Rp650.000,00;
3. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Tenaga Pendamping Desa dengan NTPN EA2E561QV47G38ML tanggal 15 Agustus 2024 senilai Rp1.310.000,00;
4. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Narasumber Monitoring Ekosistem Karang (CV. Meta Plan Konsulindo) dengan NTPN 95BA248VVF2LSDAI tanggal 14 Agustus 2024 senilai Rp2.700.000,00;
5. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Narasumber Monitoring Sosek (LSM Prima) dengan NTPN 5FBF33CIFKLVNP28 tanggal 3 Oktober 2024 senilai Rp500.000,00;
6. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 Honor Narasumber Monitoring Sosek (LSM Prima) dengan NTPN 94EB12G4VQ6I0V4G tanggal 3 November 2024 senilai Rp500.000,00.

Dalam rangka optimalisasi penagihan, Setditjen PKRL telah menyampaikan surat Pelimpahan Penagihan Piutang kepada PUPN Kendari atas LHP BPK RI pada kegiatan tahun 2016 melalui surat Nomor : B.6608/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 23 November 2023 (CV. Citra Baru), Nomor : B.6607/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Lande Bersaudara), Nomor : B.6609/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Lisyandi), Nomor : B.6605/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Putra Ridi Mandiri), dan Nomor : B.6606/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Yusril Jaya). KPKNL Kendari melalui surat Nomor : S-1421/KNL.1505/2023 tanggal 13 Desember 2023 mengembalikan pengurusan penagihan CV. Citra Baru karena dibawah ketentuan yaitu nilai temuan di bawah 8 juta. PUPN Cabang Sultra menerima pengurusan piutang Negara atas 4 perusahaan total nilai pelimpahan sebesar Rp147.950.250,00 karena memenuhi syarat pelimpahan melalui surat Nomor : SP3N-01/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Putra Ridi Mandiri, SP3N-02/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Yusril Jaya, SP3N-03/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Lande Bersaudara, SP3N-04/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Lisyandi tanggal 4 Januari 2024.

Sisa temuan Tahun 2016 yang tidak bisa dilimpahkan ke PUPN sebesar Rp19.344.012,52 yang terdiri atas :

- a) Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pos jaga CV. Citra Baru sebesar Rp6.429.012,52;

- b) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Penyusunan *Business Plan* Wisata Bahari Kab. Buton Selatan Rp4.250.000,00;
- c) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Monitoring Sosek Kab. Buton Selatan Rp1.775.000,00;
- d) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kab. Buton Tengah Rp1.730.000,00.

Adapun temuan BPK RI Tahun 2016 pada Ditjen PKRL berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : LHP BPK RI Nomor 3C/LHP/XVII/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016 bahwa pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor terdapat temuan Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Non Personil untuk Belanja Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh PT. Survindo Karyatehnik Nusantara Tahun 2016 sebesar Rp95.171.600,00. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp30.171.000,00 sehingga tersisa Rp65.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2017 dengan NTPN A3DC441TSIDUOQ2P tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp5.171.600,00;
- 2. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2018 dengan NTPN 9C95462HG20MMGSP Tanggal 1 Oktober 2018 senilai Rp5.000.000,00;
- 3. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2019 dengan NTPN ABDB07QLTB39CL1R Tanggal 26 November 2019 senilai Rp5.000.000,00;
- 4. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2021 dengan NTPN 987696U8E37Q51C3 Tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp5.000.000,00;
- 5. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2022 dengan NTPN 120187QLU6I2PJ20 Tanggal 7 Juni 2022 senilai Rp5.000.000,00;
- 6. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2023 dengan NTPN EEE3A8N3EB0PSOIV Tanggal 27 Desember 2023 senilai Rp5.000.000,00.

Dalam upaya penagihan, Setditjen PKRL telah menyampaikan surat tagihan kepada PT. Survindo Karyatehnik Nusantara sebagai berikut :

- 1. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.1253/DJPRL.1/HP.520/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022;
- 2. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.1503/DJPRL.1/HP.550/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
- 3. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.2276/DJPRL.1/HP.550/IX/2022 tanggal 19 September 2022;
- 4. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.6242/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

5. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.6480/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 21 November 2023.;
6. Surat Sesditjen PRL Nomor : B.3444/DJPKRL.1/HP.520/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan KKP Tahun 2023 telah dilakukan koreksi audited, terdapat 7 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 diantaranya 2 temuan Kepatuhan dengan total nilai temuan sebesar Rp151.892.330,00 yang telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dan 5 temuan SPI antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp48.017.300,00;
2. Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Hibah *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Penatausahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP Tidak Tertib senilai Rp128.661.747,00;
4. Penatausahaan Belanja untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belum Memadai;
5. Penatausahaan Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tidak Tertib;
6. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud Tidak tertib;
7. Penyajian Aset Properti Investasi Belum Memadai.

Atas temuan kepatuhan tersebut, per 30 April 2024 telah diselesaikan secara tuntas berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai telah dilunasi dengan setoran senilai Rp14.515.600,00 NTPN AD6EB6U8EUBCL30P tanggal 28 Maret 2024, setoran senilai Rp10.061.000,00 NTPN 4B048VVEMRR406 tanggal 17 April 2024, setoran senilai Rp8.581.500,00 NTPN B66162G4VPF962OC tanggal 22 Maret 2024, setoran senilai Rp679.200,00 NTPN 0C0FB55DF98PTBL8 tanggal 1 April 2024, setoran senilai Rp7.700.000,00 NTPN 0A6880NA04DA745A tanggal 17 April 2024, dan setoran senilai Rp6.480.000,00 NTPN A2F1C0NA04CRS421 tanggal 1 April 2024;
2. Temuan kelebihan pembayaran Belanja Barang telah dilunasi dengan setoran senilai Rp7.975.691,00 NTPN 37E0D61QV3RSCSLH tanggal 25 April 2024,

setoran senilai Rp456.660,00 NTPN CD1742G4VPIAOVFV tanggal 26 April 2024, setoran senilai Rp59.245.000,00 NTPN 71CEC48VVEN5NPGL tanggal 30 April 2024, setoran senilai Rp28.670.000,00 NTPN 7983355DF99FVVI9 tanggal 29 April 2024, setoran senilai Rp4.839.404,00 NTPN 1757A7QLUP0NBPMMD tanggal 29 April 2024, dan setoran senilai Rp2.688.275,00 NTPN 992EA55DF99G01JT tanggal 26 April 2024.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Tahun 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara Nomor : 3/LHP/XVII/02/2024 terdapat 2 temuan dengan 7 rekomendasi sebagai berikut :

1. Aspek Strategi dan Regulasi untuk mendukung Implementasi Kebijakan PHSL Belum Memadai dengan rekomendasi :
 - a. berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait rekomendasi TPRH;
 - b. berkoordinasi dengan Menteri ESDM tentang : 1) pisah batas kewenangan pengelolaan sedimentasi di laut dengan penambangan pasir laut; 2) penentuan kajian awal berupa sebaran sedimen laut;
 - c. berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan mengenai barang dilarang ekspor serta kebijakan dan pengaturan ekspor;
 - d. menyusun peraturan pendukung yang diamanatkan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 setelah koordinasi dengan K/L terkait selesai;
 - e. menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja tim uji tuntas dan perhitungan kuota kebutuhan pasir laut dalam negeri;
 - f. menetapkan : 1) pedoman perhitungan pasir laut yang diperbolehkan untuk diekspor dan waktu pelaksanaan ekspor pasir laut; 2) mekanisme penetapan dokumen perencanaan atas usulan pembersihan sedimentasi dari pemerintah daerah.
2. Aspek Upaya untuk Mendukung Implementasi Kebijakan PHSL Belum Memadai dengan rekomendasi mengidentifikasi dan mengkaji : a) alokasi anggaran terkait kesiapan implementasi kebijakan PHSL, b) ketersediaan data dan informasi dalam rangka kesiapan implementasi PHSL, c) ketersediaan SDM monitoring dan evaluasi PHSL, dan d) pengembangan aplikasi *e-logbook* pengangkutan hasil

sedimentasi di laut sebagai saran monitoring PHSL.

2. BPSPL Makassar

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada BPSPL Makassar dengan total nilai temuan sebesar Rp7.159.200,00 yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan pemeriksaan ini telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dengan setoran senilai Rp6.480.000,00 NTPN A2F1C0NA04CRS421 tanggal 1 April 2024 dan setoran senilai Rp679.200,00 NTPN 0C0FB55DF98PTBL8 tanggal 1 April 2024.

3. LPSPL Serang

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada LPSPL Serang dengan total nilai temuan sebesar Rp8.581.500,00 yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan pemeriksaan ini telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dengan setoran senilai Rp8.581.500,00 NTPN B66162G4VPF962OC tanggal 22 Maret 2024.

4. LPSPL Sorong

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada LPSPL Sorong dengan total nilai temuan sebesar Rp24.786.717,00 yang telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 yaitu Realisasi Belanja Pemeliharaan Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban senilai Rp13.976.717,00 dan Pembayaran Honorarium Narasumber Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp10.810.000,00. Atas temuan tersebut, per 30 April 2024 telah diselesaikan secara tuntas berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut setoran senilai Rp24.786.717,00 NTPN B44020NA04CV3PB9 tanggal 4 April 2024.

B. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK KKP PDDT 2023-2024

1. Terdapat temuan SPI berupa Penyediaan Fasilitas Kendaraan Roda Empat Tidak Sesuai Peruntukkan, Melebihi Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta Standar Biaya Masukan dengan rekomendasi Dirjen Pengelolaan Kelautan untuk menginstruksikan KPA dan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian atas penyediaan fasilitas kendaraan sewa, pemeliharaan kendaraan, dan belanja BBM kendaraan dinas. Dengan tindak lanjutnya Instruksi Menteri KP Nomor: R.517/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025 dan Surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.358/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025
2. Terdapat temuan keuangan Merekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan untuk menginstruksikan PPK, Pejabat Struktural, dan Pejabat Non Struktural yang

menggunakan kendaraan sewa dan belanja pemeliharaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan agar menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp522.415,000,00 dengan tindak lanjutnya berupa Instruksi Menteri KP Nomor: R.517/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat Instruksi Dirjen PK (Draft) - Masih menunggu diskusi lanjutan dari Biro Keuangan dan BMN, Bukti Setor ke Kas Negara (telah dilakukan setoran ke kas negara sebesar Rp507.697.783,20) sesuai dengan temuan sementara pada tgl 3 Desember 2024 yaitu sebesar Rp587.388.371,47, Terdapat kelebihan bayar sebesar Rp170.306.397,00 dengan rincian : LHP PDTT PDLN 2023 kelebihan Rp129.025.163,20, LHP PDTT PDLN 2024 kelebihan Rp41.281.233,80 sehingga menunggu proses telaah BPK

C. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK KKP LK 2024

1. Berdasarkan konsep temuan pemeriksaan BPK RI terkait dengan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 Tidak Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi temuan SPI berupa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, PPK untuk lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan menguji serta menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dengan tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (masih menunggu/ proses) dan Draft Surat Instruksi Dirjen.
2. KPA untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran belanja barang non 526 sebesar Rp125.816.155,00 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.370.000,00 dengan menyetorkannya ke kas negara atau rekening operasional BLU dengan tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (masih menunggu/ proses), Draft Surat Instruksi Dirjen, Bukti Setor ke Kas Negara telah dilakukan setoran ke Kas Negara tanggal 14 Mei 2025
3. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja 526 Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp431,62 Juta dengan rekomendasi temuan keuangan KPA untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp247.916.514,00 dengan menyetorkan ke kas negara. Rincian Kelebihan Pembayaran sebagai berikut : Pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal senilai Rp31.401.720,00; Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon senilai Rp9.410.217,00; Pengadaan Bangunan dan

Mesin Washing Plan Bima senilai Rp207.104.577,00. Sudah ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PK (masih menunggu/proses), bukti setor ke Kas Negara (telah dilakukan setoran ke kas negara pada bulan April dan Mei 2025)

4. Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional Tidak Sesuai Ketentuan rekomendasi dengan temuan SPI, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, PPK pada masing-masing satker terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja operasional dan non operasional
5. Pembayaran Upah Tenaga Kerja Melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi temuan SPI KPA untuk menghentikan kebijakan pengangkatan pegawai oleh PPK yang tidak mempedomani ketentuan manajemen pegawai dengan tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (Masih menunggu/proses) dan Draft Surat Instruksi Dirjen

D. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK KKP LK Lautra 2024

Berdasarkan konsep temuan pemeriksaan BPK RI terkait dengan Pertanggungjawaban BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Pengelolaan Kelautan selaku Executing Agency secara berjenjang untuk memerintahkan PPK satker terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.692.392,00 dengan menyetor ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal kepada BPK kemudian berkoordinasi dengan CPMU untuk melakukan proses refund; sudah tuntas dan telah disetor kekas dengan rincian Telah disetor ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

Direktorat Jasa Kelautan dengan setoran tanggal 26 Juni 2025 NTPN B93FD55DFIPGJ008 senilai Rp1.674.621,00; Direktorat KEBP dengan setoran Tanggal 26 Juni 2025, NTPN 4A8B10NA0DTII0TG senilai Rp13.407.000,00; Setoran Tanggal 26 Juni 2025, NTPN C148955DFIPGJ1 senilai Rp3.334.253,00; Sekretariat dengan setoran tanggal 26 Juni 2025, NTPN ED4E52G5032BC371 senilai Rp5.369.946,00, BPSPL Denpasar dengan setoran tanggal 26 Juni 2025, NTPN DD12B0NA0DTHAOEH senilai Rp5.889.327,00; Setoran Tanggal 26 Juni 2025, NTPN 40C446U8F7U85L9P senilai Rp556.491,00; BPSPL Makassar dengan setoran tanggal 25 Juni 2025, NTPN A91CA48VVO72UO1D senilai Rp3.042.209,00; Setoran Tanggal 25 Juni 2025 NTPN 3B3453CIFTKMHQGI senilai Rp418.545,00.

E. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan Itjen KKP

1. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024 dengan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penggandaan Buku Peraturan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 senilai Rp46.239.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp20.600.000,00 dengan NTPN Nomor : 879657NAP6IHDHEC tanggal 8 Januari 2024, Rp5.639.000,00 dengan NTPN Nomor : EBA1A555DF9FFC4EN tanggal 25 Juni 2024 dan NTPN Nomor 81AD70NA04P4AN0H tanggal 12 Agustus 2024 dengan total Rp46.239.000,00 sehingga tuntas;
2. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan GGR Tahun 2023 di Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat senilai Rp161.959,00 dengan rincian Rp76.511,17 (CV. Gibran Bima Pratama) dan Rp85.447,83 (CV. Bangun Jaya) dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp161.960,00 dengan NTPN Nomor : E95B148VVEJVJVE7 tanggal 21 Maret 2024;
3. Kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GGR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi senilai Rp4.151.386,38 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp4.151.387,00 dengan NTPN Nomor : 578596U8EUB4R4DO tanggal 19 Maret 2024;
4. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera senilai Rp4.230.627,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp4.230.627,00 dengan NTPN Nomor : C27F71JNFUSQDUNS tanggal 20 Maret 2024;
5. Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMK pada Kab. Banyuwangi senilai Rp1.025.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.025.000,00 dengan NTPN Nomor : E95775229MRC6KLD tanggal 10 Januari 2024;
6. Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMK pada Kota Ambon senilai Rp1.918.400,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.918.400,00 dengan NTPN Nomor : E2C7COJUQHVE5KKK tanggal 10 Januari 2024;
7. Denda Keterlambatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo senilai Rp6.393.528,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp6.393.528,00 dengan NTPN Nomor AA1400JUQHVNMS9A tanggal 10 Januari 2024;
8. Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional Tahun 2024 PT. Cakrawala Rentalindo Sejahtera senilai Rp18.079.996,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp18.079.996,00 dengan NTPN DFE2E6QT9JJ2GRDL tanggal 23

September 2024.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 antara lain :

1. Terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan LHP Nomor : T.595/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 senilai total Rp23.865.000,00, yaitu : a) Pekerjaan pembangunan jembatan oleh CV. Anik Karya senilai Rp765.000,00; b) Pekerjaan revitalisasi gudang garam rakyat oleh CV. Azzam Jaya Sakti senilai Rp3.300.000,00; c) Pekerjaan pembuatan meja kristal oleh PT. Mahardika Mega Prapta senilai Rp9.900.000,00; d) Pekerjaan Bozem, Peminihan evaporator dan waduk air tua oleh CV. Tiga Utama senilai Rp9.900.000,00. Terdapat bukti sebagian pekerjaan telah dilaksanakan yaitu : a) Pekerjaan pembangunan jembatan oleh CV. Anik Karya senilai Rp83.500,00; b) Pekerjaan pembuatan meja kristal oleh PT Mahardika Mega Prapta senilai Rp2.500.000,00 dan Rp5.000.000,00 sehingga masih terdapat selisih senilai Rp16.281.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp16.281.500,00 dengan NTPN Nomor : 390400NA0IVOKN2 tanggal 6 Juni 2024;
2. Kelebihan pembayaran honor narasumber sesuai dengan LHP Nomor : T.36/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 senilai Rp1.530.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 695930NA044QBMNM tanggal 31 Januari 2024.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 yang belum dituntaskan berupa Kelebihan pembayaran kegiatan TP PUGAR TA. 2023 sesuai LHE Nomor : T.575/ITJ.3/HP.410/XI/2023 tanggal 20 November 2023 kepada CV. Dua Putra Jaya senilai Rp1.077.066,00, dan CV. Putra Akram senilai Rp540.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.077.066,00 dan Rp540.000,00 dengan NTPN 9D3F355DF9CLAA27 tanggal 30 Mei 2024;

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

1. Terdapat temuan APIP Tahun 2023 antara lain Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sesuai LHP Nomor : T.558/ITJ.3/HP.550/XI/2023 tanggal 1 November 2023 senilai Rp1.380.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.380.000,00 dengan NTPN Nomor : 4AEF41JNFUN5IV7A tanggal 1 Februari 2024;

2. Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap Senilai Rp1.300.000,00 sesuai LHP Nomor : T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 terdiri dari Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap dari PT. Sanur Putra Pertama senilai Rp500.000,00 telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 4D3141JNFUSM6JJQ tanggal 18 Maret 2024 dan Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap dari CV. Arsa Engineering senilai Rp800.000,00 telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 4D3141JNFUSM6JJQ tanggal 18 Maret 2024; Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1.054.480,00 sesuai LHP Nomor : T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.054.480,00 dengan NTPN No BDA5A1JNFUN5ISI5 tanggal 01 Februari 2024.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

Temuan APIP Tahun 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024 berupa Denda keterlambatan Kegiatan Revitalisasi Gudang Garam Rakyat, Pembangunan Saluran/Jalan Produksi, Integrasi Lahan Pergaraman, dan Geomembran pada Kegiatan PUGAR Tahun 2023 sesuai LHP Nomor : T.555/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp31.360,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp31.360,00 dengan NTPN Nomor : 854CB55DF966QAQD tanggal 14 Maret 2024.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

1. Temuan APIP Tahun 2023 antara lain pertanggungjawaban yang melebihi SBM sesuai LHP Nomor : T.549/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp660.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp660.000,00 dengan NTPN Nomor : F514C2G4VPF2E0E8 tanggal 14 Maret 2024 dan denda keterlambatan atas pemenuhan Output Konsultan Perencana Tidak Lengkap sesuai LHP Nomor : T.549/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp294.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp294.000,00 dengan NTPN Nomor : 92DB148VVEJR8N6I tanggal 14 Maret 2024;
2. Temuan Tahun 2024 pada kegiatan Pembangunan GGR Tahun 2023 yaitu keurangan volume pekerjaan senilai Rp161.959,00 sesuai LHP Nomor T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 dan sudah disetor ke kas negara senilai Rp161.959,00 dengan NTPN Nomor E95B148VVEJVJE7 tanggal 21 Maret 2024.

7. BPSPL Padang

Pada bulan Januari 2024 telah dilaksanakan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 sesuai LHP Nomor : T.44/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, dimana terdapat komponen pekerjaan yang tidak terpasang yaitu saklar triple sebanyak 4 (empat) buah senilai Rp425.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp425.500,00 dengan NTPN Nomor : FDEC32G4VP9BF4C6 tanggal 23 Januari 2024.

8. LPSPL Sorong

Pada bulan Januari 2024 terdapat pengawasan berupa Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), tahun 2023 pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong (LPSPL) Sorong Provinsi Papua Barat sesuai LHP Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, dengan hasil antara lain :

1. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Papua senilai Rp2.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp2.500.000,00 dengan NTPN Nomor : 87FAE48VVEE5DC6G tanggal 31 Januari 2024;
2. Terdapat kelebihan pembayaran jamuan tamu senilai Rp718.080,00 dan telah ditindaklanjuti dengan bukti setor ke kas negara dengan NTPN Nomor : 045716U8EU7UNPM0 senilai Rp718.080,00 tanggal 13 Februari 2024.

9. LKKPN Pekanbaru

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN) Pekanbaru Provinsi Riau sesuai LHP Nomor : T.127/ITJ.3/HP.550/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil antara lain :

1. Pekerjaan Paving Blok pada Mess Kantor Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp713.180,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp713.180,00 dengan NTPN Nomor : 548A86U8EUBONVD tanggal 18 Maret 2024;
2. Terdapat Kurang Bayar Pungut Pajak senilai Rp1.855.653,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.855.653,00 dengan NTPN Nomor : 8480D2G4VPF2N0A2 tanggal 18 Maret 2024;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp118.795,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp118.795,00 dengan NTPN Nomor : 03D577QLUOTD50EB tanggal 18 Maret 2024.

10. BPSPL Pontianak

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak (BPSPL) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai LHP Nomor : T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024 tanggal 9 Februari 2024, dengan hasil antara lain :

1. Pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan Speedboat Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp7.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp7.500.000,00 dengan NTPN Nomor : 56D342G4VPF90RSF tanggal 22 Maret 2024;
2. Kelebihan Pertanggungjawaban Konsumsi Kegiatan/Rapat Senilai Rp1.384.600,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.384.600,00 dengan NTPN Nomor : E8F980NA04AG6SDQ tanggal 22 Maret 2024;
3. Kelebihan Pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp429.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp429.000,00 dengan NTPN Nomor : 5A2D97QLUOTJERKQ tanggal 22 Maret 2024;
4. Kelebihan Pembayaran Penggandaan Laporan senilai Rp1.348.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.348.000,00 dengan NTPN Nomor : B60AE0NA04AG6SLK tanggal 22 Maret 2024;
5. Pembayaran listrik rumah negara tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.012.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.012.500,00 dengan NTPN Nomor : 115D70NA04AG6STC tanggal 22 Maret 2024.

11. BPSPL Makassar

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Prov. Sulawesi Selatan sesuai LHP Nomor : T.152/ITJ.3/HP.110/IV/2024 tanggal 2 April 2024, dengan hasil antara lain :

1. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Mushola BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp3.209.541,00 sesuai NTPN 5C82B6U8EUAVFJD6 tanggal 20 Maret 2024
2. Kelebihan Pembayaran Bahan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut senilai Rp300.000,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp300.000,00 sesuai NTPN 5AA7C61QV3OJ6O82 tanggal 21 Maret 2024

Pada bulan November 2024 telah dilaksanakan pemantauan kegiatan HLN *Ocean for Prosperity* - LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 di BPSPL Makassar sesuai LHP Nomor B.401/ITJ.1/HP.550/XI/2024 Tanggal 23 November 2024, dengan hasil yaitu Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp4.117.600,00 dan telah di setor ke kas negara senilai Rp92.600,00 sesuai NTPN 8CDE8522A0APUM07 tanggal 26 November 2024, senilai Rp25.000,00

sesuai NTPN 01C4E6QT9LFIOM0K tanggal 26 November 2024 dan senilai Rp4.000.000,00 sesuai NTPN 691C5397AB614M2J tanggal 26 November 2024.

12. BKKPN Kupang

Pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan pemantauan pertanggungjawaban keuangan pada BKKPN Kupang TA. 2024 sesuai LHP Nomor B.327/ITJ.1?HP.550/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan hasil antara lain :

1. Terdapat Belanja Konsumsi yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp1.515.000,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp1.515.000,00 sesuai dengan NTPN D06A65UFPPV309P3 tanggal 25 Oktober 2024;
2. Terdapat Kesalahan Perhitungan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Yang Belum Diperhitungkan Dalam RAB pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor BKKPN Kupang senilai Rp7.892.180,00 dan telah disetor ke kas negara senilai Rp7.892.180,00 sesuai dengan NTPN 1A2315229VC3GO3I tanggal 25 Oktober 2024;
3. Terdapat Izin Cuti Sakit dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) yang Belum Dipotong Tunjangan Kinerja senilai Rp157.181,00 dan telah di setor ke kas negaran senilai Rp157.181,00 sesuai NTPN 86E6A7NAPF38NO5L tanggal 25 Oktober 2024.

F. Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tanggal 23 s/d 30 Juni 2025 :

1. Hasil rekapitulasi database sisa temuan pengawasan itjen pada aplikasi SIDAK per 26 Mei 2025 pada Satker Pusat sebanyak 9 (Sembilan) laporan hasil pengawasan terdiri dari 16 temuan dengan 28 rekomendasi/saran dan nilai keuangan Rp.0,00
2. LHP yang terbit dan telah di input kedalam aplikasi SIDAK selama Triwulan II tahun 2025 sebanyak 2 LHP terdiri dari 8 temuan dengan 25 rekomendasi/saran dan nilai keuangan Rp.0 selain itu terdapat 2 LHP dengan 9 (sembilan) temuan dan 26 rekomendasi pada LHP
3. Perkembangan tindak lanjut atas 11 LHP Itjen terdiri dari 25 temuan dengan 54 rekomendasi/saran dan nilai keuangan Rp.0,00, bahwa status tuntas sebanyak 7 (tujuh) temuan (28,00%) dan 10 (sepuluh) rekomendasi/saran (15,82%)
4. Sisa temuan hasil pengawasan Itjen yang masih harus diselesaikan oleh Satker lingkup Ditjen PK adalah sebanyak 7 (tujuh) LHP terdiri dari 18 temuan dengan 44 rekomendasi/saran dengan nilai keuangan Rp.0,00
5. Perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan total dari satker DJPK temuan awal 80, saran 153 dengan nilai keuangan 13.623.846 dan tindak lanjut tuntas untuk temuan 78, saran 150 dengan nilai keuangan 13.623.846
6. Sisa temuan ada 2 dan saran ada 3 untuk nilai keuangan sudah tuntas, maka nilai capaian IKU DJPK senilai 98,04 %

G. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPKP

Laporan Audit Independen (LAI) BPKP Nomor LAI 97/PW20/2/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas kegiatan Coremap CTI tahun 2014 dengan nilai temuan sebesar Rp123.046.000,00. Pada Tahun 2015, terdapat setoran sebesar Rp70.300.000,00 sehingga sisa temuan sebesar Rp52.746.000,00, adapun rincian tindak lanjutnya pada TA. 2024 sebagai berikut :

1. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan oleh CV. Mitra Alami pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI - 97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 6519948VVEE6IU9G tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp5.000.000,00;
2. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 5CA107QLUOQC9S6N tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp1.000.000,00;
3. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 5752D55DF96JOM7Q tanggal 28 Maret 2024 senilai Rp1.000.000,00;
4. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 54FDF7QLUP0M6CR0 tanggal 27 April 2024 senilai Rp1.000.000,00;
5. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : DCCEE7QLUP3N4J4H tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp1.000.000,00;
6. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : E88543CIFKANITOE tanggal 28 Juni 2024 senilai Rp1.000.000,00;
7. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 2F8467QLUPCN5BUI tanggal 30 Agustus 2024 senilai Rp1.000.000,00;
8. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-

97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : AC77361QV4ASLD8D tanggal 28 September 2024 senilai Rp1.000.000,00;

9. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN FE5B26U8EV08L7UI tanggal 29 Oktober 2024 senilai Rp1.000.000,00; dan
10. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN B02C81JNFVKUACHP tanggal 30 November 2024 senilai Rp1.000.000.

Sedangkan Laporan Audit Independen (LAI) BPKP Nomor : LAI-2445/PW20/2/2010 tanggal 9 Juni 2010 atas kegiatan Coremap II tahun 2009 dengan nilai temuan sebesar Rp234.478.857,81 telah ditindaklanjuti sebesar Rp149.790.733,00 masih terdapat sisa temuan sebesar Rp84.688.124,00.

F.5. Jurnal Koreksi atau Reklasifikasi KKP, Kemenkeu, dan BPK RI

Pada Laporan Keuangan *Audited* 2023, terdapat beberapa jurnal koreksi internal (KKP dan Kemenkeu) serta koreksi BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sehingga terdapat jurnal manual pada Laporan Keuangan yang harus dijurnal balik ketika adanya penyetoran ke kas negara. Koreksi terdapat pada 10 satker dengan rincian 1 satker pusat Setditjen PRL, 4 satker UPT yaitu BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan LKKPN Pekanbaru, serta 5 satker Tugas Pembantuan. Beberapa jurnal manual yang telah dilakukan pada Tahun 2024 ini antara lain sebagai berikut :

1. Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) (114112) senilai Rp26.368.232,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL;
2. Piutang Lainnya (115212) senilai Rp374.242.103,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan;
3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) senilai Rp149.081.709,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan;
4. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) senilai Rp1.131.459,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan.

F.6. Rekening Pemerintah

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.7. Pengungkapan Lain-Lain

F.7.1. Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa

Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.285/MEN-KP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Nipa Kota Batam dan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 234/MEN-KP/III/2014, dapat disampaikan bahwa mitra terpilih untuk KSP berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan perikanan seluas 24 hektar adalah perusahaan Surya Mina Asinusa KSO. Berdasarkan perjanjian KSP, jangka waktu KSP adalah 30 tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang.

Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi pemerintah dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% per tahun.

Untuk obyek KSP BMN KKP berupa tanah seluas 24 hektar adalah :

- a. Nilai kontribusi tetap tahun pertama (2014) sebesar Rp1.155.102.799,65
- b. Nilai kontribusi tetap tahun kedua (2015) sebesar Rp1.241.735.509,62
- c. Nilai kontribusi tetap tahun ketiga (2016) sebesar Rp1.334.865.672,85
- d. Nilai kontribusi tetap tahun keempat (2017) sebesar Rp1.434.980.598,31
- e. Nilai kontribusi tetap tahun kelima (2018) sebesar Rp1.542.604.143,18
- f. Nilai kontribusi tetap tahun keenam (2019) sebesar Rp1.658.299.453,92
- g. Nilai kontribusi tetap tahun ketujuh (2020) sebesar Rp1.782.671.912,96
- h. Nilai kontribusi tetap tahun kedelapan (2021) sebesar Rp1.916.372.306,44
- i. Nilai kontribusi tetap tahun kesembilan (2022) sebesar Rp2.060.100.229,42
- j. Nilai kontribusi tetap tahun kesepuluh (2023) sebesar Rp2.214.607.746,63
- k. Nilai kontribusi tetap tahun kesebelas (2024) sebesar **Rp1.190.351.664,00**
- l. Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu KSP BMN di Pulau Nipa sebesar Rp119.436.939.332,00

Pada tahun 2024 ini, KKP bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk tahun 2024 dan 2025 sesuai surat Nomor B.192/MEN-SJ/KU.530/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Permohonan Faktor Penyesuai atas Besaran Kontribusi Tetap Pulau Nipa. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara, pada prinsipnya keringanan tersebut dapat disetujui.

Besaran keringanan pembayaran kontribusi tetap karena kondisi tertentu bencana non alam dengan faktor penyesuaian sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 dan 2025. Dalam hal ini pada tahun 2024 seharusnya pembayaran kontribusi tetap senilai Rp2.380.703.328,00, namun dengan adanya keringanan pembayaran sehingga KSO membayar senilai Rp1.190.351.664,00. Sementara untuk tahun 2025 nanti seharusnya pembayaran kontribusi tetap senilai Rp2.559.256.077,00, namun dengan adanya keringanan pembayaran sehingga KSO membayar senilai Rp1.279.628.039,00.

Dengan adanya keringanan pembayaran kontribusi tetap pada tahun 2024 dan 2025, maka diperlukan penyesuaian nilai kontribusi tetap selama jangka waktu KSP P. Nipa yang sebelumnya senilai Rp119.436.939.332,00. Penyesuaian angka tersebut akan mempengaruhi nilai Piutang Jangka Panjang pada Laporan Keuangan akhir tahun 2024 yang akan dilakukan pada periode Semester II 2024.

Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi pembagian keuntungan KSP BMN KKP di Pulau Nipa sebesar 6,95% dari *net cash flow* per tahun, dengan nilai minimal sebesar Rp1.414.905.240,00. Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi dalam bentuk hibah barang untuk KKP adalah berupa bangunan kantor terintegrasi, *speedboat* dan *furniture*/peralatan kantor senilai Rp5.200.000.000,00.

Kontribusi langsung kepada negara berupa sisa aset berupa bangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir KSP untuk KKP senilai Rp1.704.073.842.605,00. Berdasarkan Surat Plt. Dirjen PRL Nomor B.2410/DJPRL/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Hal Tanggapan atas Permohonan Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa yang diajukan oleh Pimpinan Surya Mina Asinusa (SMA) KSO, Ditjen PRL menyampaikan bahwa :

1. KSP BMN di Pulau Nipa Kota Batam antara KKP dan SMA KSO telah mendapat catatan BPK dalam Laporan Keuangan KKP karena dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi *profit sharing* sesuai perjanjian, khususnya terkait hak Negara berupa hibah bangunan kantor terintegrasi dan *furniture*/peralatan kantor yang seharusnya diserahkan oleh SMA KSO;
2. Telah dilakukan pertemuan pada tanggal 14 September 2021 di KKP yang turut dihadiri oleh pihak Kemhan, Kemenkeu, dan pihak SMA KSO dalam rangka pembahasan tindak lanjut permohonan addendum kedua perjanjian KSP Pulau Nipa, Kota Batam;
3. Merujuk pada hasil pertemuan tersebut pada poin 2 di atas, maka permohonan Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa untuk perpanjangan masa konstruksi

belum dapat disetujui, masih menunggu penyelesaian penyusunan model bisnis oleh pihak SMA KSO.

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022, dilakukan rapat Pokja Gabungan Pulau Nipa yang dipimpin oleh Plt. Dirjen PRL dan dihadiri oleh Direktur P4K, perwakilan dari Baranahan-Kemhan, perwakilan Direktorat PKNSI DJKN-Kemenkeu, Inspektorat III KKP, Bapak Wing Indrasmoro (Authorized Representative SMA KSO), PT. Surya Mina Bunkerindo diwakili oleh Direktur Utama PP Energi (Bapak Ario Setyawan beserta tim), diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak SMA KSO akan menyerahkan secara resmi dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* melalui surat kepada KKP dan Kemhan
2. Pembahasan dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* oleh KKP, Kemhan dan Kemenkeu secara paralel dilakukan setelah diterimanya dokumen secara resmi
3. Dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* KSP Pulau Nipa perlu ditambahkan penjelasan dan ilustrasi tentang *profit sharing* dan *revenue sharing* beserta kelebihan masing-masing, serta informasi tentang biaya investasi (*investment cost*) dan biaya operasional dan pemeliharaan (*overhead*)
4. Addendum kedua KSP Pulau Nipa mempertimbangkan Surat Persetujuan Menkeu Tahun 2013 dan mengacu pada PMK Nomor 115 Tahun 2020 serta KMK Nomor 213 Tahun 2021
5. Addendum Kedua KSP Pulau Nipa disetujui berdasarkan hasil pembahasan KKP, Kemhan, dan Kemenkeu atas Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* KSP Pulau Nipa, Kota Batam

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022, dilakukan rapat Pembahasan Kajian Model Bisnis *Oil Storage* Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, yang dihadiri oleh Direktur P4K, PELP Ahli Utama Ditjen PRL, Perwakilan dari Pusat BMN-KEMHAN, Surya Mina Asinusa KSO (Bapak Ario Setyawan dan Tim, Bapak Satrio Mursandhi dan Tim), diperoleh Kesepakatan Rapat sebagai berikut :

1. Pihak SMA KSO sudah menyusun Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* di Pulau Nipa namun masih menunggu proses persetujuan dari Dewan Direksi PT. PP (Persero) Tbk.
2. Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* dalam KSP Pulau Nipa akan dibahas secara final dengan KKP dan Kemhan pada minggu kedua April 2022.

Selain itu berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tanggal 01 Agustus 2022 Nomor B.3978/DJPRL/VIII/2022 terkait Penyesuaian Model Bisnis

Kerjasama Pemanfaatan Sebagian BMN KKP di Pulau Nipa, Kota Batam, disampaikan hal-hal berikut :

1. KSP Pulau Nipa didasarkan pada surat persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor: S-502/MK.6/2013 Tanggal 15 November 2013 tentang KSP sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipa, Kota Batam dan Perjanjian KSP sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipa, Kota Batam antara MKP dan Direktur Surya Mina Asinusa KSO.
2. Hal-hal yang menjadi substansi persetujuan Menteri Keuangan tersebut termasuk :
 - a. Nilai buku aset yang dikerjasamakan;
 - b. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
 - c. Besaran kontribusi tetap per tahun dan persentase kenaikannya;
 - d. Besaran pembagian keuntungan (*profit sharing*) minimal per tahun;
 - e. Asumsi besaran nilai investasi;
 - f. Batas waktu pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta denda keterlambatannya.
3. Mengingat bahwa beberapa poin usulan penyesuaian model bisnis dan addendum, perjanjian KSP Pulau Nipa menyangkut masa operasi, nilai investasi, kontribusi tetap, profit sharing, nilai sisa aset, dan jangka waktu KSP yang menjadi kewenangan Kemenkeu, maka hal-hal tersebut perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN;
4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, mengingat bahwa persetujuan penyesuaian model bisnis oleh Kementerian Keuangan ini menjadi prasyarat bagi dilakukannya Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa-Kota Batam, maka dimohon kepada pihak SMA KSO untuk menyiapkan hasil kajian dan data dukung argumentasi permohonan penyesuaian model bisnis KSP Pulau Nipa dimaksud;
5. Terkait permohonan penangguhan kewajiban pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022 sampai dengan akhir bulan Desember 2022, disampaikan bahwa :
 - a. berdasarkan Akta Perjanjian KSP Pulau Nipa Nomor 9 Tanggal 16 April 2014, Pihak SMA KSO wajib memberikan jaminan pelaksanaan salah satunya berupa jaminan kontribusi tetap yang diperbarui setiap tahun selama jangka waktu kerjasama pada tanggal 1 April pada tahun berjalan, dimana untuk tahun 2022 nilainya adalah sebesar 100% dari nilai kontribusi tetap tahun 2022;
 - b. mengingat bahwa Pihak SMA KSO tidak menyampaikan jaminan kontribusi tetap tahun 2022, dan kondisi pandemi COVID-19 sudah menurun dan terkendali, maka KKP tidak dapat memberikan penangguhan kewajiban

dimaksud dan meminta pihak SMA KSP segera memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022 serta menyampaikan jaminan kontribusi tetap Tahun 2023 sesuai Pasal 15 Akta Perjanjian KSO Pulau Nipa Nomor 9 Tanggal 16 April 2014.

Gambar F.1 Proyek Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa

Pada tanggal 18 Agustus 2023 terdapat surat Surya Mina Asinusa KSO perihal Usulan Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Nomor : 013/SMAK/VIII/2023 yang pada garis besar berisi permasalahan yang dihadapi KSO yang mengakibatkan terhentinya progres pembangunan di Pulau Nipa, serta adanya penyesuaian investasi yang cukup signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perjanjian KSP Pulau Nipa melalui Amandemen Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa diantaranya yaitu meminta tambahan waktu selama 6 (enam) tahun.

Setelah itu, terdapat hasil revidi dari Inspektorat III KKP Nomor : T.489/ITJ.3/HP.350/IX/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Hasil Revidi Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam. Rekomendasi dari hasil revidi tersebut yaitu agar Direktur Jenderal PKRL menginstruksikan secara tertulis kepada :

1. Tim Pokja Gabungan Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa untuk menyusun draft Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa setelah mendapat persetujuan perubahan KSP sebagian BMN KKP berupa tanah di Pulau Nipa, Kota Batam dari Menteri Keuangan dan
2. Pihak Surya Mina Asinusa KSO untuk melengkapi : (a) Laporan keuangan KSO yang diaudit oleh auditor independen selama 3 (tiga) tahun terakhir dan (b) SPTJM oleh KSO meliputi kebenaran formil dan materil atas permohonan keringanan

pembayaran kontribusi tetap dan laporan keuangan, guna pemenuhan persyaratan persetujuan faktor penyesuaian pembayaran kontribusi tetap.

3. Terkait kerja sama pemanfaatan pulau NIPA terdapat Berita Acara Serah Terima Pengembalian Objek Kerjasama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan No. BAST B.3/DJPK/PL.720/III/2025 dan No.005B/SMAK/III/2025 pada tanggal 20 Maret 2025
4. Terkait kerja sama pemanfaatan pulau NIPA terdapat Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surya Mina Asinusa KSO dengan Nomor : B.2/DJPK/PRL.240/III/2025 dan Nomor: 005A/SMAK/III/2025 pada tanggal 20 Maret 2025

F.7.2. BMKT (Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam)

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, BMKT adalah salah satu bentuk benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, serta tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 tahun. Melalui UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, maka BMKT secara filosofis tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi kawasan di air sebagai kesatuan setelah melalui proses penetapan. Secara sosiologis juga telah mencakup aturan kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. secara yuridis mengatur hal yang terkait dengan pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan melalui zonasi dalam kawasan cagar budaya.

Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi pelayaran dunia sejak dahulu, menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi memang tidak mengejutkan ketika kapal tenggelam dan muatannya (BMKT) banyak ditemukan terdeposit di perairan nusantara. Berdasarkan estimasi ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Perairan Bangka-Belitung, Laut Jawa. Sebaran kapal tenggelam tersebut umumnya membawa komoditi dan barang dari Cina, Asia Barat dan Eropa seperti Belanda (VOC), Inggris, Spanyol. Kekayaan laut termasuk Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

BMKT memiliki nilai yang kompleks, tidak saja secara ekonomi tapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Teka-teki mengenai perdagangan, teknologi perkapalan dan

hubungan antar bangsa dapat terjawab melalui temuan kapal dan BMKT. Saat ini, Indonesia memiliki potensi peninggalan *shipwrecks* yang tinggi. Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US\$ 80 ribu - 18 juta dan apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dapat menghasilkan US\$ 800 – 126,000/bulan/lokasi. Nilai inilah yang kemudian mendasari Pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain, karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai negara maritim.



Gambar F.2 Galeri BMKT, GMB IV, KKP

Sebagai kekayaan bahari, pengawasan pengelolaan BMKT terus ditingkatkan. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), dalam jangka pendek melakukan percepatan penyusunan strategi pengawasan terpadu pada BMKT dan melaksanakan pengawasan terpadu, antar lembaga, seperti TNI-AL dan POLRI. Selain itu, pengawasan BMKT juga akan diintegrasikan dengan pengawasan *illegal fishing*. Koordinasi cepat pun dilakukan dengan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) terkait BMKT, kebijakan dan rencana pengelolaannya ke depan. Selain rencana jangka pendek, pemerintah juga memiliki rencana jangka panjang bagi pengelolaan BMKT. Sosialisasi intensif kepada masyarakat akan dilakukan lebih dalam, terutama mengenai *shifting policy* pengelolaan BMKT menjadi pengangkatan BMKT akan ditangani langsung oleh negara, sekaligus langkah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga potensi BMKT. Tahap selanjutnya

adalah menyusun rencana keterlibatan pemerintah lokal maupun masyarakat dalam pengelolaan BMKT.



Gambar F.3 Kegiatan *Update Geotagging* BMKT di *Warehouse*, Cileungsi

Dimulai tahun 2016 Direktorat Teknis yang menangani BMKT pindah dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kewenangan Direktorat Jasa Kelautan. Terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) disimpan dan dikuasai oleh KKP dengan rincian yang disajikan pada Tabel F.1.

Tabel F.1. Tabel BMKT Disimpan dan Dikuasai KKP

No	Pengangkatan BMKT	Jumlah (buah) *Data inventarisasi terpadu PANNAS BMKT	Lokasi Penyimpanan	Status	Nilai SIMAK BMN	Pencatatan BMN
1.	Laut Jawa Utara Cirebon	122,025	Cileungsi dan MHG	- Bagian Pemerintah - Sedang dihitung ulang nilai pada bagian pemerintah, karena nilai tsb adalah nilai total taksasi sebelum BMKT dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah PSP - Telah dilakukan penilaian	Th 2020: Rp. 872.944.768 1.179 keping	Maret 2022: Rp. 104,422,110 1.370 keping
2.	Pulau Buaya	11,171	Cileungsi dan MHG	- Bagian Pemerintah - Diusulkan PSP - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN, proses melengkapi data	

3.	Belitung / Tuban	15,353	Cileungsi dan MHG	- Bagian Pemerintah - Telah PSP - Telah dilakukan penilaian	Th. 2020: Rp.54.981.186 821 keping	Maret 2022: Rp.1,199,862,163 862 keping
4.	Jepara	14,093	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
5.	Karang Heluputan	10,504	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
6.	Teluk Sumpat	17,243	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
7.	Ujung Pamanukan	44,506	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
8.	Karawang	7,759	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
9	Belitung Timur	32,816	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
10	Karang Cina	29,736	Sawangan	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
11	Blanakan	13.149	Sawangan	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
12	Batu Belobang	10,221	Batam	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
13	Kijang	177	Batam	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
TOTAL		328.753				

BPK-RI merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan kepada KPB, supaya segera mencatat Aset Tetap BMKT sebanyak 135.378 keping ke dalam SIMAK BMN. Sebagai tindak lanjut atas Temuan BPK-RI tersebut di atas, PKPB Direktorat Jasa Kelautan sudah melakukan pencatatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 135.378 keping pada Modul Aset Tetap (Aplikasi SAKTI) progres 100%, Penatausahaan pada plugin wasdal (PSP BMKT) sejumlah 137.378 NUP dengan progres 100%, dan Penatausahaan pada Master Aset (foto geotagging) sejumlah 109.786 NUP dengan progres 80%.

F.7.3. Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Pada Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal PKRL mempunyai anggaran awal sebesar Rp74.810.000.000,00 untuk belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang direvisi sehingga menjadi sebesar Rp72.270.060.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.117.097.115,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp11.102.685,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp71.105.994.430,00. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat lima akun belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yaitu :

- a) Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526112)
- b) Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526113)
- c) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526114)
- d) Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526115)
- e) Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526311)

Rincian realisasi MAK 526 telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK LRA. Rincian saldo akhir dari MAK 526 yang terdapat pada neraca dapat dilihat pada penjelasan CaLK Neraca. Rincian beban MAK 526 atau yang telah diserahkan berdasarkan BAST, telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK LO. Sementara rincian belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per satker dan keterangan terkait transaksi mutasi belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dijelaskan pada Laporan BMN bagian Persediaan per 31 Desember 2024.

F.7.4. Belanja dalam rangka Penanganan Dampak Wabah Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan. Salah satu kebijakan Pemerintah yang dilakukan adalah merevisi APBN/APBD TA. 2021 dan 2022 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi Covid-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus Covid-19 semestinya digunakan s.d Semester I 2023 atau s.d berakhirnya status pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Penggunaan Akun Khusus Covid-19, seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga termasuk Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tidak lagi menggunakan akun belanja khusus Covid-19 mulai Semester II tahun 2023 dan TA. 2024 ini. Bagi Satuan Kerja yang masih memiliki akun Covid-19 dan yang telah menggunakan akun belanja khusus Covid-19, agar melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku dan panduan *mapping* dari akun belanja khusus Covid-19 ke akun reguler.

Pada TA. 2024 awalnya terdapat dua akun terkait Penanganan Pandemi Covid-19 yang hanya terdiri dari Belanja Barang. Pagu belanja Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp0,00 dari anggaran semula Rp23.000.000,00 dengan realisasi 0,00 atau 0%. Pagu awal belanja akun Covid-19 tersebut terdapat pada akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dan Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) yang hanya terdapat pada satu satker yaitu satker pusat Setditjen PKRL. Rincian belanja pada akun ini awalnya direncanakan berupa pengadaan masker dan *hand sanitizer*, pembelian vitamin, dan penambah daya tahan tubuh.

F.7.5. Program Prioritas Nasional 2024

Program Prioritas Nasional [PN] Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah tersaji pada aplikasi MonSakti. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Monev PA OmSPAN milik Bappenas-Kemenkeu dan telah dilakukan analisis terhadap RO yang terkait DJPKRL diketahui terdapat realisasi Program PN senilai Rp253.723.604.897,00 atau 55,07% dari pagu anggaran senilai Rp460.766.097.000,00. Persentase realisasi tergolong kecil jika dibandingkan dengan kegiatan Non Prioritas Nasional dimana realisasi sebesar Rp215.071.844.837,00 atau 96,32% dari pagu anggaran senilai Rp223.287.147.000,00. Realisasi Program PN terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan seluruh satker Tugas Pembantuan sejumlah 34 satker, sehingga seluruh satker telah merealisasikan program PN untuk tahun 2024 ini.

Selanjutnya pada data menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional terbesar untuk seluruh satker lingkup Ditjen PKRL terdapat pada dua satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Prov. Papua dan Dinas KP Prov. Papua Barat yaitu 100% sementara yang terkecil yaitu satker Setditjen PKRL sebesar 47,36%. Untuk tingkat UPT yang tertinggi yaitu LKKPN Pekanbaru sebesar 98,65% sementara yang terendah yaitu BPSPL Denpasar senilai 85,70%.

Untuk realisasi Prioritas Nasional per Kegiatan yang terbesar yaitu kegiatan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebesar 99,97% dan Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN sebesar 99,96%. Sementara untuk realisasi terkecil yaitu pada kegiatan NSPK Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 64,74% dan Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU) belum realisasi sama sekali atau 0% dengan pagu anggaran sebesar Rp187.100.000.000,00. Adapun rincian realisasi atas Program Prioritas Nasional [PN] DJPKRL Tahun 2024 per satker per kegiatan terdapat pada Lampiran.

F.7.6. Capaian Output Ditjen PKRL Tahun 2024

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Capaian output pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah bagian dari pelaporan data yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Pelaporan ini bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas. Pelaporan data capaian output juga merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang capaian output pada aplikasi SAKTI :

- Pengisian capaian output wajib dilakukan setiap bulan sebelum melakukan tutup buku;

- Pengisian capaian output tidak bersifat akumulatif;
- Satker yang belum pernah merekam capaian output harus melakukan perekaman mulai dari bulan Januari dengan nilai capaian per bulan.

Seluruh satker telah menginput capaian output pada aplikasi SAKTI. Terdapat 477 jumlah output pada DIPA dengan yang terkonfirmasi sejumlah 477 atau 100% (rincian terdapat pada lampiran). Jumlah capaian output terkonfirmasi yang terbesar pada satker lingkup Ditjen PKRL terdapat pada satker Setditjen PKRL sejumlah 63 capaian output, khusus UPT yang terbesar terdapat pada satker BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, dan LPSPL Sorong sejumlah 23 capaian output, sementara pada Tugas Pembantuan yang terbesar terdapat pada satker Dinas KP Prov. Aceh sejumlah 10 capaian output.

F.7.7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Proyek *Ocean for Prosperity* - LAUTRA bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan Konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih, dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran. Adapun lokasi yang menjadi daerah sasaran proyek ini terdiri dari 11 Provinsi (20 Kawasan Konservasi dengan rincian : 8 Kawasan Konservasi Nasional, 7 Kawasan Konservasi Daerah, dan 5 Kawasan Konservasi Baru) dan 3 WPPNRI (714, 715, dan 718) dengan rincian :

- 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Provinsi Sulawesi Tenggara
- 4) Provinsi Sulawesi Utara
- 5) Provinsi Gorontalo
- 6) Provinsi Sulawesi Tengah
- 7) Provinsi Sulawesi Selatan
- 8) Provinsi Maluku
- 9) Provinsi Maluku Utara
- 10) Provinsi Papua
- 11) Provinsi Papua Barat

LAUTRA akan didukung komponen pembiayaan pinjaman dan hibah dari Bank Dunia. Untuk mencapai tujuan proyek, kegiatan LAUTRA dirancang dan dilaksanakan melalui 4 komponen. LAUTRA akan dibiayai melalui *Investment Project Financing (IPF)*. Total pembiayaan sebesar US\$ 210 juta, terdiri dari pinjaman dan hibah. *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* memberikan pinjaman sebesar US\$ 200 juta. *PROBLUE Multi-Donor Trust Fund (MDTF)* akan memberikan hibah sebesar US\$ 5

juta, dan *Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources (OCEANS) Multi-Donor Trust Fund* akan memberikan hibah sebesar US\$ 5 juta. Kegiatan akan berlangsung selama 60 bulan (5 tahun) dari tahun 2023 s.d 2028 (3 tahun khusus HLN Blue Finance).

Pada tahun 2023, terdapat alokasi anggaran Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA sebesar Rp100.000.000,00 pada Komponen 2362.REA.002.055 PHLN INSAN TERANG - LAUTRA untuk mendukung Komponen 1. Namun, anggaran PHLN tersebut mengalami pemblokiran oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dikarenakan belum terbitnya *Loan Agreement* (LA) dan *Grant Agreement* (GA) antara Pemerintah Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan dengan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) di awal tahun 2023 dan belum adanya Rincian Output (RO) Prioritas Nasional untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA TA 2023.

Berikut disampaikan kronologis rencana penarikan anggaran *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA :

1. Penerbitan Rekening Khusus untuk :
 - Pinjaman LAUTRA No IBRD 9498 ID dengan nomor 601353411980, berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan *Settlement*, Kementerian Keuangan Nomor S-299/PR.8/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penerbitan Nomor Register Pinjaman untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Hibah LAUTRA TF C0495 dengan nomor 602205411980, berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan *Settlement*, Kementerian Keuangan Nomor S-300/PR.8/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Rencana Kerja Tahunan atau *Annual Work Plan* (AWP) Tahun 2023 mengalami penyesuaian rincian kegiatan dan anggaran sesuai dengan Arahan Pimpinan berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan *Ocean for Prosperity Project* - Lautra tanggal 18 Agustus 2023, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses untuk pengajuan Surat persetujuan anggaran atau *No Objection Letter* (NOL) dari *World Bank* (WB);
3. *World Bank* (WB) telah menyampaikan persetujuan anggaran atau *No Objection Letter* (NOL) untuk revisi AWP Tahun 2024 *Ocean for Prosperity Project* - Lautra berdasarkan Surat World Bank tanggal 21 Desember 2023 perihal *No Objection to the Revised Annual Work Plan 2024 Ocean for Prosperity (LAUTRA) Project*;

4. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Usulan Revisi Rencana Kerja Tahun 2023 antara Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 terkait penambahan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA TA. 2023.

Progres terakhir dari kegiatan ini yaitu mengusulkan pengajuan dokumen *Clearance* melalui Nota Dinas ke Sekretariat Jenderal KKP serta proses usulan revisi percepatan penarikan anggaran (target akhir Juli).

Selain itu juga terdapat Pinjaman dari Kredit Swasta Asing (KSA) kegiatan *Development of the System for Monitoring and Controlling of Marine Space Utilization (MSU)* senilai USD 80 Juta selama 2 tahun (2024 s.d 2025). Kegiatan ini mencakup 5 kawasan yaitu Batam, DKI Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Progres terakhir diantaranya yaitu :

- Mengirimkan permohonan perpanjangan PSP kepada Menteri Keuangan
- Koordinasi dan permintaan fatwa terkait mekanisme pengadaan Barang dan Jasa Project MSU
- Berkoordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PKRL, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Itjen terkait *exit strategy* dan penempatan alat pasca pengadaan barang/jasa MSU
- Berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait *clearance project* MSU

Selain itu juga terdapat Hibah Langsung berbentuk Jasa sesuai dengan BAST yang ditandatangani antara Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut KKP dan USAID Indonesia pada 27 Februari 2024 untuk program USAID Konservasi Laut Efektif (Kolektif) dalam kerangka kerja sama hibah *Grant Implementation Agreement (GIA) on Marine and Fisheries Portfolio (MFP)* tahun 2022-2027 sejumlah USD1.015.143 atau setara dengan Rp15.800.713.582,00. Hibah dengan Nomor Register 23D5SAMA telah mendapat Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Nomor 816598104909754891 tanggal 3 Mei 2024.

Khusus terkait dengan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang bersumber dari kegiatan Lautra telah dijelaskan secara detail pada Laporan PHLN proyek Lautra untuk satker lingkup Ditjen PKRL TA. 2024.

F.7.8. Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

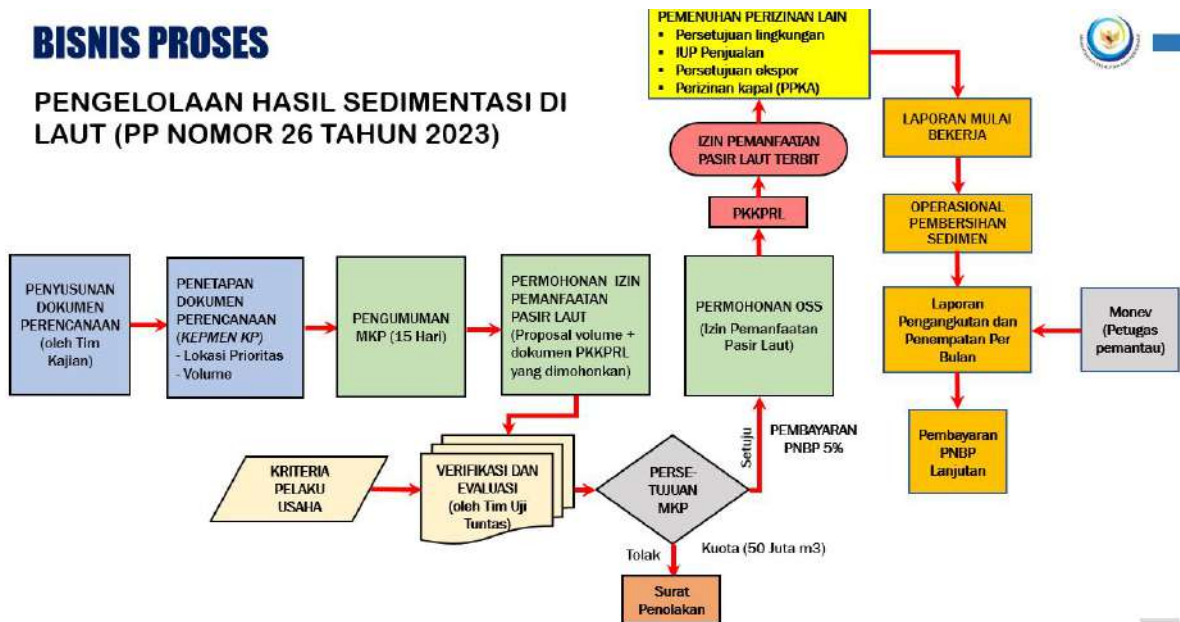
Terdapat pada Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk :

- a) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut dan
- b) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikecualikan pada :

- a) daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus;
- b) wilayah izin usaha pertambangan;
- c) alur pelayaran; dan
- d) zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi

Sedangkan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada zona inti kawasan konservasi dilakukan oleh unit organisasi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan.



Gambar F.4 Bagan Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan (oleh Tim Kajian)
- Penetapan Dokumen Perencanaan (Kepmen KP) (lokasi prioritas dan volume)
- Pengumuman MKP (15 hari)
- Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (proposal volume + dokumen PKKPR yang dimohonkan)

- Verifikasi dan evaluasi (oleh tim uji tuntas)
- Persetujuan MKP
- Permohonan OSS (Izin Pemanfaatan Pasir Laut)
- PKKPR
- Izin Pemanfaatan Pasir Laut Terbit
- Pemenuhan perizinan lain (persetujuan lingkungan, IUP penjualan, persetujuan ekspor, perizinan kapal/PPKA)
- Laporan Mulai Bekerja
- Operasional Pembersihan Sedimen
- Laporan pengangkutan dan penempatan per Bulan
- Pembayaran PNBP Lanjutan

F.7.9. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Strategi utama dari kegiatan konservasi yaitu perluasan Kawasan Konservasi KK dan pengelolaan efektif kawasan konservasi dan jenis. Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia saat ini mencapai 29,3 Juta Ha. Kawasan konservasi seluas 30% yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan produksi oksigen, menjaga keberlanjutan stok ikan, melindungi ekosistem penting perairan dan stok karbon. Strategi pencapaian perluasan kawasan konservasi diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Regulasi dan SOP yang memperketat perlindungan KK
2. Memperluas KK yang Proporsional
3. Membangun Sistem Monitoring berbasis Teknologi
4. Memperkuat pengelolaan kawasan konservasi
5. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
6. Memperluas Insentif/partisipasi dalam pengelolaan KK

Penggunaan PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konservasi diantaranya yaitu :

- a. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan target Penyebaran Informasi dan Regulasi terkait Pelayanan Perijinan Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi untuk Penyadartahuan Stakehlder terka dan Peningkatan Kepatuhan Stakeholder terkait terhadap layanan perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- b. Kegiatan Pengembangan Sistem Perijinan terintegrasi dengan target *updating* dan *maintenance* menu aplikasi pelayanan dalam optimalisasi pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi serta Implementasi Peraturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- c. Kegiatan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan target Penyusunan Revisi 2 Permen KP dan 6 Kepdirjen serta Penyusunan Bahan Sosialisasi dan Publikasi

F.7.10. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel dan Pipa Bawah Laut

Sampai saat ini, kondisi penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib, dan belum tertata sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Kondisi penggelaran pipa/kabel bawah laut yang tidak teratur, akan menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut/pelayaran, pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, dan kegiatan lainnya. Semrawutnya pipa dan kabel bawah laut dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut dan menyebabkan Pemerintah kesulitan dalam mengontrol penggelaran kabel dan pipa bawah laut. Sebagai upaya terobosan, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional (Timnas) Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis. Tugas Timnas ini salah satunya melakukan penataan koridor penggelaran pipa dan kabel bawah laut. Pada awalnya, Timnas Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut ditetapkan dengan Kepmenko Marvest, sebagaimana terakhir telah diubah melalui Kepmenko Nomor 124/DII Tahun 2022 tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang merupakan salah satu terobosan nyata pemerintah dalam menangani permasalahan semrawutnya kabel bawah laut. Dalam Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, dilampirkan Peta dan daftar koordinat sebagai arahan penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) berupa 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut dan 209 BMH (*Beach Main Hole*), termasuk 4 lokasi *Landing Stations* yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura. Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi, yang berfungsi sebagai alas/dasar dalam penerbitan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Berdasarkan Pasal 113 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, penggelaran SKKL merupakan jenis kegiatan yang sifatnya menetap sehingga wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dasar penentuan tarif PNBPN untuk perijinan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut telah diterbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)

Gambar F.5 Jenis PNBPN PKKPRK Kabel dan Pipa Bawah Laut

KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut yang ditujukan untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan penggelaran SKKL. Untuk itu, dilakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL. Kegiatan penggelaran SKKL yang terbukti terjadi pelanggaran, diantaranya tidak memiliki, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang SanksiAdministratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas instalasi dan bangunan di laut, KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.

F.7.11. Properti Investasi

Berdasarkan konsep hasil temuan BPK-RI Nomor 52/KKP/LK-KKP/04/2024 tanggal 23 April 2024 terkait Aset Properti Investasi pada Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai, yaitu berupa Aset Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa NUP 4 seluas 24 Ha dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 pada Ditjen PKRL Satker Sekretariat Ditjen PKRL. Pada periode 14 *Audited* 31 Desember 2023 belum dicatat sebagai Properti Investasi dikarenakan pada hasil pembahasan pada rapat Tripartid yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 disepakati untuk pencatatan Properti Investasi senilai Rp110.346.287.172,00 dan dilakukan pencatatan pada Semester I Tahun 2024. Pertimbangannya dikarenakan Aset Tanah yang direklasifikasikan menjadi Properti Investasi adalah bagian dari saldo Kemitraan Pihak Ketiga senilai Rp214.231.398.172,00, selain Aset Tanah senilai Rp110.346.287.172,00 terdapat aset lain yaitu Bangunan Lainnya (Prasasti) NUP 1 senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi NUP 1 senilai Rp13.121.507.000,00 dan Tanggul Keliling NUP 1 senilai Rp90.754.497.000,00, sehingga sisa aset bagian dari Kemitraan Pihak Ketiga agar lebih tepat dicatat, jika tidak menjadi bagian PI, maka perlu dilakukan inventarisasi/identifikasi di lapangan dengan Tim dari Biro Keuangan KKP, Tim dari Kemenkeu sebagai Pengelola Barang, Tim dari Inspektorat Jenderal KKP, untuk dilakukan Asersi Manajemen, selanjutnya untuk dituangkan ke dalam Kertas Kerja.

F.7.12. Koreksi Audited

Berdasarkan hasil koreksi untuk Laporan Keuangan periode Tahunan 2024 *Audited*, terdapat perubahan nilai pada beberapa akun yang terdapat pada tujuh satker yaitu satu satker pusat Setditjen PKRL, empat satker UPT yaitu BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, dua satker Tugas Pembantuan Dinas KP Prov. NTB dan Dinas KP Prov. Gorontalo (rincian koreksi, satker, akun, dan nilai terlampir).

Terdapat 13 akun yang secara akrual mengalami perubahan karena adanya koreksi *Audited* dengan rincian : (1) Piutang Lainnya (115212), (2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (116212), (3) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) pada lima satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar,

BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, dan LPSPL Sorong, (4) Barang Konsumsi (117111) dan (5) Beban Persediaan Konsumsi (593111) hanya pada satker Dinas KP Prov. NTB, (6) Beban Perjalanan Dinas Biasa (524211) pada empat satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, dan LPSPL Sorong, (7) Beban Perjalanan Dinas Biasa Paket Meeting Luar Kota (524119) hanya pada satker BPSPL Denpasar, (8) Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) dan (9) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) hanya terdapat pada satker Dinas KP Prov. Gorontalo, (10) Pendapatan Perizinan Lainnya (425259), (11) Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri (524219), (12) Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat (593122), dan (13) Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (593124) yang hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL.

Pada satker Setditjen PKRL terdapat tujuh koreksi pada LK *Audited* yang dirangkum dalam enam temuan dengan rincian :

- 1) Pembentukan piutang koreksi BPK atas izin pelaksanaan reklamasi yang menghasilkan PNBPN dengan pembayaran melewati Tahun Anggaran 2024 oleh BUT EMP Gebang Limited dengan total Rp2.488.353.852,00. Pembayaran dilakukan dengan empat tahap dimana tiga tahap telah dibayarkan pada tahun 2024, sementara sisanya dibayarkan pada tanggal 22 April 2025 senilai Rp622.088.463,00 dengan NTPN Nomor : 5A20161QVD5MR9AI;
- 2) Pembentukan piutang koreksi BPK atas izin pelaksanaan reklamasi yang menghasilkan PNBPN dengan pembayaran melewati Tahun Anggaran 2024 oleh PT. Vesinter Indonesia dengan total Rp9.564.232.305,00. Pembayaran dilakukan dengan tiga tahap dimana satu tahap telah dibayarkan pada tahun 2024, sementara sisanya dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2025 senilai Rp3.825.692.922,00 dengan NTPN Nomor : AE9C17QLV24IKI61 dan rencana pada bulan Juli 2025 senilai Rp3.825.692.922,00, sehingga total yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp7.651.385.844,00;
- 3) Pembentukan piutang Koreksi BPK Terinci Tahap IV Pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal, Kontrak Nomor SPK.129/PPK-JK/PL.450/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 senilai Rp423.850.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp31.401.720,00;
- 4) Pembentukan piutang Koreksi BPK Terinci Tahap IV Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon, Kontrak Nomor SPK.73/PPKJK/PL.450/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 senilai Rp3.446.000.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai

kontrak senilai Rp9.410.217,00. Pembayaran telah dilakukan pada tanggal 28 April 2025 senilai Rp9.410.217,00 dengan NTPN Nomor : 064C748VVO17VIJD;

- 5) Pembentukan piutang Koreksi BPK Terinci Tahap IV Pengadaan Bangunan dan Mesin Washing Plan Bima, Kontrak Nomor SPK.66/PPKJK/PL.450/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Senilai Rp10.730.000.000,00 dengan Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp207.104.577,20;
- 6) Pembentukan piutang Koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Pertanggungjawaban kegiatan LAUTRA yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp13.623.846,00 berupa pertanggungjawaban tidak didukung bukti pengeluaran yang sah senilai Rp1.544.700,00 dan pertanggungjawaban melebihi SBM TA 2024 dan/atau bukti riil senilai Rp7.294.845,00.

Pada satker BPSPL Denpasar terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Lautra Tahun 2024 senilai Rp469.400,00 yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2025 dengan NTPN Nomor : 3738E5UFSEMQ9M8G.

Pada satker BKKPN Kupang terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja senilai Rp580.000,00 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Maret 2025 dengan NTPN Nomor : 820250311369438.

Pada satker LPSPL Sorong terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat realisasi Keuangan Kegiatan PLN Lautra Tahun 2024 senilai Rp816.534.875,00 yang Belum Memenuhi Kaidah Pertanggungjawaban dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 6 Februari 2025 senilai Rp305.126,00 dengan NTPN Nomor : 270B83CIFT5VU3RQ.

Pada satker BPSPL Makassar terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas temuan Itjen yaitu terdapat Pertanggungjawaban Keuangan senilai Rp1.000.000,00 tidak sesuai ketentuan dan telah dilakukan pembayaran dengan NTPN Nomor : BE2C53CIFT5VRQPK.

Pada satker Dinas KP Prov. Gorontalo terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP atas hasil revidi Itjen yaitu terdapat kesalahan dalam perekaman dari BAST persediaan pada Modul Komitmen berupa kesalahan input volume dan satuan harga barang berupa tinta Epson sehingga menimbulkan Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan senilai Rp35.607.312.600,00.

Pada satker Dinas KP Prov. Nusa Tenggara Barat terdapat koreksi pada LK *Audited* terkait koreksi KKP yaitu terdapat transaksi habis pakai Barang Konsumsi yang dilakukan pada periode 14 senilai Rp290.000,00.

Pada Satker Sekretariat DJPK pada semester ini adanya pagu Minus pada Belanja Tunjangan PPh PNS sebesar Rp3.065.822,00 dikarenakan adanya kenaikan gaji pns dan fungsional sehingga berdampak pada kenaikan tunjangan PPh nya.

Pada Satker BKKPN Kupang pada semester ini adanya saldo tidak normal sebesar Rp.598.942.571 dikarenakan terdapat kuitansi TUP yang belum dibuat SPM.

Pada Satker LPSPL Sorong pada semester ini adanya saldo tidak normal sebesar Rp.282.008.300 dikarenakan terdapat pada utang pihak ketiga dan ada kuitansi yang belum di GU kan sebesar Rp.282.008.300.

Pada Satker BPSPL Makassar pada semester ini pada To Do List Monsakti masih muncul belanja tunjangan fungsional PPPK senilai Rp.3.238.000 dan belanja PNS senilai 1.765.916 dan telah dilakukan revisi DIPA belanja pegawai yang masih dalam proses KPPN Makassar II.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07

Tgl Data : 14/07/25 1:13 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 8:24 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,436,919,916,000	359,299,149,620	(1,077,620,766,380)	25.00	708,313,391,000	287,802,447,216	(420,510,943,784)	40.63
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	427,125,000,000	0	(427,125,000,000)	0.00	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,009,794,916,000	359,299,149,620	(650,495,766,380)	35.58	708,313,391,000	287,802,447,216	(420,510,943,784)	40.63
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,436,919,916,000	359,299,149,620	(1,077,620,766,380)	25.00	708,313,391,000	287,802,447,216	(420,510,943,784)	40.63
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	623,593,286,000	88,805,593,016	(534,787,692,984)	14.24	658,148,453,000	150,063,436,842	(508,085,016,158)	22.8
1. Belanja Pegawai	134,729,720,000	62,406,524,146	(72,323,195,854)	46.32	111,538,033,000	58,128,214,920	(53,409,818,080)	52.12
2. Belanja Barang	468,670,286,000	26,299,746,070	(442,370,539,930)	5.61	449,105,079,000	87,491,245,269	(361,613,833,731)	19.48
3. Belanja Modal	20,193,280,000	99,322,800	(20,093,957,200)	0.49	97,505,341,000	4,443,976,653	(93,061,364,347)	4.56
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07

Tgl Data : 14/07/25 1:13 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 8:24 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	623,593,286,000	88,805,593,016	(534,787,692,984)	14.24	658,148,453,000	150,063,436,842	(508,085,016,158)	22.8
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/25 8:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36,859,534,000	36,901,470,000	20,287,981,100	9,787,700	20,278,193,400	54.95	16,623,276,600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,195,000	2,255,000	301,791	7,445	294,346	13.05	1,960,654
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,651,808,000	2,663,688,000	1,482,117,322	617,860	1,481,499,462	55.62	1,182,188,538
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	781,659,000	784,986,000	425,460,815	0	425,460,815	54.2	359,525,185
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	476,942,000	478,190,000	329,460,000	24,780,000	304,680,000	63.72	173,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,114,978,000	4,470,478,000	3,421,666,000	19,955,000	3,401,711,000	76.09	1,068,767,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	267,236,000	287,270,000	389,279,095	0	389,279,095	135.51	(102,009,095)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,032,669,000	2,034,019,000	1,061,170,260	289,680	1,060,880,580	52.16	973,138,420
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,744,739,000	4,744,739,000	1,914,233,000	0	1,914,233,000	40.34	2,830,506,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	225,000,000	225,000,000	96,125,000	0	96,125,000	42.72	128,875,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	811,438,000	787,638,000	309,815,000	63,611,630	246,203,370	31.26	541,434,630
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	52,968,198,000	53,379,733,000	29,717,609,383	119,049,315	29,598,560,068	55.45	23,781,172,932
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,397,246,000	2,569,576,000	1,214,077,200	0	1,214,077,200	47.25	1,355,498,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,215,000	3,218,000	23,569	200	23,369	0.73	3,194,631
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	145,039,000	151,528,000	74,866,480	0	74,866,480	49.41	76,661,520
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	38,160,000	35,224,000	15,695,896	0	15,695,896	44.56	19,528,104
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	224,629,000	240,289,000	159,300,000	0	159,300,000	66.3	80,989,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	124,993,000	139,308,000	63,295,080	0	63,295,080	45.44	76,012,920
511628	Belanja Uang Makan PPPK	379,200,000	417,466,000	144,583,000	0	144,583,000	34.63	272,883,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	12,277,000	12,277,000	5,100,000	0	5,100,000	41.54	7,177,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	3,324,759,000	3,568,886,000	1,676,941,225	200	1,676,941,025	46.99	1,891,944,975
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,211,736,000	1,211,736,000	298,612,000	0	298,612,000	24.64	913,124,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	43,076,000	49,760,000	12,028,000	0	12,028,000	24.17	37,732,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,254,812,000	1,261,496,000	310,640,000	0	310,640,000	24.62	950,856,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	71,042,254,000	70,476,085,000	29,310,888,210	195,307	29,310,692,903	41.59	41,165,392,097
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,139,697,000	6,043,520,000	1,509,690,150	0	1,509,690,150	24.98	4,533,829,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	77,181,951,000	76,519,605,000	30,820,578,360	195,307	30,820,383,053	40.28	45,699,221,947
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	134,729,720,000	134,729,720,000	62,525,768,968	119,244,822	62,406,524,146	46.32	72323195854
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,395,860,000	8,340,651,000	3,169,077,307	0	3,169,077,307	38	5,171,573,693

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/25 8:30 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	138,355,000	127,636,000	43,307,484	0	43,307,484	33.93	84,328,516
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,176,346,000	2,086,130,000	552,620,000	0	552,620,000	26.49	1,533,510,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	592,386,000	639,046,000	151,213,633	0	151,213,633	23.66	487,832,367
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,305,947,000	11,193,463,000	3,916,218,424	0	3,916,218,424	34.99	7,277,244,576
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	33,869,158,000	33,125,131,000	1,238,787,266	0	1,238,787,266	3.74	31,886,343,734
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,748,264,000	1,599,414,000	7,830,000	0	7,830,000	0.49	1,591,584,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	425,700,000	363,390,000	75,784,951	0	75,784,951	20.85	287,605,049
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	33,234,000	27,434,000	0	0	0	0	27,434,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	36,076,356,000	35,115,369,000	1,322,402,217	0	1,322,402,217	3.77	33,792,966,783
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,048,694,000	1,135,199,000	200,240,039	0	200,240,039	17.64	934,958,961
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,048,694,000	1,135,199,000	200,240,039	0	200,240,039	17.64	934,958,961
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,612,880,000	1,413,588,000	538,835,493	0	538,835,493	38.12	874,752,507
522112	Belanja Langganan Telepon	369,240,000	364,799,000	130,468,081	0	130,468,081	35.76	234,330,919
522113	Belanja Langganan Air	156,400,000	154,000,000	33,220,541	0	33,220,541	21.57	120,779,459
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	935,827,000	1,028,090,000	338,429,894	0	338,429,894	32.92	689,660,106
522131	Belanja Jasa Konsultansi	144,589,428,000	151,027,539,000	128,900,000	0	128,900,000	0.09	150,898,639,000
522141	Belanja Sewa	21,625,633,000	21,762,398,000	5,286,107,298	0	5,286,107,298	24.29	16,476,290,702
522151	Belanja Jasa Profesi	8,386,686,000	7,918,726,000	114,000,000	0	114,000,000	1.44	7,804,726,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	28,500,968,000	31,399,617,000	7,108,382,969	0	7,108,382,969	22.64	24,291,234,031
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	206,177,062,000	215,068,757,000	13,678,344,276	0	13,678,344,276	6.36	201,390,412,724
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,593,043,000	2,834,328,000	711,187,893	0	711,187,893	25.09	2,123,140,107
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,461,082,000	4,130,142,000	796,510,333	0	796,510,333	19.29	3,333,631,667
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,450,000	7,450,000	2,222,000	0	2,222,000	29.83	5,228,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	9,062,275,000	6,972,620,000	1,509,920,226	0	1,509,920,226	21.65	5,462,699,774
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104,810,491,000	106,074,699,000	2,799,190,499	72,416,954	2,726,773,545	2.57	103,347,925,455
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,793,818,000	5,487,667,000	41,292,430	0	41,292,430	0.75	5,446,374,570
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,355,062,000	14,971,234,000	711,533,500	0	711,533,500	4.75	14,259,700,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52,025,438,000	49,560,810,000	1,155,129,399	0	1,155,129,399	2.33	48,405,680,601
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	178,984,809,000	176,094,410,000	4,707,145,828	72,416,954	4,634,728,874	2.63	171,459,681,126

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/25 8:30 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,840,466,000	1,520,000,000	0	0	0	0	1,520,000,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6,563,960,000	6,472,867,000	279,633,484	0	279,633,484	4.32	6,193,233,516
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	8,404,426,000	7,992,867,000	279,633,484	0	279,633,484	3.5	7,713,233,516
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	7,500,000,000	6,653,000,000	0	0	0	0	6,653,000,000
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	5,250,000,000	4,154,601,000	608,861,400	0	608,861,400	14.66	3,545,739,600
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	4,190,000,000	4,190,000,000	149,397,130	0	149,397,130	3.57	4,040,602,870
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	16,940,000,000	14,997,601,000	758,258,530	0	758,258,530	5.06	14,239,342,470
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	468,099,569,000	468,670,286,000	26,372,163,024	72,416,954	26,299,746,070	5.61	442370539930
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,511,897,000	19,437,780,000	99,322,800	0	99,322,800	0.51	19,338,457,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	18,511,897,000	19,437,780,000	99,322,800	0	99,322,800	0.51	19,338,457,200
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,496,600,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,696,600,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	555,500,000	555,500,000	0	0	0	0	555,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	555,500,000	555,500,000	0	0	0	0	555,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	20,763,997,000	20,193,280,000	99,322,800	0	99,322,800	0.49	20093957200
	JUMLAH BELANJA	623,593,286,000	623,593,286,000	88,997,254,792	191,661,776	88,805,593,016	14.24	534,787,692,984

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/25 2:43 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36,859,534,000	36,901,470,000	20,287,981,100	9,787,700	20,278,193,400	54.95	16,623,276,600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,195,000	2,255,000	301,791	7,445	294,346	13.05	1,960,654
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,651,808,000	2,663,688,000	1,482,117,322	617,860	1,481,499,462	55.62	1,182,188,538
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	781,659,000	784,986,000	425,460,815	0	425,460,815	54.2	359,525,185
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	476,942,000	478,190,000	329,460,000	24,780,000	304,680,000	63.72	173,510,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,114,978,000	4,470,478,000	3,421,666,000	19,955,000	3,401,711,000	76.09	1,068,767,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	267,236,000	287,270,000	389,279,095	0	389,279,095	135.51	(102,009,095)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,032,669,000	2,034,019,000	1,061,170,260	289,680	1,060,880,580	52.16	973,138,420
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,744,739,000	4,744,739,000	1,914,233,000	0	1,914,233,000	40.34	2,830,506,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	225,000,000	225,000,000	96,125,000	0	96,125,000	42.72	128,875,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	811,438,000	787,638,000	309,815,000	63,611,630	246,203,370	31.26	541,434,630
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,397,246,000	2,569,576,000	1,214,077,200	0	1,214,077,200	47.25	1,355,498,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,215,000	3,218,000	23,569	200	23,369	0.73	3,194,631
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	145,039,000	151,528,000	74,866,480	0	74,866,480	49.41	76,661,520
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	38,160,000	35,224,000	15,695,896	0	15,695,896	44.56	19,528,104
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	224,629,000	240,289,000	159,300,000	0	159,300,000	66.3	80,989,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	124,993,000	139,308,000	63,295,080	0	63,295,080	45.44	76,012,920
511628	Belanja Uang Makan PPPK	379,200,000	417,466,000	144,583,000	0	144,583,000	34.63	272,883,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	12,277,000	12,277,000	5,100,000	0	5,100,000	41.54	7,177,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,211,736,000	1,211,736,000	298,612,000	0	298,612,000	24.64	913,124,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	43,076,000	49,760,000	12,028,000	0	12,028,000	24.17	37,732,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	71,042,254,000	70,476,085,000	29,310,888,210	195,307	29,310,692,903	41.59	41,165,392,097
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,139,697,000	6,043,520,000	1,509,690,150	0	1,509,690,150	24.98	4,533,829,850
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	134,729,720,000	134,729,720,000	62,525,768,968	119,244,822	62,406,524,146	46.41	72,084,706,210
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,358,360,000	8,301,151,000	3,169,077,307	0	3,169,077,307	38.18	5,132,073,693
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	138,355,000	127,636,000	43,307,484	0	43,307,484	33.93	84,328,516
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,176,346,000	2,086,130,000	552,620,000	0	552,620,000	26.49	1,533,510,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	572,226,000	628,966,000	151,213,633	0	151,213,633	24.04	477,752,367
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	6,891,679,000	6,513,343,000	1,238,787,266	0	1,238,787,266	19.02	5,274,555,734
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	121,864,000	39,174,000	7,830,000	0	7,830,000	19.99	31,344,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	338,700,000	274,390,000	75,784,951	0	75,784,951	27.62	198,605,049
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10,890,000	10,890,000	0	0	0	0	10,890,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,036,144,000	1,025,614,000	200,240,039	0	200,240,039	19.52	825,373,961
522111	Belanja Langganan Listrik	1,612,880,000	1,413,588,000	538,835,493	0	538,835,493	38.12	874,752,507
522112	Belanja Langganan Telepon	369,240,000	364,799,000	130,468,081	0	130,468,081	35.76	234,330,919
522113	Belanja Langganan Air	156,400,000	154,000,000	33,220,541	0	33,220,541	21.57	120,779,459

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/25 2:43 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	903,727,000	976,654,000	338,429,894	0	338,429,894	34.65	638,224,106
522131	Belanja Jasa Konsultan	407,000,000	582,700,000	101,400,000	0	101,400,000	17.4	481,300,000
522141	Belanja Sewa	6,416,027,000	7,827,475,000	5,286,107,298	0	5,286,107,298	67.53	2,541,367,702
522151	Belanja Jasa Profesi	1,848,400,000	1,597,040,000	114,000,000	0	114,000,000	7.14	1,483,040,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	13,813,401,000	17,579,907,000	7,108,382,969	0	7,108,382,969	40.43	10,471,524,031
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,593,043,000	2,834,328,000	711,187,893	0	711,187,893	25.09	2,123,140,107
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,461,082,000	4,130,142,000	796,510,333	0	796,510,333	19.29	3,333,631,667
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,450,000	7,450,000	2,222,000	0	2,222,000	29.83	5,228,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,733,313,000	18,836,121,000	2,614,114,618	0	2,614,114,618	13.88	16,222,006,382
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	397,550,000	413,050,000	41,292,430	0	41,292,430	10	371,757,570
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,977,946,000	6,153,383,000	528,233,500	0	528,233,500	8.58	5,625,149,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,754,351,000	11,012,959,000	1,155,129,399	0	1,155,129,399	10.49	9,857,829,601
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,000,000,000	1,225,000,000	161,735,243	0	161,735,243	13.2	1,063,264,757
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	5,500,000,000	4,653,000,000	0	0	0	0	4,653,000,000
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3,250,000,000	2,154,601,000	608,861,400	0	608,861,400	28.26	1,545,739,600
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,190,000,000	2,190,000,000	149,397,130	0	149,397,130	6.82	2,040,602,870
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	104,140,074,000	103,214,191,000	25,858,388,902	0	25,858,388,902	25.05	77,355,802,098
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	925,883,000	99,322,800	0	99,322,800	10.73	826,560,200
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	925,883,000	99,322,800	0	99,322,800	10.73	826,560,200
	JUMLAH RUPIAH MURNI	238,869,794,000	238,869,794,000	88,483,480,670	119,244,822	88,364,235,848	37.04	150,267,068,508
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,500,000	29,500,000	0	0	0	0	29,500,000
521211	Belanja Bahan	14,813,208,000	14,279,415,000	0	0	0	0	14,279,415,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16,544,000	16,544,000	0	0	0	0	16,544,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	120,786,628,000	125,700,628,000	27,500,000	0	27,500,000	0.02	125,673,128,000
522141	Belanja Sewa	10,745,814,000	10,046,246,000	0	0	0	0	10,046,246,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,495,800,000	2,440,600,000	0	0	0	0	2,440,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,602,270,000	6,244,850,000	0	0	0	0	6,244,850,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,101,266,000	40,066,761,000	185,075,881	72,416,954	112,658,927	0.28	39,954,102,073
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,156,558,000	2,857,885,000	0	0	0	0	2,857,885,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,791,317,000	3,638,727,000	183,300,000	0	183,300,000	5.04	3,455,427,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/25 2:43 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,976,520,000	19,295,962,000	0	0	0	0	19,295,962,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	0	1,020,000,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,253,960,000	2,646,867,000	0	0	0	0	2,646,867,000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	232,842,385,000	234,338,985,000	395,875,881	72,416,954	323,458,927	0.17	233,870,692,165
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,105,515,000	15,105,515,000	0	0	0	0	15,105,515,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,496,600,000	0	0	0	0	0	0
536111	Belanja Modal Lainnya	555,500,000	555,500,000	0	0	0	0	555,500,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	17,157,615,000	15,661,015,000	0	0	0	0	15,661,015,000
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	250,000,000,000	250,000,000,000	395,875,881	72,416,954	323,458,927	0.16	249,531,707,165
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,160,000	10,080,000	0	0	0	0	10,080,000
521211	Belanja Bahan	11,303,561,000	11,471,663,000	0	0	0	0	11,471,663,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,626,400,000	1,560,240,000	0	0	0	0	1,560,240,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	32,000,000	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5,800,000	0	0	0	0	0	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,550,000	109,585,000	0	0	0	0	109,585,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	32,100,000	51,436,000	0	0	0	0	51,436,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,396,800,000	2,745,211,000	0	0	0	0	2,745,211,000
522141	Belanja Sewa	3,934,972,000	3,359,857,000	0	0	0	0	3,359,857,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,445,466,000	3,284,066,000	0	0	0	0	3,284,066,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,950,297,000	7,439,860,000	0	0	0	0	7,439,860,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,452,062,000	42,128,967,000	0	0	0	0	42,128,967,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,239,710,000	2,216,732,000	0	0	0	0	2,216,732,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,095,099,000	4,688,424,000	0	0	0	0	4,688,424,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,805,667,000	17,762,989,000	0	0	0	0	17,762,989,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	820,466,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	190,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	97,373,110,000	97,373,110,000	0	0	0	0	97,373,110,000
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,406,382,000	3,406,382,000	0	0	0	0	3,406,382,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/25 2:43 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,606,382,000	3,606,382,000	0	0	0	0	3,606,382,000
	JUMLAH PNPB	100,979,492,000	100,979,492,000	0	0	0	0	100,979,492,000
09	HIBAH LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	860,710,000	860,710,000	0	0	0	0	860,710,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	21,999,000,000	21,999,000,000	0	0	0	0	21,999,000,000
522141	Belanja Sewa	528,820,000	528,820,000	0	0	0	0	528,820,000
522151	Belanja Jasa Profesi	597,020,000	597,020,000	0	0	0	0	597,020,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,523,850,000	5,042,850,000	0	0	0	0	5,042,850,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	490,700,000	490,700,000	0	0	0	0	490,700,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,488,900,000	1,488,900,000	0	0	0	0	1,488,900,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2,120,000,000	2,601,000,000	117,898,241	0	117,898,241	4.53	2,483,101,759
	JUMLAH BELANJA BARANG	33,744,000,000	33,744,000,000	117,898,241	0	117,898,241	0.35	33,626,101,759
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	33,744,000,000	33,744,000,000	117,898,241	0	117,898,241	0.35	33,626,101,759
	TOTAL	623,593,286,000	623,593,286,000	88,997,254,792	191,661,776	88,805,593,016	14.27	534,404,369,432

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/07/25 8:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG	394,107,722,000	394,107,722,000	46,317,655,440	68,479,886	46,249,175,554	11.74	347,858,546,446
691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	394,237,722,000	394,237,722,000	46,317,655,440	68,479,886	46,249,175,554	11.75	347,988,546,446
0200	JAWA BARAT							
691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000
0300	JAWA TENGAH							
691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
0400	DI YOGYAKARTA							
691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
0500	JAWA TIMUR							
691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
0700	SUMATERA UTARA							
691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
0800	SUMATERA BARAT							
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)	17,679,108,000	17,679,108,000	6,439,681,665	13,347,385	6,426,334,280	36.35	11,252,773,720
691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	17,819,108,000	17,819,108,000	6,439,681,665	13,347,385	6,426,334,280	36.14	11,392,773,720
0900	RIAU							
477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	15,999,146,000	15,999,146,000	4,644,660,122	1,110,609	4,643,549,513	29.02	11,355,596,487
691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	16,139,146,000	16,139,146,000	4,644,660,122	1,110,609	4,643,549,513	28.78	11,495,596,487
1000	JAMBI							
691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
1100	SUMATERA SELATAN							
691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/07/25 8:35 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
1200	LAMPUNG							
691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
1300	KALIMANTAN BARAT							
477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	16,846,280,000	16,846,280,000	5,198,969,213	4,810,981	5,194,158,232	30.83	11,652,121,768
691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	16,986,280,000	16,986,280,000	5,198,969,213	4,810,981	5,194,158,232	30.61	11,792,121,768
1400	KALIMANTAN TENGAH							
691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
1500	KALIMANTAN SELATAN							
691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
1600	KALIMANTAN TIMUR							
691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
1700	SULAWESI UTARA							
691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
1800	SULAWESI TENGAH							
691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	245,000,000	245,000,000	0	0	0	0	245,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	245,000,000	245,000,000	0	0	0	0	245,000,000
1900	SULAWESI SELATAN							
477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	39,810,520,000	39,810,520,000	6,319,858,370	83,919,092	6,235,939,278	15.66	33,574,580,722
691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900	40,160,520,000	40,160,520,000	6,319,858,370	83,919,092	6,235,939,278	15.74	33,924,580,722
2000	SULAWESI TENGGARA							
691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
2100	MALUKU							
691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
2200	BALI							
477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	20,627,700,000	20,627,700,000	5,099,653,502	9,076,107	5,090,577,395	24.68	15,537,122,605
691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	395,000,000	395,000,000	0	0	0	0	395,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200	21,022,700,000	21,022,700,000	5,099,653,502	9,076,107	5,090,577,395	24.26	15,932,122,605

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/07/25 8:35 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
2300	NUSA TENGGARA BARAT							
691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA	395,000,000	395,000,000	0	0	0	0	395,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	395,000,000	395,000,000	0	0	0	0	395,000,000
2400	NUSA TENGGARA TIMUR							
499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)	54,810,447,000	54,810,447,000	6,224,403,984	9,066,765	6,215,337,219	11.34	48,595,109,781
691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	55,100,447,000	55,100,447,000	6,224,403,984	9,066,765	6,215,337,219	11.3	48,885,109,781
2500	PAPUA							
691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
2600	BENGKULU							
691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
2800	MALUKU UTARA							
691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
2900	BANTEN							
290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	16,345,154,000	16,345,154,000	5,450,988,886	925,901	5,450,062,985	33.34	10,895,091,015
691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	245,000,000	245,000,000	0	0	0	0	245,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	16,590,154,000	16,590,154,000	5,450,988,886	925,901	5,450,062,985	32.86	11,140,091,015
3000	BANGKA BELITUNG							
691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
3100	GORONTALO							
691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000
3200	KEPULAUAN RIAU							
691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
3300	PAPUA BARAT							
477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	40,227,209,000	40,227,209,000	3,301,383,610	925,050	3,300,458,560	8.2	36,926,750,440
691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	40,367,209,000	40,367,209,000	3,301,383,610	925,050	3,300,458,560	8.18	37,066,750,440
3400	SULAWESI BARAT							
691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 14/07/25 8:35 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
3500 691079	KALIMANTAN UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3500	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
	JUMLAH BELANJA	623,593,286,000	623,593,286,000	88,997,254,792	191,661,776	88,805,593,016	14.27	534,787,692,984

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/25 2:47 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	10,000,000,000	10,000,000,000	2,022,851,785	0	2,022,851,785	20.23	7,977,148,215
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8,921,225,000	8,921,225,000	346,239,358	0	346,239,358	3.88	8,574,985,642
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	18,921,225,000	18,921,225,000	2,369,091,143	0	2,369,091,143	12.055	16,552,133,857
WA	Program Dukungan Manajemen							
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	206,062,739,000	206,062,739,000	83,595,492,577	119,244,822	83,476,247,755	40.51	122,586,491,245
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	206,062,739,000	206,062,739,000	83,595,492,577	119,244,822	83,476,247,755	40.51	122,586,491,245
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,785,830,000	2,785,830,000	546,620,913	0	546,620,913	19.62	2,239,209,087
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	2,785,830,000	2,785,830,000	546,620,913	0	546,620,913	19.62	2,239,209,087
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2366	Perencanaan Ruang Laut	11,100,000,000	11,100,000,000	1,972,276,037	0	1,972,276,037	17.77	9,127,723,963
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	11,100,000,000	11,100,000,000	1,972,276,037	0	1,972,276,037	17.77	9,127,723,963
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	238,869,794,000	238,869,794,000	88,483,480,670	119,244,822	88,364,235,848	20.402	150,505,558,152
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	250,000,000,000	250,000,000,000	395,875,881	72,416,954	323,458,927	0.13	249,676,541,073
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	250,000,000,000	250,000,000,000	395,875,881	72,416,954	323,458,927	0.13	249,676,541,073
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	250,000,000,000	250,000,000,000	395,875,881	72,416,954	323,458,927	0.13	249,676,541,073

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/25 2:47 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
04	PNBP							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	28,289,491,000	28,289,491,000	0	0	0	0	28,289,491,000
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15,460,713,000	15,460,713,000	0	0	0	0	15,460,713,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	43,750,204,000	43,750,204,000	0	0	0	0	43,750,204,000
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	23,689,288,000	23,689,288,000	0	0	0	0	23,689,288,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	23,689,288,000	23,689,288,000	0	0	0	0	23,689,288,000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2366	Perencanaan Ruang Laut	33,540,000,000	33,540,000,000	0	0	0	0	33,540,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	33,540,000,000	33,540,000,000	0	0	0	0	33,540,000,000
	JUMLAH BELANJA PNPB	100,979,492,000	100,979,492,000	0	0	0	0	100,979,492,000
09	HIBAH LUAR NEGERI							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup							
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	33,744,000,000	33,744,000,000	117,898,241	0	117,898,241	0.35	33,626,101,759
	JUMLAH BELANJA PROGRAM FD	33,744,000,000	33,744,000,000	117,898,241	0	117,898,241	0.35	33,626,101,759
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	33,744,000,000	33,744,000,000	117,898,241	0	117,898,241	0.35	33,626,101,759
	JUMLAH	623,593,286,000	623,593,286,000	88,997,254,792	191,661,776	88,805,593,016	9.32	534,787,692,984

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 14/07/25 8:29 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	3,000,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/07/25 3:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4215	Pendapatan Perikanan					
421541	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut	427,125,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4215	427,125,000,000	0	0	0	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	146,530,694	0	146,530,694	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,279,268	0	7,279,268	0
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,559,257,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	16,158,513	0	16,158,513	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	2,559,257,000	169,968,475	0	169,968,475	6.64
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	994,512,318,000	352,336,042,146	2,474,110,000	349,861,932,146	35.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	994,512,318,000	352,336,042,146	2,474,110,000	349,861,932,146	35.18
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	12,723,341,000	8,738,119,705	1,713,100	8,736,406,605	68.66
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	12,723,341,000	8,738,119,705	1,713,100	8,736,406,605	68.66
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,370,000	0	40,370,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	40,370,000	0	40,370,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	70,878,010	0	70,878,010	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	419,594,384	0	419,594,384	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	490,472,394	0	490,472,394	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,436,919,916,000	361,774,972,720	2,475,823,100	359,299,149,620	25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/07/25 3:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	1,436,919,916,000	361,774,972,720	2,475,823,100	359,299,149,620	25

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	5,066,098,382	0	5,066,098,382	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,472,051,579	1,381,065,501	90,986,078	6.59
Piutang Bukan Pajak	6,531,405,912	11,239,891,322	(4,708,485,410)	(41.89)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(175,190,795)	(198,749,177)	23,558,382	(11.85)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	6,356,215,117	11,041,142,145	(4,684,927,028)	(42.43)
Persediaan	28,658,347	1,641,794,412	(1,613,136,065)	(98.25)
JUMLAH ASET LANCAR	12,923,023,425	14,064,002,058	(1,140,978,633)	(8.11)
ASET TETAP				
Tanah	328,758,991,227	328,758,991,227	0	0.00
Peralatan dan Mesin	122,723,219,023	125,006,191,641	(2,282,972,618)	(1.83)
Gedung dan Bangunan	90,736,630,532	90,736,630,532	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,616,970,810	12,616,970,810	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	129,293,869,571	129,357,185,571	(63,316,000)	(0.05)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(114,990,543,618)	(110,273,396,926)	(4,717,146,692)	4.28
JUMLAH ASET TETAP	569,139,137,545	576,202,572,855	(7,063,435,310)	(1.23)
Properti Investasi				
Properti Investasi	110,346,287,172	110,346,287,172	0	0.00
JUMLAH Properti Investasi	110,346,287,172	110,346,287,172	0	0.00
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Jangka Panjang lainnya	98,155,639,556	98,155,639,556	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(490,778,189)	(490,778,189)	0	0.00
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	97,664,861,367	97,664,861,367	0	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	97,664,861,367	97,664,861,367	0	0.00
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103,876,004,000	103,876,004,000	0	0.00
Aset Tak Berwujud	1,115,000,534	1,194,618,534	(79,618,000)	(6.66)
Aset Lain-lain	12,498,783,982	13,782,435,459	(1,283,651,477)	(9.31)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(61,430,985,274)	(59,526,552,128)	(1,904,433,146)	3.20
JUMLAH ASET LAINNYA	56,058,803,242	59,326,505,865	(3,267,702,623)	(5.51)
JUMLAH ASET	846,132,112,751	857,604,229,317	(11,472,116,566)	(1.34)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,885,312,938	774,372,777	5,110,940,161	660.01
Utang Yang Belum Ditagihkan	120,563,621	0	120,563,621	0.00
Uang Muka dari KPPN	5,066,098,382	0	5,066,098,382	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	113,000	(113,000)	(100.00)

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 8:26 AM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11,071,974,941	774,485,777	10,297,489,164	1,329.59
JUMLAH KEWAJIBAN	11,071,974,941	774,485,777	10,297,489,164	1,329.59
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	835,060,137,810	856,829,743,540	(21,769,605,730)	(2.54)
JUMLAH EKUITAS	835,060,137,810	856,829,743,540	(21,769,605,730)	(2.54)
JUMLAH EKUITAS	835,060,137,810	856,829,743,540	(21,769,605,730)	(2.54)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	846,132,112,751	857,604,229,317	(11,472,116,566)	(1.34)

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : 07 DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl. Cetak 14/07/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	113,000	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	1,380,952,501	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,559,256,077	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	8,680,635,245	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	12,796,279
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	185,952,898
0.0	117111	Barang Konsumsi	27,522,162	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	744,470,250	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	869,802,000	0
0.0	131111	Tanah	328,758,991,227	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	125,006,191,641	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	90,736,630,532	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,094,333,844	0
0.0	134112	Irigasi	4,234,153,463	0
0.0	134113	Jaringan	1,288,483,503	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	129,357,185,571	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	90,235,424,132
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	12,849,746,261
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,847,909,772
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,810,427,787
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	529,888,974
0.0	138311	Properti Investasi	110,346,287,172	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	98,155,639,556	0
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	490,778,189
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103,876,004,000	0
0.0	162151	Software	1,194,618,534	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,782,435,459	0
0.0	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	0	46,557,374,318
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,954,300,876
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,014,876,934
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	38,164,098
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	736,208,679
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	113,000
0.0	391111	Ekuitas	0	856,829,743,540
JUMLAH			1,028,093,705,737	1,028,093,705,737

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	880,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4,186,098,382	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	91,099,078	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	1,380,952,501	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,559,256,077	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	3,972,149,835	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	12,796,279
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	162,394,516
0.0	117111	Barang Konsumsi	28,658,347	0
0.0	131111	Tanah	328,758,991,227	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	122,723,219,023	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	90,736,630,532	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,094,333,844	0
0.0	134112	Irigasi	4,234,153,463	0
0.0	134113	Jaringan	1,288,483,503	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	129,293,869,571	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	93,538,028,353
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	13,862,703,025
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,063,235,097
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,981,055,255
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	545,521,888
0.0	138311	Properti Investasi	110,346,287,172	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	98,155,639,556	0
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	490,778,189
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103,876,004,000	0
0.0	162151	Software	1,115,000,534	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	12,419,165,982	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	79,618,000	0
0.0	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	0	48,945,650,555
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,413,981,419
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	991,735,300
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	79,618,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	3,853,251,061
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,940,962,799
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	880,950,871
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	789,851,793	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	120,563,621

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:26 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	5,066,098,382
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,805,593,016
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	359,299,149,620	0
0.0	313211	Transfer Keluar	744,470,250	0
0.0	391111	Ekuitas	0	856,829,743,540
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	60,000
0.0	391119	Koreksi Lainnya	894,518	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,388,692,877
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	146,530,694
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,279,268
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	19,349,374
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	345,414,150,761
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	8,736,406,605
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,370,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	70,878,010
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	419,594,384
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	94,347,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	22,808,925,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	327,065	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,664,698,598	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	478,795,303	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	359,530,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,789,786,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	397,011,215	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,192,974,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,914,233,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	112,200,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	276,033,370	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,365,436,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	26,449	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	84,304,880	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	17,633,856	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	183,265,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	71,188,860	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	144,583,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,950,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	298,612,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:26 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	12,028,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	29,519,897,029	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,523,276,906	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,512,233,698	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44,417,984	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	555,190,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	157,281,323	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,494,638,795	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	7,830,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	78,326,251	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	480,672,705	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	108,724,414	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	28,515,276	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	318,030,411	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	128,900,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,619,857,498	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	130,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	8,988,078,787	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	741,067,919	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	858,712,445	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,222,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,061,036,369	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,812,210	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	733,763,500	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,189,002,049	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	283,391,722	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,718,105,419	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,012,956,764	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	215,325,325	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	170,627,468	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	15,632,914	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	56,476,366	0
3.0	592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2,388,276,237	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	36,299,781	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	205,656,389	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	406,772,217	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	387,903,427	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 8:26 AM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	472,440,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	23,558,382
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	911,107,459	0
JUMLAH			1,490,945,878,521	1,490,945,878,521

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 8:27 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,805,593,016
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	359,299,149,620	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	146,530,694
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,279,268
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	16,158,513
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	352,336,042,146
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	8,738,119,705
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,370,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	70,878,010
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	419,594,384
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,287,981,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	301,791	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,482,117,322	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	425,460,815	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	329,460,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,421,666,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	389,279,095	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,061,170,260	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,914,233,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	96,125,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	309,815,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,214,077,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23,569	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	74,866,480	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	15,695,896	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	159,300,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	63,295,080	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	144,583,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,100,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	298,612,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	12,028,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	29,310,888,210	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,509,690,150	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,169,077,307	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	43,307,484	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	552,620,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	151,213,633	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:27 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Belanja Bahan	1,238,787,266	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,830,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	75,784,951	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200,240,039	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	538,835,493	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	130,468,081	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	33,220,541	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	338,429,894	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	128,900,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,286,107,298	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	114,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	7,108,382,969	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	711,187,893	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	796,510,333	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,222,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,799,190,499	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,292,430	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	711,533,500	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,155,129,399	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	279,633,484	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	608,861,400	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	149,397,130	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,322,800	0
3.1	425259	Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	2,474,110,000	0
3.1	425629	Pengembalian Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,713,100	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	9,787,700
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,445
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	617,860
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	24,780,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	19,955,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	289,680
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	63,611,630
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	200
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	195,307
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	72,416,954
JUMLAH			450,772,227,512	450,772,227,512

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:27 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I

: (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	354,217,556,008	286,043,353,798	68,174,202,210	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	354,217,556,008	286,043,353,798	68,174,202,210	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	354,217,556,008	286,043,353,798	68,174,202,210	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	66,220,716,591	61,697,004,670	4,523,711,921	-
Beban Persediaan	205,656,389	294,094,994	(88,438,605)	-
Beban Barang dan Jasa	21,653,597,142	53,094,711,416	(31,441,114,274)	-
Beban Pemeliharaan	1,602,002,364	2,020,964,404	(418,962,040)	-
Beban Perjalanan Dinas	5,418,005,850	47,572,752,387	(42,154,746,537)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,267,115,644	1,538,416,647	(271,301,003)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I

: (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:24 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,613,700,274	10,231,881,262	(618,180,988)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23,558,382)	(6,924,559)	(16,633,823)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	105,957,235,872	176,442,901,221	(70,485,665,349)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	248,260,320,136	109,600,452,577	138,659,867,559	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(764,576,765)	(1,172,581,159)	408,004,394	-
Pendapatan Pelepasan Aset	146,530,694	223,153,365	(76,622,671)	-
Beban Pelepasan Aset	911,107,459	1,395,734,524	(484,627,065)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	584,819,394	194,689,708	390,129,686	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	584,819,394	341,875,708	242,943,686	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	147,186,000	(147,186,000)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(179,757,371)	(977,891,451)	798,134,080	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	248,080,562,765	108,622,561,126	139,458,001,639	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	248,080,562,765	108,622,561,126	139,458,001,639	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI

: (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 8:23 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	856,829,743,540	837,822,061,097	19,007,682,443	2.27
SURPLUS/DEFISIT-LO	248,080,562,765	108,622,561,126	139,458,001,639	128.39
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(834,518)	(2,878,419)	2,043,901	(71.01)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	60,000	0	60,000	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(2,878,419)	2,878,419	(100)
LAIN-LAIN	(894,518)	0	(894,518)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(269,849,333,977)	(120,544,341,128)	(149,304,992,849)	123.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(21,769,605,730)	(11,924,658,421)	(9,844,947,309)	82.56
EKUITAS AKHIR	835,060,137,810	825,897,402,676	9,162,735,134	1.11

Keterangan :

FINAL